



IRRPD

**Rencana
Pembangunan
Daerah**

2024 - 2026



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Secara Nasional Pada Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, mengamanatkan bahwa Daerah dengan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk Periode 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 2024-2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada Periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Daerah digunakan oleh Pejabat Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. Bab V Tujuan dan Sasaran;
 - f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Daerah;

- g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. Bab IX Penutup.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas penendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Startegis Perangkat Daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
 - a. capaian target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. capaian target Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran; dan
 - d. efektifitas Program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diterjemahkan dalam Rencana Startegis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin:
 - a. konsistensi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan kinerja Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - b. konsistensi kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

- (3) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup evaluasi terhadap Program Prioritas Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah dan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tata cara pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RANCANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan Rencana Pembanguna Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan atau pembaharuan atas klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dapat disesuaikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berkenaan.
- (3) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 006

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan antar Dokumen	I-5
1.3.1 Keterkaitan RPD dengan RPJMN 2020 – 2024.....	I-6
1.3.2 Keterkaitan RPD dengan RPJMD Kalimantan Selatan 2021- 2026	I-6
1.3.3 Keterkaitan RPD dengan RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.....	I-6
1.3.4 Keterkaitan RPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM.....	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah.....	II-1
2.1.1.1.1 Letak Geografis, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-1
2.1.1.1.2 Kondisi Topografi.....	II-4
2.1.1.1.3 Kondisi Geologi.....	II-6
2.1.1.1.4 Kondisi Hidrologi	II-6
2.1.1.1.5 Kondisi Klimatologi	II-9
2.1.1.1.6 Karakteristik Tanah.....	II-12



2.1.1.1.7	Penggunaan Lahan.....	II-14
2.1.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah	II-15
2.1.1.3	Wilayah Rawan Bencana.....	II-24
2.1.1.4	Kondisi Demografi	II-32
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-36
2.1.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-36
2.1.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	II-36
2.1.2.1.2	Struktur Ekonomi.....	II-39
2.1.2.1.3	Inflasi	II-41
2.1.2.1.4	Pendapatan Perkapita.....	II-42
2.1.2.1.5	Indeks Gini.....	II-42
2.1.2.1.6	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin.....	II-44
2.1.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-46
2.1.2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	II-47
2.1.2.2.2	Angka Melek Huruf	II-49
2.1.2.2.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	II-50
2.1.2.2.4	Angka Harapan Lama Sekolah	II-51
2.1.2.2.5	Angka Harapan Hidup	II-52
2.1.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-52
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	II-55
2.1.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II-55
2.1.3.1.1	Pendidikan	II-55
2.1.3.1.2	Kesehatan.....	II-61
2.1.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-80
2.1.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	II-84
2.1.3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II-86
2.1.3.1.6	Sosial.....	II-88
2.1.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-93
2.1.3.2.1	Tenaga Kerja.....	II-93
2.1.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-95
2.1.3.2.3	Pangan.....	II-97

2.1.3.2.4	Lingkungan Hidup	II-99
2.1.3.2.5	Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-99
2.1.3.2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-100
2.1.3.2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-102
2.1.3.2.8	Perhubungan	II-103
2.1.3.2.9	Komunikasi dan Infomatika	II-105
2.1.3.2.10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-106
2.1.3.2.11	Penanaman Modal.....	II-108
2.1.3.2.12	Statistik	II-108
2.1.3.2.13	Persandian	II-109
2.1.3.2.14	Perpustakaan	II-109
2.1.3.2.15	Kearsipan	II-110
2.1.3.2.16	Pertanahan.....	II-112
2.1.3.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan.....	II-112
2.1.3.3.1	Pertanian dan Peternakan	II-112
2.1.3.3.2	Pariwisata.....	II-114
2.1.3.3.3	Perikanan	II-116
2.1.3.3.4	Perdagangan.....	II-116
2.1.3.3.5	Perindustrian	II-117
2.1.3.4	Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan	II-118
2.1.3.4.1	Perumusan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah	II-118
2.1.3.4.2	Pengawasan.....	II-122
2.1.3.4.3	Perencanaan Pembangunan.....	II-124
2.1.3.4.4	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	II-125
2.1.3.4.5	Penelitian dan Pengembangan	II-125
2.1.3.4.6	Keuangan	II-126
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-127
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-127
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-129
2.1.4.2.1	Luas Wilayah Produktif.....	II-129
2.1.4.2.2	Luas Wilayah Industri.....	II-131
2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-131

2.1.4.3.1	Proses Perizinan.....	II-132
2.1.4.3.2	Angka Kriminalitas.....	II-134
2.1.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-134
2.1.4.4.1	Rasio Ketergantungan.....	II-134
2.2	Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022.....	II-135
2.2.1	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019 – 2022	II-135
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN	
	KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2018 – 2022	III-2
3.1.1.1	Pendapatan Daerah 2018 – 2022.....	III-2
3.1.1.2	Belanja Daerah 2018 – 2022	III-5
3.1.1.3	Pembiayaan Daerah 2018 – 2022.....	III-7
3.1.2	Neraca Daerah.....	III-9
3.1.2.1	Aset	III-9
3.1.2.2	Kewajiban	III-9
3.1.2.3	Ekuitas Dana	III-10
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-16
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-16
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III-17
3.3	kerangka Pendanaan	III-19
3.3.1	kerangka Pendanaan	III-19
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.2	Isu Strategis.....	IV-4
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS.....	VI-1
6.1	Strategi Dan Arah Kebijakan	VI-1
6.2	Program Prioritas Daerah.....	VI-12
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM	

PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VIII-1
8.1 Indikator Kinerja Utama	VIII-2
8.2 Indikator Kinerja Daerah	VIII-2
BAB IX PENUTUP.....	IX-1
9.1 Pedoman Transisi.....	IX-2
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-3

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Tanah Laut Menurut Kecamatan.....	II-2
2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut.....	II-3
2.3 Luas Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan	II-5
2.4 Pembagian Satuan Wilayah Sungai di Kabupaten Tanah Laut	II-8
2.5 Temperatur (°C) dan Kelembaban Udara (%) Kab. Tanah Laut Tahun 2020-2022.....	II-10
2.6 Kecepatan Angin (knot) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 – 2022.....	II-11
2.7 Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan (mm) dan Penyinaran Matahari (%), Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022	II-11
2.8 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten Tanah Laut.....	II-16
2.9 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2022	II-24
2.10 Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan, 2022	II-25
2.11 Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Banjir dan Angin Puting Beliung Menurut Kecamatan, 2022	II-26
2.12 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Laut.....	II-27
2.13 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2018-2023	II-28
2.14 Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.....	II-31
2.15 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-33
2.16 Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-33
2.17 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022.....	II-34
2.18 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022	II-37
2.19 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2018-2022.....	II-37

2.20 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kab.Tanah Laut (%), 2018-2022	II-40
2.21 PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022	II-42
2.22 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-46
2.23 Angka Melek Huruf Usia 15+ di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2023	II-50
2.24 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-51
2.25 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-51
2.26 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-52
2.27 Jumlah Atlet dan Jumlah Medali yang diraih oleh atlet Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022	II-54
2.28 Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut, 2022	II-54
2.29 Kesenian yang diadakan di Kabupaten Tanah Laut menurut Kecamatan, 2022 ..	II-55
2.30 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-56
2.31 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-58
2.32 Rasio Guru dan Murid TK, SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-59
2.33 Jumlah Ruang Kelas di Kabupaten Tanah Laut menurut Tingkat Pendidikan, 2018-2022	II-60
2.34 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022	II-60
2.35 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-61
2.36 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-62
2.37 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-62
2.38 Jumlah Kasus Penyakit di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-63
2.39 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bayi Gizi Buruk di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-64
2.40 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-65
2.41 Jumlah AKI dan AKB di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-65

2.42 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2022	II-68
2.43 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2022.....	II-69
2.44 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2022.....	II-70
2.45 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2022	II-71
2.46 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2022	II-72
2.47 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2022.....	II-73
2.48 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Tahun 2022	II-74
2.49 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2022	II-75
2.50 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun 2022.....	II-76
2.51 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Tahun 2022	II-77
2.52 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2022.....	II-78
2.53 Persentase Rumah Tangga dengan Jaminan Sosial Menurut Jenis dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Laut, 2021	II-79
2.54 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-80
2.55 Jaringan Irigasi Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-81
2.56 Jumlah KK yang Terlayani Air Minum Layak dan Sanitasi Layak di Kabupaten Tanah Laut, 2023	II-82
2.57 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum, 2022.....	II-83
2.58 Rumah Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni, dan Total Rumah di Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2019-2022	II-84

2.59 Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-84
2.60 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2022 .	II-85
2.61 Pencapaian SPM Bidang Kenteteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 2022.....	II-86
2.62 Persentase Rumah Tangga dengan Jaminan Sosial Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-88
2.63 Pencapaian SPM Bidang Sosial Kab. Tanah Laut, 2022.....	II-88
2.64 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-94
2.65 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-94
2.66 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-95
2.67 Jumlah Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan, 2018-2022.....	II-95
2.68 Jumlah Pernikahan Dini di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-96
2.69 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2021.....	II-96
2.70 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2021.....	II-97
2.71 Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022 .	II-98
2.72 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-98
2.73 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran, 2020-2022.....	II-100
2.74 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga, 2020-2022.....	II-100
2.75 Jumlah Kepemilikan KTP Elektronik, 2020-2022.....	II-100
2.76 Jumlah Kepemilikan KIA, 2020-2022.....	II-100
2.77 Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022...	II-101
2.78 Perkembangan Peserta KB Aktif dan Pasangan Usaha Subur di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-102
2.79 Data Kampung KB di Kabupaten Tanah Laut, 2022.....	II-102
2.80 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-103
2.81 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-103
2.82 Jumlah Lokasi Parkir yang Dikelola Dinas Perhubungan, 2020-2021.....	II-104
2.83 Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022.....	II-105

2.84 Jumlah Blank Spot di Kabupaten Tanah Laut, 2022	II-105
2.85 Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022 ..	II-106
2.86 Perkembangan Data Keragaan Koperasi Kab. Tanah Laut per Desember 2022..	II-107
2.87 Data Umum Jumlah UMKM Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2022	II-107
2.88 Nilai Investasi Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-108
2.89 Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2018-2022	II-110
2.90 Perpustakaan yang Terstandar di Kabupaten Tanah Laut 2022	II-110
2.91 Perpustakaan yang Terstandar di Kabupaten Tanah Laut 2022	II-110
2.92 Capaian Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022	II-111
2.93 SDM Pengelola Arsip Kabupaten Tanah Laut 2018-2022	II-111
2.94 Realisasi PTSL Kabupaten Tanah Laut, 2020-2022	II-112
2.95 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-113
2.96 Kondisi Produksi Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-113
2.97 Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata yang Ada di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-114
2.98 Perkembangan Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022	II-115
2.99 Perkembangan Jumlah Hotel di Kabupaten Tanah Laut, 2021-2022	II-115
2.100 Produksi Perikanan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022 (ton).....	II-116
2.101 Jumlah Pasar Tradisional di Kab. Tanah Laut, 2019-2021	II-116
2.102 Jumlah Toko Modern di Kab. Tanah Laut, 2020-2022.....	II-117
2.103 Jumlah IKM yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna di Kab. Tanah Laut, 2019-2021	II-117
2.104 Data Perangkat Daerah menurut Perda Nomor 6 Tahun 2016.....	II-118
2.105 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022	II-120
2.106 Daftar Bank yang Ada di Kabupaten Tanah Laut, 2022	II-120
2.107 Perkembangan Jumlah BUMD di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2022	II-121
2.108 Lembaga BUMD di Kabupaten Tanah Laut, 2022	II-122
2.109 Pelaksanaan Pemeriksaan, Evaluasi dan Reviu Tahun 2018-2022.....	II-122
2.110 Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Tahun 2018-2022	II-123

2.111 Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Tanah Laut, 2022	II-124
2.112 Perkembangan Jumlah ASN menurut Golongan Kepangkatan di Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022	II-125
2.113 Daftar Inovasi Daerah yang Terkirim Melalui Aplikasi Inovation Government Award (IGA) Tahun 2022	II-125
2.114 Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kab. Tanah Laut, 2017-2021	II-127
2.115 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022 (persen).....	II-128
2.116 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019-2021	II-130
2.117 Rekapitulasi Izin Terbit dan Retribusinya menurut Jenis	II-132
2.118 Jumlah Tindak Pidana Kejahatan yang Masuk di Kejaksaan Negeri Pelaihari, 2020-2022	II-134
2.119 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-135
2.120 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022.....	II-136
3.1. Realisasi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022	III-4
3.2. Realisasi Belanja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022	III-6
3.3. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022.....	III-8
3.4. Neraca Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022.....	III-11
3.5. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022.....	III-16
3.6. Defisit/Surplus Anggaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2021	III-18
3.7. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026	III-20
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-2
5.1 Sandingan Dokumen Konsideran dan Isu Strategis dalam Perumusan Konsep Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.....	V-3
5.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.....	V-5
5.3 Penyelarasan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Kalsel, dan Kab. Tanah Laut	V-7
6.1 Strategi dan arah kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026	VI-2
6.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah.....	VI-12
6.3 Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten	

Tanah Laut 2024 – 2026	VI-12
6.4 Program Prioritas Daerah	VI-13
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.....	VII-2
7.2 Program Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.....	VII-3
8.1 Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Tanah Laut	VIII-2
8.2 Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Tanah Laut	VIII-2
8.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.....	VIII-3
8.4 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut.....	VIII-7

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Hubungan antara RPD Tahun 2024-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran	I-5
2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut	II-2
2.2 Jaringan Sungai di Kabupaten Tanah Laut, 2020.....	II-8
2.3 Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah	II-13
2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-33
2.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, 2018-2022	II-38
2.6 Laju Inflasi Kota Banjarmasin (persen), 2018-2022	II-41
2.7 Angka Gini Rasio Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-43
2.8 Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2022....	II-44
2.9 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-44
2.10 Persentase Angka Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan, 2022	II-45
2.11 Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-48
2.12 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota, 2022	II-49
2.13 Prevalensi Stunting Kabupaten Tanah Laut (EPPGBM), 2018-2022	II-66
2.14 8 (Delapan) Aksi Konvergensi di Tingkat Kabupaten/Kota	II-67
2.15 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-99
3.1 Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022.....	III-16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Tanah Laut akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut berakhir pada tahun 2023.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud, akan diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak mulai tahun 2023 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Tanah Laut tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah (RPJMD), menunggu pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Di sisi lain, RPJMD sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025, dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2018-2023, yakni capaian kinerja sampai dengan tahun 2022. RPD Kabupaten Tanah Laut 2024–2026 juga memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, dimaksudkan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan dalam penyusunan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

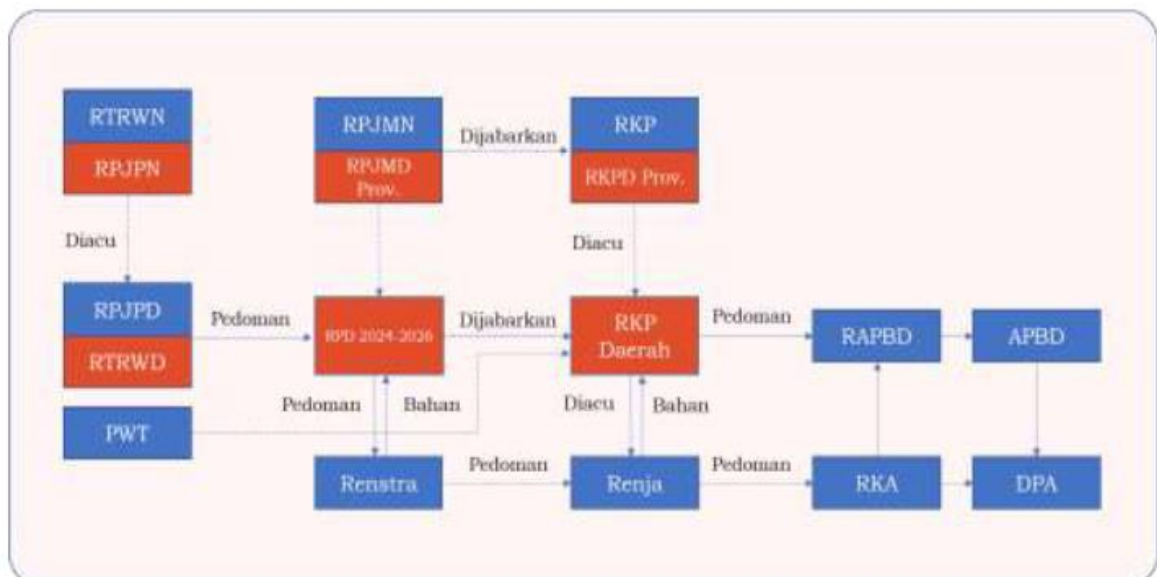
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

- Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 22. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 mempunyai hubungan dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan RPD Tanah Laut Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD Tanah Laut 2005-2025, mengacu pada RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kalimantan Selatan 2005-2025 serta RPJM Nasional Tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya RPD Tanah Laut Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dokumen RPD Tanah Laut Tahun 2024-2026, juga memedomani dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036. Selain itu juga memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Kalimantan Selatan, maupun RTRW Kabupaten/Kota sekitar agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten dan dalam kesatuan wilayah pembangunan provinsi yang berkelanjutan (*sustainable development*).



Gambar 1.1 Hubungan antara RPD Tahun 2024-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran

1.3.1 Keterkaitan RPD dengan RPJMN 2020 – 2024

Penyusunan RPD Tanah Laut Tahun 2024-2026 memperhatikan RPJMN 2020-2024, dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024 serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024. Visi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

1.3.2 Keterkaitan RPD dengan RPJMD Kalimantan Selatan 2021- 2026

Penyusunan RPD Tanah Laut Tahun 2024-2026 memperhatikan RPJMD Kalimantan Selatan 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah “*Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara*”.

Adapun Misi RPJMD Kalimantan Selatan 2021 – 2026

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Dengan penekanan pada RPJMD adalah pembangunan sumber daya manusia untuk mendorong perekonomian yang merata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta ketahanan bencana.

1.3.3 Keterkaitan RPD dengan RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025

RPD 2024-2026 merupakan penjabaran dari tahapan terakhir pelaksanaan RPJPD Tanah Laut 2005-2025. RPD periode 2024-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2005-2025 sudah dirumuskan visi Tanah Laut sampai dengan tahun 2025, adapun Visi Pembangunan Tanah Laut adalah “*Tanah Laut Sebagai Daerah Industri Dan Pelabuhan Menuju Masyarakat Sejahtera*”

Didasari Nilai-Nilai Agama“. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 misi pembangunan Tanah Laut 2005 -2025 yakni :

1. Mewujudkan Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai Nilai Agama
2. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan ketertiban serta penerapan sistem otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik
3. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada pengembangan industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata
5. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Laut Berstandart Internasional
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan
7. Mewujudkan Penyiapan Prasarana Pembangunan Bandara

Berlandaskan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025 maka pada RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 menekankan untuk pencapaian SDM yang berkualitas dan berdaya saing, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada pengembangan industri berbasis pertanian, kelautan, dan pariwisata serta pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan.

1.3.4 Keterkaitan RPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036. Program pembangunan pada RPD memedomani Pola Ruang Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari: 1). kawasan lindung, dengan prioritas mempertahankan fungsi lindung dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan aturan zonasi; dan 2). kawasan budidaya, dengan prioritas menyediakan sarana dan prasarana pendukung, menyediakan dokumen perencanaan spasial dan memperhatikan fungsi dan kelestarian lingkungan. Selain itu, program pembangunan pada RPD juga memedomani kawasan strategis Kabupaten meliputi bidang pertumbuhan ekonomi, bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, bidang fungsi dan daya dukung lingkungan, bidang pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut; dan bidang pelestarian sosial budaya. Dengan prioritas menyediakan sarana dan prasarana pendukung, menyediakan dokumen perencanaan spasial dan memperhatikan fungsi dan kelestarian lingkungan.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud memberikan landasan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024-2026 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. RPD dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi dan program dan penetapan prioritas dalam upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah. Selanjutnya RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ini digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dengan tolok ukur evaluasi kinerja dan keuangan tahunan setiap Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Adapun tujuan penyusunan RPD Tanah Laut tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 3 (tiga) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2024-2026;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 3 (tiga) tahun ke depan;
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026.
4. Menetapkan indikator kinerja sasaran dan tujuan daerah, serta indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut periode 2024-2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPD yang berisikan pengertian ringkas RPD, kedudukan RPD tahun rencana dalam RPJPD, gambaran capaian kinerja RPD periode sebelumnya, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan, hubungan antar dokumen RPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan seluruh aspek kehidupan daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan aspek kinerja keuangan di masa lalu dan melakukan proyeksi kerangka pendanaan di masa depan .

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini permasalahan dan analisis isu strategis internal eksternal wilayah untuk mendukung penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan secara lebih terperinci ke dalam beberapa indikator tujuan dan sasaran pembangunan serta perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan di atasnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini memuat strategi dan kebijakan yang dilaksanakan sebagai arah langkah dalam menentukan program-program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif dan target.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama daerah, indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja program perangkat daerah.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan tentang pedoman transisi dan metode pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023- 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di bagian Selatan. Kabupaten Tanah Laut tidak berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin dan harus menempuh jarak kurang lebih 65 km untuk mencapainya. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan, setiap kecamatan memiliki kondisi yang berbeda-beda baik kondisi fisik maupun non fisiknya. Uraian kondisi umum kondisi daerah akan lebih rinci dijelaskan dalam sub-sub bab selanjutnya.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di titik koordinat $114^{\circ}30'54,663''$ - $115^{\circ}22'38,535''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}30'37,586''$ - $4^{\circ}10'41,134''$ Lintang Selatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, luas wilayah daratan Kabupaten Tanah Laut adalah 384.852 ha dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Pelaihari. Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 kecamatan dan 130 desa dan 5 kelurahan. Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Adapun batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Bumbu.

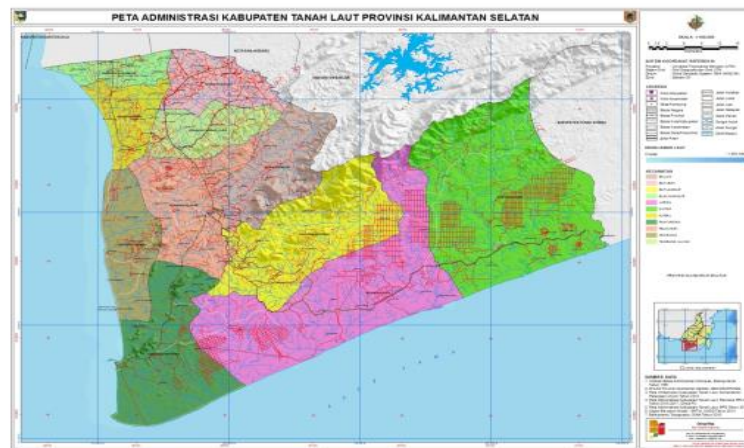


4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Tanah Laut Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Jorong	628,00	17,29
2.	Kintap	537,00	14,79
3.	Batu Ampar	548,10	15,09
4.	Panyipatan	336,00	9,25
5.	Pelaihari	379,45	10,45
6.	Bajuin	196,30	5,41
7.	Takisung	343,00	9,45
8.	Bati-bati	234,75	6,46
9.	Tambang Ulang	160,75	4,43
10.	Kurau	127,00	3,50
11.	Bumi Makmur	141,00	3,88
Kabupaten Tanah Laut		3.631.35	100,0%

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023



Sumber: PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036

Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut

Dari 11 kecamatan yang ada, secara keseluruhan Kabupaten Tanah Laut memiliki 135 desa dan kelurahan. Wilayah yang memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah

Kecamatan Pelaihari (15 desa dan 5 kelurahan), sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa sedikit adalah Kecamatan Bajuin dengan 9 desa. Rincian jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut

No.	Kecamatan	Ibukota	Desa/Kelurahan	
			Desa	Kelurahan
1.	Panyipatan	Panyipatan	10	-
2.	Takisung	Gunung Makmur	12	-
3.	Kurau	Padang Luas	11	-
4.	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	-
5.	Bati-Bati	Padang	14	-
6.	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	-
7.	Pelaihari	Pelaihari	15	5
8.	Bajuin	Bajuin	9	-
9.	Batu Ampar	Batu Ampar	14	-
10.	Jorong	Jorong	11	-
11.	Kintap	Kintapura	14	-
Kabupaten Tanah Laut			130	5

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Berdasarkan karakteristik geografis, kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Kecamatan yang berada di tepi laut yakni Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap.
2. Kecamatan yang tidak memiliki wilayah laut yakni Kecamatan Bati-bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Batu Ampar.

2.1.1.1.2 Kondisi Topografi

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung di daerah pedalaman yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi atas 2 bagian besar, yaitu: (1) Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara sungai dan Pantai Laut Jawa. (2) Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu: Puncak Gunung Kemuning (750 m dpl), Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl), Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl), Puncak Gunung Kematian (951 m dpl), Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl), Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl), Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl), Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl), dan Puncak Gunung Condong (553 m dpl).

Ditinjau dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi, yaitu kelas 0-7 meter, 7-25 meter, 25-100 meter, 100-500 meter, 500-1000 meter dan di atas 1000 meter. Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas adalah kelas elevasi 0-7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan). Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Jika dirinci menurut kecamatan, terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Laut yang tidak memiliki wilayah pantai yaitu Kecamatan Bati-Bati, Tambang Ulang, Pelaihari, Bajuin, dan Batu Ampar. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa wilayah tertinggi di Kabupaten Tanah Laut berada di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari, dan Bati-bati. Wilayah dengan dataran rendah cukup luas tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang. Sementara itu daerah dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan

Kelas Lereng (%)	Deskripsi	Luas (Ha)
< 3	Datar	250.460
3 – 8	Bergelombang/agak landau	44.830
8 – 15	Bergelombang/landau	31.600
15 – 25	Berbukit	21.805
25 – 40	Bergunung	10.690
40 – 60	Bergunung curam	13.545
> 60	Bergunung sangat curam	-

Sumber: PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036

Kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya maka tanah semakin peka terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. 0 – 3%, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan).
2. 3 – 8%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan).
3. 8–15%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47% dari luas total daratan).
4. 15 – 25%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85% dari luas total daratan).
5. 25– 40%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87% dari luas total daratan).
6. 40%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timurdengan luas 13.545 Ha (3,63% dari luas total daratan).

Berdasarkan paparan diatas, terlihat bahwa wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0 – 3% yaitu sebesar 77,80% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng

tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

2.1.1.1.3 Kondisi Geologi

Pada dasarnya Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar yang menjadi bagian dari Lempeng Mikro Sunda. Menurut Tapponnir (1982) Lempeng Asia Tenggara ditafsirkan sebagai fragmen dari lempeng Eurasia yang melejit ke Tenggara sebagai akibat dari tumbukan kerak Benua India dengan kerak Benua Asia, yang terjadi kira-kira 40 – 50 juta tahun yang lalu. Fragmen dari lempeng Eurasia ini kemudian dikenal sebagai lempeng mikro Sunda yang meliputi Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Adapun batas-batas tektonik yang paling penting disebalah timur adalah: (1) Komplek subduksi Kapur Tersier Awal yang berarah Timur laut, dimulai dari Pulau Jawa dan membentuk pegunungan Meratus sekarang, (2) Sesar mendatar utama di Kalimantan Timur dan Utara, dan (3) Jalur subduksi di Kalimantan Utara, Serawak, dan Laut Natuna, Jalur ini dikenal dengan jalur Lupar. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan di bagian Selatan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pra tersier, sedangkan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

2.1.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Tanah Laut memiliki banyak sungai yang terdiri dari sungai-sungai kecil dan besar. Sungai-sungai besar tersebut merupakan induk dari beberapa sungai kecil. Kapasitas air di sungai-sungai besar relatif terjaga sehingga tidak mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Secara umum, apabila ditinjau dari kondisi fisik, sungai yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut masih menunjukkan kondisi fisik air sungai yang alami. Kondisi ini sangat ditunjang dengan adanya vegetasi yang tumbuh di sepanjang aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan. Tinjauan terhadap sumberdaya air sangat urgent sifatnya dilakukan guna memahami potensi, bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya air. Keberadaan sungai yang wilayah alirannya (DAS) di lebih dari satu wilayah administratif menjadikan sungai harus diatur dengan sistem yang spesifik. Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau

Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km²), Sungai Tabanio (770 Km²), Sungai Sabulur (190 Km²), Sungai Sawarangan (580 Km²).

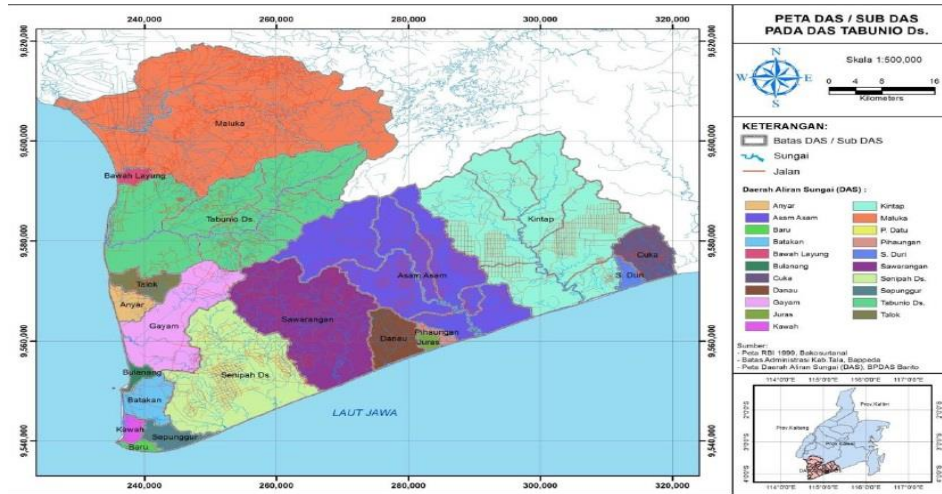
Adapun fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara daerah-daerah timur dengan daerah-daerah Barat di Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periode. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.

2. Air Tanah

Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak pada ketinggian 0 – 1000 m dpl. Oleh sebab itu kedalaman air tanahnya akan bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

3. Curah Hujan

Curah hujan sebagai faktor fisik bersifat dinamis karena di pengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimasukkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh kedua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi tindakan budidaya baik terhadap teknik pengolahan tanah maupun pemilihan jenis komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.



Sumber: PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036

Gambar 2.2 Peta Jaringan Sungai di Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa sungai yang membentuk beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Rincian DAS-DAS bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Pembagian Satuan Wilayah Sungai di Kabupaten Tanah Laut

No.	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
1.	DAS Kintap	Sungai Pudak, Haruan, Rantau, dan Kintap	Kecamatan Batu Ampar, Jorong dan Kintap	71.656,29
2.	DAS Tabanio	Sungai Bakar dan Tabanio	Kecamatan Bajuin, Pelaihari, Tambang Ulang, Bajuin, Kurau, dan Takisung	62.480,20
3.	DAS Asam-asam	Sungai Kaldan, Rangkan, dan asam-asam	Kecamatan Bajuin, Batu Ampar, Kintap dan Jorong	57.346,92
4.	DAS Maluka	Sungai Rangga dan Maluka	Kecamatan Bati-bati, kurau, Tambang Ulang, Bajuin, Pelaihari, dan Bumi Makmur	55.556,25
5.	DAS Sawarangan	Sungai Sawarangan	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, Batu Ampar dan Jorong	37.201,34
6.	DAS P. Datu		Kecamatan Panyipatan	2,57
7.	DAS Gayam	Sungai Batanggayam	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	19.581,65
8.	DAS Pihauangan	Sungai Pihauangan	Kecamatan Jorong	1.052,23

No.	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
9.	DAS Sepunggur	Sungai Sepunggur	Kecamatan Panyipatan	3.507,71
10.	DAS Danau	Sungai Danau	Kecamatan Jorong	7.036,77
11.	DAS Anyar	Sungai Anyar	Kecamatan Takisung	3.336,00
12.	DAS Juras	Sungai Juras	Kecamatan Jorong	983,92
13.	DAS Cuka	Sungai Cuka	Kecamatan Kintap	6.990,78
14.	DAS Duri	Sungai Duri	Kecamatan Kintap	1.666,41
15.	DAS Talok	Sungai Talok	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	4.141,28
16.	DAS Sanipah	Sungai Sanipah	Kecamatan Panyipatan, Batu Ampar, Pelaihari dan Jorong	36.314,07
17.	DAS Bawah Layung	Sungai Bawah Layung	Kecamatan Kurau	1.522,20
18.	DAS Baru	Sungai Baru	Kecamatan Panyipatan	981,69
19.	DAS Bulanang	Sungai Bulanang	Kecamatan Panyipatan	1.307,49
20.	DAS Batakan	Sungai Batakan	Kecamatan Panyipatan	5.492,72
21.	DAS Kawah	Sungai Kawah	Kecamatan Panyipatan	1.604,19

Sumber: PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036

2.1.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni – Agustus. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000–2.500 mm/tahun. Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspirasi bulanan, maka Kabupaten Tanah Laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang water balance-nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air. Pada musim kemarau angin bertiup dari benua Australia, keadaan angin saat itu bisa juga kencang. Pada tahun 2022, rata-rata temperatur di Kabupaten Tanah Laut cenderung stabil yaitu berkisar antara 27,9-29,0°C. Temperatur maksimum di Kabupaten Tanah Laut selama periode tersebut terjadi pada

April dan Mei yaitu 20,0 °C, sementara itu, untuk suhu udara minimum terendah tercatat sebesar 27,9°C pada bulan Februari dan Oktober 2022.

Kelembaban udara di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan tidak menentu. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 yang menunjukkan bahwa secara umum rata-rata kelembaban udara di wilayah ini berkisar antara 78,2-82,0% pada tahun 2022. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 82,0%, sedangkan kelembaban terendah terjadi pada bulan April yaitu sebesar 75,6%.

Tabel 2.5 Temperatur (°C) dan Kelembaban Udara (%) Kab. Tanah Laut Tahun 2020-2022

Bulan	2020		2021		2022	
	Rata-rata temperatur	Rata-rata Kelembaban Udara	Rata-rata temperatur	Rata-rata Kelembaban Udara	Rata-rata temperatur	Rata-rata Kelembaban Udara
Januari	28,37	80,55	27,1	84,0	28,3	78,0
Februari	28,53	79,79	27,8	80,8	27,9	78,7
Maret	28,76	79,11	28,0	79,1	28,2	78,8
April	29,04	78,22	29,1	74,5	29,0	75,6
Mei	29,33	78,74	29,1	76,3	29,0	78,0
Juni	28,30	78,61	28,6	76,5	28,2	79,3
Juli	28,27	76,12	28,3	76,5	28,0	78,6
Agustus	29,38	69,91	28,1	77,3	28,1	77,9
September	28,86	73,57	28,1	78,0	28,2	78,2
Oktober	29,06	74,14	28,8	77,2	27,9	82,0
November	28,20	79,57	28,1	80,5	28,2	79,9
Desember	27,54	82,17	27,7	82,6	28,2	78,8

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Kecepatan angin rerata di Kabupaten Tanah Laut dalam periode tahun 2020-2022 cukup bervariasi yaitu diantara 1,2 hingga 3,6 knot. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2022, kecepatan angin rerata tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 2,5 knot dan kecepatan angin rerata terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 3,6 knot.

Tabel 2.6 Kecepatan Angin (knot) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2022

Bulan	2020	2021	2022
	Rata-rata Kecepatan Angin	Rata-rata Kecepatan Angin	Rata-rata Kecepatan Angin
Januari	1,54	2,5	1,3
Februari	1,57	2,4	1,2
Maret	1,48	2,1	3,0
April	1,61	2,2	3,2
Mei	1,34	1,8	2,8
Juni	1,57	1,6	2,8
Juli	1,84	1,2	2,8
Agustus	2,03	1,3	2,8
September	1,76	1,5	2,8
Oktober	1,73	1,2	3,0
November	1,39	1,5	2,9
Desember	1,27	1,4	3,6

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Dalam periode tahun 2018-2022, curah hujan setiap bulan di Kabupaten Tanah Laut cukup bervariasi. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2018-2022, curah hujan bulanan tertinggi di Kabupaten Tanah Laut terjadi pada bulan Januari hingga Maret, kemudian kembali meninggi di bulan Oktober hingga Desember. Secara rinci, jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2022 tampak pada tabel berikut;

Tabel 2.7 Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan (mm) dan Hari Hujan (hari) Tahun 2018-2022

Bulan	2018		2019		2020		2021		2022	
	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	366,0	14	398	19	572,40	25	878,6	24	214,7	14
Februari	291,5	12	235	14	334,30	19	481,3	22	269,7	21
Maret	268,5	15	296	14	302,40	23	440,4	22	407,3	25
April	270,0	10	191	16	266,40	22	177,3	12	113,6	12
Mei	44,5	6	101	9	138,00	20	177,0	16	219,8	18
Juni	139,5	7	286	13	218,00	19	142,8	12	121,7	16
Juli	21,0	3	58	3	62,40	17	178,7	13	248,0	18
Agustus	49,0	2	-	-	57,20	11	147,9	16	218,5	16
September	96,0	3	11	1	163,50	20	140,9	16	305,2	14

Bulan	2018		2019		2020		2021		2022	
	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
Oktober	125,0	2	23	4	190,40	16	121,9	13	178,6	18
November	274,5	13	110	7	282,10	20	304,4	22	303,8	18
Desember	464,5	15	287	15	554,40	28	389,9	28	137,2	16

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2023

2.1.1.1.6 Karakteristik Tanah

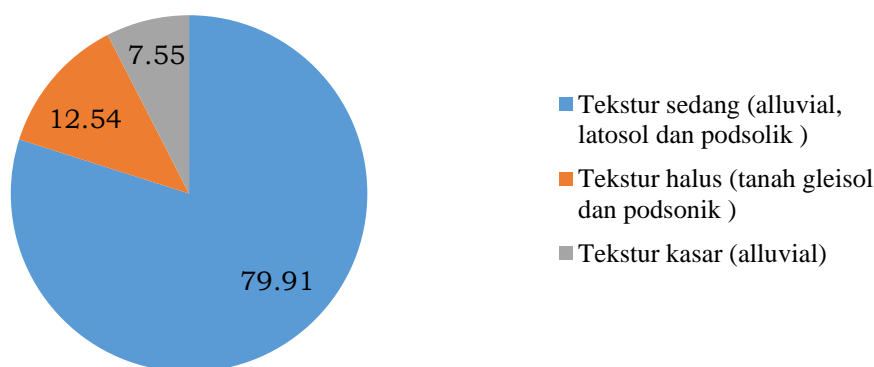
Jenis Tanah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Laotosol. Sedangkan jenis tanah Gleisol hanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).

Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).

Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangat masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98 % dari luas total daratan).

Tekstur tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang digunakan secara praktis untuk memprediksi potensi penggunaan tanah. Tanah bertekstur halus (dominan liat) memiliki permukaan yang lebih halus dibanding dengan tanah bertekstur kasar (dominan pasir) sehingga tanah yang bertekstur halus memiliki kapasitas adsorpsi unsur-unsur hara yang lebih besar dan umumnya lebih subur dibandingkan dengan tanah bertekstur kasar. Tanah bertekstur kasar lebih porus dan laju infiltrasinya lebih cepat. Walaupun demikian tanah bertekstur halus memiliki kapasitas memegang air lebih besar dari pada tanah pasir karna memiliki permukaan yang lebih luas. Sementara itu tekstur tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.



Sumber: PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036

Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah

Sifat tanah yang bertekstur halus baik untuk budidaya maupun non budidaya. Pada tanah yang bertekstur halus semua tanaman dapat tumbuh dengan baik dan tahan terhadap erosi. Sedangkan pada tanah yang bertekstur sedang tanaman masih dapat tumbuh dengan baik, tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Tanah dengan tekstur kasar memerlukan air sangat tinggi, sehingga daya simpan airnya sangat rendah, akibatnya kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Pada umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut ini bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91%), tanah bertekstur halus meliputi jenis tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750 Ha (12,54%) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi

jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7.55). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah Laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha (7.55%) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar.

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Ketersediaan tanah (lahan) memberikan gambaran potensi lahan dan arahan bagi kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau karena limitasinya tidak dapat dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar. Penggunaan lahan sekarang memberi gambaran sejauh mana jenis dan tingkat pemanfaatan lahan yang telah dilakukan baik yang bersifat budidaya maupun bukan budidaya. Ketersediaan tanah pada dasarnya tidak dilepaskan dengan status atau penguasaannya sekarang. Status tanah sekarang pada dasarnya sangat menentukan mudah dan dapat tidaknya suatu bidang tanah dikuasai atau dialihkan penguasaannya oleh pihak ketiga untuk kegiatan tertentu.

Melihat dari luas wilayah yang ada dengan penggunaan lahan seluas 92.814 ha (24.6%) merupakan kawasan hutan, 71.288 ha (19,2%) merupakan lahan perkebunan, 51.122 ha (13,7%) merupakan lahan sawah dan tegalan serta sisanya 4.157 ha (1,11%) untuk kawasan pemukiman dan lain-lain, maka Kabupaten Tanah Laut telah menyiapkan beragam potensi yang masih dan dapat dikelola untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kabupaten Tanah Laut melalui kebijakan penataan ruang wilayahnya telah memprioritaskan 5 (lima) kawasan dengan masing-masing fungsi strategisnya yaitu: (1) Kawasan industri dipusatkan di Kecamatan Bati-Bati dan Jorong, (2) Pertanian di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur, (3) Perikanan laut di Kecamatan Kurau, Takisung, Panyipatan, Jorong dan Kintap, (4) Pertambangan di Kecamatan Jorong dan Kintap, dan (5) Wisata di Kecamatan Takisung, Panyipatan, Jorong dan Pelaihari.

Kebijakan penataan ruang wilayah ini dimaksudkan tidak lain untuk mengantisipasi adanya pengembangan perlintasan 2 kawasan di Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebelah utara pengembangan dengan Banjarmasin-Banjar/Banjarmasin dan sebelah timur dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Kebijakan yang tertuang dalam program pengembangan wilayah diharapkan dapat mendukung pengembangan 2 wilayah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, terkendali yang pada akhirnya dapat tercapai hasil pembangunan yang maksimal. Penataan ruang wilayah yang tersebar dimaksudkan juga untuk membuka peluang bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya, mengenai kawasan peruntukan permukiman, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 Pasal 38, kawasan permukiman terdiri atas: (a) kawasan permukiman perkotaan; dan (b) Kawasan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, industri, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Pelaihari, Perkotaan Bati-Bati, Perkotaan Jorong, Perkotaan Kintap, dan Perkotaan Takisung, serta masing-masing perkotaan menyediakan RTH minimum 30%. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan permukiman perdesaan meliputi kawasan permukiman perdesaan yang menyebar di sekitar daerah pertanian di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut; dan rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki luas sebesar kurang lebih 37.062,48 hektar.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat kondisi geografis, potensi sektor pertanian secara keseluruhan, potensi pariwisata, dan potensi sumberdaya alam Kabupaten Tanah Laut. Pembangunan harus memanfaatkan berbagai sumberdaya potensial yang tersedia dimana nantinya perencanaan pembangunan harus lebih menekankan pada sektor-sektor unggulan tersebut.

Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas mengingat masih ada daerah di Kabupaten Tanah Laut yang belum terlalu maju. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur di wilayah ini mutlak diutamakan. Hal ini karena masih rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar di semua wilayah yang akan berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Implementasi pembangunan pada masa mendatang diharapkan mampu berkembang guna

meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berikut ini merupakan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036:

Tabel 2.8 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten Tanah Laut

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
A. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten				
1.	Sistem Perdesaan	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil pertanian dan perkebunan	Pengembangan pusat produksi tanaman pangan sentra padi di Kecamatan Bumi Makmur, Kurau, dan Panyipatan
			Pengembangan Kawasan Perkampungan/ Desa-Desa Nelayan	Pengembangan Tanaman Perkebunan di Kintap, dan Jorong
			Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan Peternakan di Bati-Bati
		Pengembangan Kawasan Agropolitan	Mendorong pengembangan sentra produksi jagung di Batu Ampar, Pelaihari dan Panyipatan	Perwujudan Penguatan Desa Pusat Pelayanan (DPP) di kawasan. Penciptaan dan Peningkatan Pelayanan Pusat Kawasn (pasar, dll)
				Penyediaan lahan untuk komoditas tanaman jagung. Membatasi pergantian ke komoditas lain
2.	Sistem Perkotaan	Pengembangan orde perkotaan	Pengembangan ibukota kabupaten sebagai perkotaan PKL Kota Pelaihari dan PLKp Bati-Bati	Peningkatan akses ke arah pusat
				Peningkatan fasilitas-2 pelayanan
		Pengembangan perkotaan utama sebagai perkotaan PPK dan PKL	Pengembangan perkotaan PPK Bati Bati, Kintap, Jorong dan Takisung serta PPL Kurau, tambang Ulang, Bumi makmur, Batu Ampar, Bajuin dan Panyipatan	Pengembangan pelabuhan perikanan
				Pengembangan kawasan industri
		Pengembangan permukiman		

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Rencana Pengembangan pelabuhan umum
				Rencana Pembangunan jalan lingkaran utara Pelaihari – Tambang Ulang – Batu Ampar, Tanah Laut
		Hirarki (besaran) perkotaan	Pengembangan Perkotaan Bati Bati sebagai Pendukung sistem Kawasan metropolitan Banjar Bakula	Peningkatan sarana-prasarana penunjang perkotaan skala regional dan nasional
		Sistem dan fungsi perwilayahan	Mendorong pembentukan pusat pelayanan	Peningkatan akses ke arah pusat Pelayanan
		Fasilitas perkotaan	Pengembangan Pusat-Pusat Perkotaan Pelaihari, Bati Bati dan Kintap	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan PKL, PPK dan PPL
			Pengembangan Pusat-Pusat Ibukota Kecamatan	Pengembangan Infrastruktur IKK
		Prasarana wilayah	Mewujudkan jalan internal provinsi melalui pengembangan jalan tembus	Pembangunan Jalan Lintas Utara Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Kota Banjarmasin – Jalan Pesisir Barat Kabupaten Tanah Laut. Rencana Kolektor Primer Gambut-Pulosari
		Permukiman Perkotaan	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan Padat Perencanaan Kawasan Pengembangan Baru Perkotaan untuk Lahan Perumahan (Permukiman Tertata)
B.	Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan			
1.	Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan	Pengembangan produk unggulan	Mendorong ekspor hasil pertanian unggulan daerah	Pengembangan sentra produksi-pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kawasan Agropolitan

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
		Pengembangan Sistem Agropolitan	Pengembangan produk unggulan, pengolahan dan perluasan jaringan di Kecamatan Batu Ampar, Panyipatan dan Pelaihari	Pengembangan Pasar Hewan Pengembangan Terminal Agrobisnis
2.	Penetapan Fungsi Kawasan Perkotaan	Pelayanan Sosial Ekonomi	Pengembangan Perkotaan Sebagai Pusat Pelayanan Sosial – Ekonomi	Kota Pelaihari sebagai ibukota Kabupaten Tanah Laut Kota Panyipatan sbg kota Pelabuhan Kota Bati Bati dan Jorong sebagai Kota Industri Perkotaan Pelaihari sbg kota perdagangan regional Perkotaan Takisung, Batu Ampar dan Bajuin sebagai Penyangga Perkembangan Perkotaan Pelaihari-Ibu Kota Kabupaten
		Pengembangan Perkotaan IKK	Pemenuhan fasilitas perkotaan dan peningkatan interaksi kawasan	Penyediaan sarana penunjang
C.	Pengembangan Prasarana Wilayah			
1.	Transportasi Jalan Raya	Membuka Wilayah Terisolir	Pengembangan jalan penghubung dan jalan tembus/sirip utara antar wilayah	Pengembangan Simpang Tiga Nusa Indah Bati Bati menjadi interkoneksi untuk kegiatan Terminal Agrobisnis, Pengembangan Simpang Tiga Nusa Indah Bati Bati ke arah Jalan Lingkar Utara menelusuri sisi Tahura melewati beberapa titik kawasan lindung di Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap
		Mengantisipasi Permintaan Transportasi Akan Datang	Penyediaan Sistem Jaringan dan Prasarana Transportasi	Pengembangan Jalan Arteri Primer sebagai Jalan Bebas Hambatan

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
		Mengatasi Permasalahan Transportasi		Peningkatan beberapa Fungsi Jalan Kabupaten menjadi Kolektor Primer Pengembangan Terminal Tipe B Ambungan Pengembangan Sub Terminal di Bati Bati, Kintap Peningkatan Jalan Ambungan Tajau Pecah, Kab. Tanah Laut Pembangunan jalan akses kawasan pariwisata Takisung – Batakan, Tanah Laut
		Mendukung Ekonomi Regional dan Lokal	Pengembangan Sistem Jaringan Jalan untuk menunjang Kepelabuhanan	Jalur Alternatif 1 Banjarmasin – Tanjung Dewa Jalur Alternatif 2 Banjarmasin – Tanjung Dewa Jalur Alternatif 1 Kintap – Tanjung Dewa Jalur Alternatif 2 Kintap – Tanjung Dewa Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari
2.	Transportasi Udara	Studi Alternatif Tahap Awal	Penjajakan kemungkinan pengembangan bandara udara	Studi Kelayakan Lokasi Studi Kebutuhan Pasar Pengembangan Kerjasama Bandar Udara
3.	Transportasi Sungai dan Laut	Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Air	Pengembangan Alur Sungai Sebagai Pelayaran/ Rute Sungai	Pengembangan Alur di DAS Tabanio Pengembangan Alur di DAS Kintap Pengembangan Alur di DAS Swarangan

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Pengembangan Alur di DAS Asam-Asam
			Pengembangan Pelabuhan Laut Alternatif	Pengembangan Pelabuhan Umum Alternatif di Pulau Datu - Tanjung Dewa
				Pembangunan, peningkatan dan pengembangan prasarana Pelabuhan Kintap, Tanah Laut
			Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP-TPI)	Pemantapan dan Peningkatan PP TPI di Kintap, Jorong, Swarangan, Tanjung Desa dan Tabanio
			Penyiapan kelembagaan operasional pengelola kawasan pelabuhan Tanjung Dewa dan Pelabuhan Curah Kering / Basah Jorong	Penyiapan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan Menyiapkan lembaga pengelola Kawasan pelabuhan Tanjung Dewa
4.	Prasarana Telematika	Optimalisasi pelayanan	Pengembangan prasarana penunjang	Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama
				Pengadaan sistem internet, 3G dan GPS
			Peningkatan jumlah dan mutu telematika	Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern
				Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan seperti di kota Pelaihari dan Bati Bati
5.	Prasarana Pengairan	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Pengembangan pengelolaan DAS Tabanio, Kintap, Jorong
				Penanaman pohon pencegah longsor
				Pembangunan dan perbaikan pintu air
				Pengelolaan mata air melalui Himpunan

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Petani Pemakai Air (HIPPA) Pengendalian banjir, Jorong, Asam-Asam dan Kontap Pembangunan Pengamanan Pantai Takisung
6.	Prasarana Energi/ Listrik	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan kapasitas listrik	Penambahan dan perbaikan jaringan Peningkatan infrastruktur pendukung Pengembangan sumber listrik (PLTD dan PLTU) Pengembangan Gardu Induk Pelaihari (30 MVA)
7.	Prasarana Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan	Peningkatan Pelayanan Sanitasi Dasar	Peningkatan Prasarana dan Sarana Persampahan 1. Pewadahan (bin kapasitas 50 l) 2. Pengangkutan (gerobak, container dan truk pengangkut) 3. Pembangunan TPS (landasan/transfer depo) Pembangunan TPST Penyediaan Komposter Aerob Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan di TPA 1. Metode Sanitary Landfill 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA sesuai standar Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasana persampahan

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Kegiatan Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri
				Peningkatan SDM pegawai pengelola persampahan
D.	Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten			
1.	Kawasan Lindung	Pemantapan Kawasan Lindung	Pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air	Pengembalian fungsi lindung dgn reboisasi Penanganan secara teknis Pengembangan hutan dan tanaman tegakan tinggi
Pemantapan Kawasan Perlindungan setempat			Perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;	
			Pengelolaan DAS Tabanio untuk air baku	
			Waduk dan mata air, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air	
				Mempertahankan ekosistem pantai : hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria. Penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman harus memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Pemanfaatan sumber air dan waduk untuk irigasi
			Pemantapan kawasan Cagar Budaya	Memelihara nilai dan fungsinya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata, Benteng Tabanio, dll Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan
2.	Kawasan budidaya	Pengembangan Kawasan Budidaya	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Memelihara habitat dan keaslian ekosistem
			Pengembangan Hutan Produksi Bernilai Ekonomi Tinggi Dengan Fungsi Lindung	Reboisasi tanaman untuk menahan tanah. Pengembangan aneka produk olahan Mengembangkan hutan rakyat
			Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Pengolahan Hasil Produksi Berorientasi Peningkatan Nilai Ekonomi dan Ekspor	Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung Pelaihari-Batu Ampar-Panyipatan. Pengembangan Pertanian Lahan Basah di Bumi Makmur, Kurau, dan Panyipatan. Pengembangan Perikanan di Kintap, Swarangan, dan Tabanio serta Industri Pengolahannya di Bati-bati
			Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan	Pengembangan Pertambangan mineral dan batubara di 9 kecamatan
			Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil Bati Bati Pengembangan Industri Berbasis Sumberdaya Alam Jorong

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
			Pengembangan Kawasan Parwisata	Pengembangan DTW Prioritas sesuai RIPPDA Pengembangan Potensi Obyek Mengkaitkan kalender wisata provinsi dan nasional Peningkatan Promosi wisata. Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya

Sumber: PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Tanah Laut memiliki skor Indeks Risiko Bencana yaitu 156,33 dengan kategori kelas risiko Tinggi. Data yang digunakan merupakan data hasil kajian risiko yang terdiri dari data: (1) bahaya per jenis bencana, (2) jiwa terpapar per jenis bencana, (3) kerugian rupiah per jenis bencana, (4) kerusakan lingkungan (ha) per jenis bencana dan (5) kapasitas pemerintah daerah per kabupaten/kota.

Berdasarkan kondisi wilayahnya dilihat dari karakteristik ekoregionnya, Kabupaten Tanah Laut memiliki kerawanan terhadap kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan pendangkalan sungai, erosi permukaan dan degradasi lahan karena penambangan batubara, tanah longsor. Berdasarkan Data Jumlah Kejadian Bencana Alam menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 Tabel 2.9, bencana banjir masih menjadi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Tanah Laut dengan total 28 kejadian. Disusul dengan bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 9 kejadian, angin puting beliung sebanyak 25 kejadian dan gelombang pasang sebanyak 2 kejadian.

Tabel 2.9 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2022

No.	Kecamatan	Banjir	Tanah Longsor	Kebakaran Hutan dan Lahan	Angin Puting Beliung	Gelombang Pasang
1.	Panyipatan	4	-	1	1	-

No.	Kecamatan	Banjir	Tanah Longsor	Kebakaran Hutan dan Lahan	Angin Puting Beliung	Gelombang Pasang
2.	Takisung	6	-	-	5	-
3.	Kurau	-	-	1	4	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-	2	-
5.	Bati-Bati	1	-	3	1	-
6.	Tambang Ulang	-	-	-	3	-
7.	Pelaihari	7	-	2	8	-
8.	Bajuin	1	-	-	-	-
9.	Batu Ampar	2	-	-	-	-
10.	Jorong	3	-	-	-	-
11.	Kintap	4	-	-	1	2
Kab. Tanah Laut		28	0	9	25	2

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Selama tahun 2022, terjadi beberapa bencana alam di Kabupaten Tanah Laut yang berdampak pada kerusakan rumah warga di setiap Kecamatan. Rumah rusak ringan terbanyak berada pada Kecamatan Tambang Ulang yaitu 8 unit, rusak sedang terbanyak berada pada Kecamatan Takisung, Kurau dan Pelaihari masing-masing 3 unit rumah, rusak berat terbanyak ada pada Kecamatan Bati-Bati yaitu 13 unit rumah dan terendam terbanyak berada pada Kecamatan Jorong sebanyak 917 unit rumah.

Tabel 2.10 Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan, 2022

No.	Kecamatan	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Terendam
1.	Panyipatan	-	2	-	278
2.	Takisung	2	3	5	651
3.	Kurau	4	3	1	-
4.	Bumi Makmur	-	1	-	-
5.	Bati-Bati	6	1	13	71
6.	Tambang Ulang	8	2	5	-
7.	Pelaihari	3	3	7	507

No.	Kecamatan	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Terendam
8.	Bajuin	-	-	1	131
9.	Batu Ampar	-	-	-	68
10.	Jorong	-	-	-	917
11.	Kintap	6	2	2	620
Kab. Tanah Laut		29	17	17	3243

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Tabel 2.11 Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Banjir dan Angin Puting Beliung Menurut Kecamatan, 2022

No.	Kecamatan	Meninggal dan Hilang		Luka-luka		Mengungsi	
		Banjir	Angin Puting Beliung	Banjir	Angin Puting Beliung	Banjir	Angin Puting Beliung
1.	Panyipatan	-	-	-	-	1188	2
2.	Takisung	-	-	-	-	2158	29
3.	Kurau	-	-	-	-	-	26
4.	Bumi Makmur	-	-	-	-	-	10
5.	Bati-Bati	-	-	-	-	-	23
6.	Tambang Ulang	-	-	-	-	-	-
7.	Pelaihari	-	-	-	-	801	-
8.	Bajuin	-	-	-	-	436	-
9.	Batu Ampar	-	-	-	-	209	-
10.	Jorong	-	-	-	-	3596	-
11.	Kintap	-	-	-	-	2406	-
Kab. Tanah Laut		-	-	-	-	10794	94

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Sebanyak 10.794 korban meninggal akibat bencana banjir dan 94 korban meninggal akibat bencana angin puting beliung di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022. Pengungsi terbanyak yang diakibatkan bencana banjir berada pada Kecamatan Jorong dan pengungsi terbanyak akibat angin puting beliung berada pada Kecamatan Takisung yaitu sebanyak 29 pengungsi.

Bencana akan terjadi dan menimbulkan dampak kerugian bila skala dari ancaman terlalu tinggi, kerentanan terlalu besar, dan kapasitas serta kesiapan yang dimiliki masyarakat atau pemerintah tidak cukup memadai untuk mengatasinya. Ancaman atau bahaya tidak akan

menjadi bencana apabila kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian baik fisik maupun korban jiwa. Secara teknis, bencana terjadi karena adanya ancaman dan kerentanan yang bekerjasama secara sistematis serta dipicu oleh faktor-faktor luar sehingga menjadikan potensi ancaman yang tersembunyi muncul ke permukaan sebagai ancaman nyata. Risiko bencana daerah dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan nilai kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung.

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel 2.16. Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Tanah Laut. Tingkat risiko untuk 7 (tujuh) jenis bencana di Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.12 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1	Banjir	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
2	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
3	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
7	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Tanah Laut (KRB Kab. Tanah Laut Tahun 2018 – 2023)

Bedasarkan data dari BNPB, Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Risiko Bencana Kab. Tanah Laut	178,00	178,00	178,00	178,00	156,33

Sumber: BNPB, 2023

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, telah dipaparkan berbagai kemungkinan bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hal tersebut, telah diatur beberapa hal mengenai bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Hal yang pertama adalah mengenai kawasan rawan bencana yang tercantum pada RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036:

- a. Kawasan rawan bencana alam meliputi (a) kawasan rawan banjir; (b) kawasan rawan kebakaran lahan/hutan dan permukiman; (c) kawasan rawan tanah longsor; (d) kawasan rawan angin puting beliung; dan (e) kawasan rawan gelombang pasang(rob) dan abrasi.
- b. Kawasan potensi rawan banjir adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi:
 - (a) Kecamatan Pelaihariterdapat di Desa Panjaratan; (b) Hampir semua desa di Kecamatan Kurau; (c) Kecamatan Bati-Bati di Desa Benua Raya dan Desa Bati-Bati; (d) Kecamatan Takisung di Desa Tabanio, Desa Kuala Tambangan, Desa Takisung, Desa Gunung Makmur, Desa Benua Tengah, dan Desa Pagatan Besar; (e) Kecamatan Jorong di Desa Sabuhur, Desa Jorong, Desa Asam-Asam, Desa Swarangan, dan Desa Muara Asam-Asam; (f) Kecamatan Panyipatandi Desa Kuringkit, Desa Batu Mulya dan Desa Bumi Asih; (g) Kecamatan Kintap di Desa Kintap, Desa Kintapura, Desa Riam Adungan, Desa Muara Kintap, Desa Salaman, Desa Kintap Kecil, dan Desa Pasir Putih; (h) Kecamatan Tambang Ulang di Desa Tambang Ulang; (i) Kecamatan Batu Ampar; (j) Kecamatan Bajuin di Desa Bajuin, Desa Kunyit, dan Desa Sungai Bakar; dan (k) Hampir semua desa di Kecamatan Bumi Makmur.
- c. Kawasan rawan kebakaran terdiri atas: (a) kawasan rawan kebakaran lahan/hutan; dan (b) kawasan rawan kebakaran permukiman.
- d. Kawasan rawan kebakaran lahan/hutan adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi: (a) Daerah gambut di Kecamatan Bati-Bati; (b) Kecamatan Kintap di Desa Riam Adungan; dan (c) Kecamatan Batu Ampar di Desa Bluru.

- e. Kawasan rawan kebakaran permukiman: tidak ada daerah yang tingkat kerawanannya tinggi.
- f. Kawasan rawan tanah longsor meliputi: (a) Kecamatan Pelaihari dengan tingkat kerawanan rendah, yakni: Desa Ujung Batu; dan (b) Kecamatan Kintap dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Desa Kintap.

Kawasan rawan angin puting beliung meliputi sebagian besar kecamatan akan tetapi dengan tingkat kerawanan sebagian besar rendah.

Kawasan rawan abrasi/ gelombang pasang terdapat pada daerah pesisir pantai, meliputi:

- a. Empat (4) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Kurau dengan tingkat kerawanan sedang sampai dengan tinggi, yakni Desa Sungai Bakau, Desa Padang Luas, Desa Bawah Layung, dan Desa Kurau.
- b. Lima (5) lokasi desa dari 12 desa di Kecamatan Takisung dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Tabanio, Desa Kuala Tambangan, Desa Takisung, dan Desa Telaga Langsung.
- c. Satu (1) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Jorong dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Desa Simpang Empat Sungai Baru.
- d. Enam (6) lokasi desa dari 10 desa di Kecamatan Panyipatan dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Panyipatan, Desa Kandangan Baru, Desa Kandangan Lama, Desa Batakan, Desa Tanjung Dewa, dan Desa Batu Mulya.
- e. Delapan (8) lokasi desa dari 14 desa di Kecamatan Kintap dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Pandan Sari, Desa Kintap, Desa Kintapura, Desa Muara Kintap, Desa Sumber Jaya, Desa Kebun Raya. Desa Mekar Sari dan Desa Sebamban Baru.
- f. Sepuluh (10) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Bumi Makmur dengan tingkat kerawanan sedang, yakni: Desa Sungai Rasau, Desa Handil Labuan Amas, Desa Handil Maluka, Desa Handil Suruk, Desa Handil Gayam, Desa Handil Birayang Atas, Desa Handil Birayang B

Selain hal-hal tersebut, diatur juga mengenai jalur evakuasi bencana di Kabupaten Tanah Laut. Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Perda RTRW Kabupaten Tanah Laut ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Jalur utama dari lokasi bencana banjir di Desa Nusa Indah dan Bati-bati melalui Jalan Ahmad Yani ke Kecamatan Tambang Ulang;
- b. Jalur utama dari lokasi kebakaran di daerah lahan kritis pada lahan gambut melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan;
- c. Jalur utama dari lokasi tanah longsor di Kecamatan Batu Ampar, Jorong, dan Kintap melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan; dan
- d. Jalur utama dari lokasi abrasi di sepanjang garis pantai kabupaten melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan.

Berbagai program dan rencana mitigasi bencana sebagaimana yang dimaksud diatas dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten. Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan, penanggulangan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Sementara itu, mengenai Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 Pasal 65 huruf p ditetapkan sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk ;
- Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini; dan

- Diizinkan melakukan kegiatan budidaya lain, seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi risiko yang timbul akibat bencana alam.

Pemanfaatan ruang dengan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;

- Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- Penetapan batas dataran banjir;
- Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- Dilarang pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

**Tabel 2.14 Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas
di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

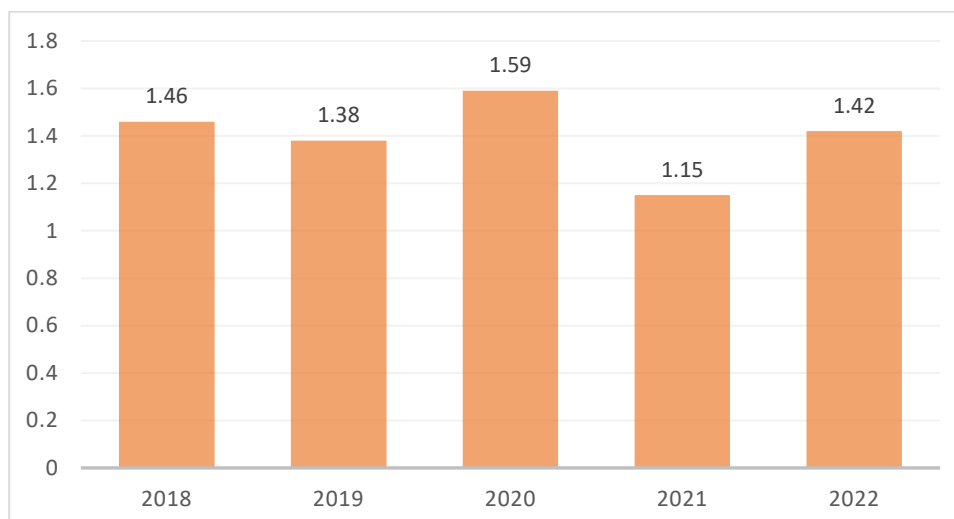
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100

Sumber: BPBD Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.1.4 Kondisi Demografi

Penduduk sebagai faktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk dibagi atas kelompok–kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 adalah sebanyak 361.044 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Laut selama periode 2021-2022 adalah 1,42 %.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 80.323 jiwa (22,25%) dan memiliki pertumbuhan penduduk sebesar 2,26% sepanjang tahun 2020-2022, sedangkan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kintap merupakan yang terendah yaitu sebesar 1,49%. Wilayah yang memiliki penduduk tertinggi kedua adalah Kecamatan Bati-Bati yaitu sebanyak 46.130 jiwa (12,78%), disusul Kecamatan Kintap sebanyak 44.201 jiwa (12,24%), dan Kecamatan Jorong sebanyak 35.827 jiwa (9,92%). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kurau yaitu 14.038 jiwa (3,89%). Jika dilihat dari kepadatan penduduk, wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebesar 212 jiwa per km², disusul oleh Kecamatan Bati-Bati sebesar 197 jiwa per km², dan Kecamatan Tambang Ulang sebesar 115 jiwa per km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah diurutkan dari yang paling kecil adalah Kecamatan Batu Ampar yaitu sebesar 52 jiwa per km², Kecamatan Jorong sebesar 57 jiwa per km², dan Kecamatan Panyipatan sebesar 78 jiwa per km².



Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Sumber:

Tabel 2.15 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Tahun	Penduduk			Pertumbuhan (%)	Sex Ratio
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)		
1	2018	174.019	165.176	339.195	1,46	105,35
2	2019	176.319	167.571	343.890	1,38	105,22
3	2020	179.012	169.954	348.966	1,59	105,30
4	2021	181.706	172.634	354.340	1,15	105,30
5	2022	185.076	175.968	361.044	1,42	105,18

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023 (diolah)

Tabel 2.16 Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Penduduk				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Panyipatan	336	68.6	63.91	75	76	78
2	Takisung	343	85.75	87.29	94	96	97
3	Kurau	127	95.25	96.78	107	109	111
4	Bumi Makmur	141	100.81	100.56	98	99	101
5	Bati-Bati	234,75	169.92	173.3	191	193	197
6	Tambang Ulang	160,75	106.16	107.53	111	113	115
7	Pelaihari	379,45	173.22	178.36	204	207	212
8	Bajuin	196,30	91.82	94.2	98	99	101
9	Batu Ampar	548,10	49.83	46.56	50	51	52

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	2018	2019	2020	2021	2022
10	Jorong	628	64.68	65.7	55	56	57
11	Kintap	537	96.44	99.2	80	81	82
Kabupaten Laut	Tanah	3.631,35	93.41	94.7	96	98	99

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023 (diolah)

Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 adalah sebanyak 185.076 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 175.968 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 adalah sebesar 105,2 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tanah Laut terdapat 105 penduduk laki-laki.

Selanjutnya, berdasarkan kelompok umur pada tahun 2022, dilihat bahwa penduduk usia muda lebih dominan yaitu usia dari 0-4 dan 0-9 tahun. Indikasi dari fenomena ini adalah bahwa fertilitas cukup tinggi di Kabupaten Tanah Laut dan/atau terdapat migrasi masuk yang menyebabkan tingginya angka kelompok termuda tersebut.

Meskipun jumlah penduduk umur 0-9 tahun adalah kelompok terbanyak di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022, tren kelompok yang menjadi tanggungan usia produktif untuk di bawah 14 tahun menunjukkan persentase terendah selama 5 tahun terakhir. Sebaliknya kelompok umur di atas 65 tahun menunjukkan angka tertinggi. Hal ini dapat menjadi sebuah peringatan untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut bahwa fenomena bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi beberapa tahun lagi, ternyata sudah mulai berjalan di tahun-tahun ini. Bonus demografi merupakan momentum yang jika dimanfaatkan dengan baik, dapat meningkatkan Angkatan kerja, menurunkan kemiskinan, dan lainnya.

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	16.235	15.646	31.881
5-9	17.114	16.613	33.727
10-14	15.993	15.071	31.064

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
15-19	14.693	13.428	28.121
20-24	14.463	13.974	28.437
25-29	14.848	14.194	29.042
30-34	14.784	14.416	29.200
35-39	14.870	14.366	29.236
40-44	14.132	13.255	27.387
45-49	12.564	11.713	24.277
50-54	10.472	9.869	20.341
55-59	8.626	8.165	16.791
60-64	6.672	5.990	12.662
65-69	4.826	4.319	9.145
70-74	2.630	2.565	5.195
75+	2.154	2.384	4.538
Tanah Laut	185.076	175.968	361.044

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 menurut kelompok umur terbanyak ada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebanyak 33.727 jiwa dan disusul oleh kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 31.881 jiwa kemudian kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 31.064 jiwa.

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Kondisi ini juga sering disebut sebagai *population boom*. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang akan memiliki dua implikasi, jika dapat penduduk dikelola dengan baik sehingga menjadi SDM produktif akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah.

Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan

kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni menggunakan perhitungan tahun dasar 2010. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Selama periode 2018-2022, tren PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp 13.241.237,45 juta pada tahun 2018 kemudian meningkat menjadi Rp 13.902.297,08 juta pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 13.786,685,56 juta, namun pada tahun 2021 naik kembali menjadi 15.326.244,74 juta, dan kembali naik pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 19.019.178,93 juta. Tren serupa juga ditunjukkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 9.995,214,72 juta pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp 10.366,648,31 juta, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 10.164,061, 96 juta, namun

kembali meningkat menjadi Rp. 10.515.159,53 juta pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi Rp. 11.053.374,62 juta pada tahun 2022.

Tabel 2.18 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022

Tahun	ADHB (Juta Rupiah)	ADHK (Juta Rupiah)
2018	13.241.237,45	9.995.214,72
2019	13.902.297,08	10.366.648,31
2020	13.786.685,56	10.164.061,96
2021*	15.326.244,74	10.515.159,53
2022**	19.019.178,93	11.053.374,62

Sumber : BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Keterangan:

*: Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

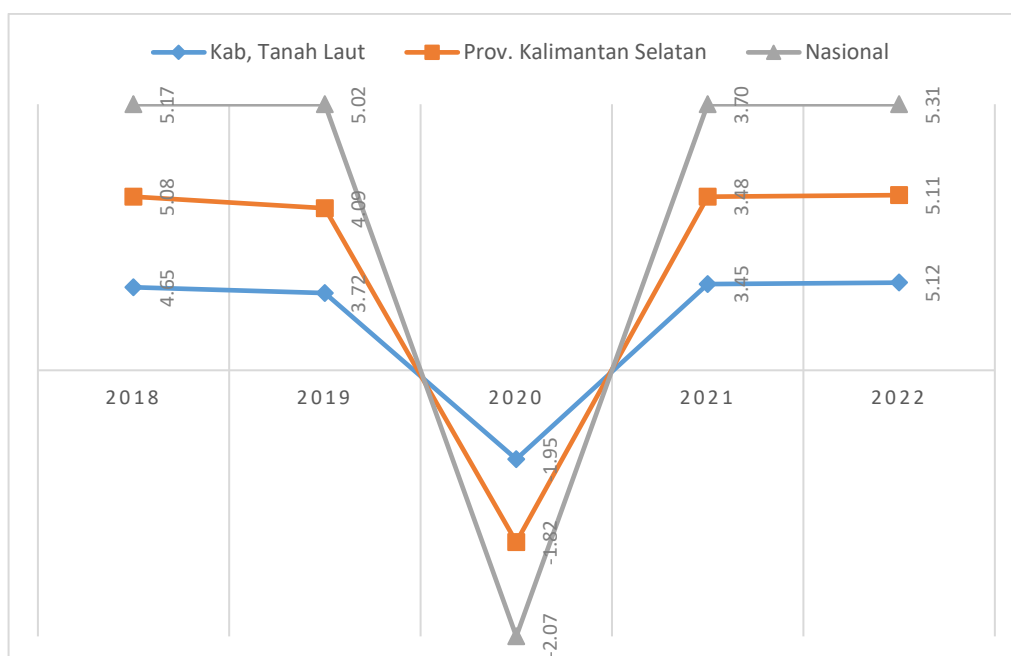
Tabel 2.19 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2018-2022

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,64	3,42	-0,30	1,73	2,70
Pertambangan dan Penggalan	2,36	0,73	-4,96	4,45	6,22
Industri Pengolahan	5,79	2,51	-4,27	5,01	3,86
Pengadaan Listrik dan Gas	7,5	4,07	5,02	4,78	7,79
Pengadaan Air	6,66	3,45	3,45	3,91	4,96
Konstruksi	6,95	6,26	-0,98	3,84	4,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,21	6,57	-2,89	2,48	7,10
Transportasi dan Pergudangan	6,92	5,93	-1,87	1,59	13,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,73	6,18	-1,23	2,29	6,54
Informasi dan Komunikasi	7,19	6,33	6,34	6,57	6,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	4,3	2,29	-1,44	0,54
Real Estate	4,93	4,72	1,90	5,10	4,59
Jasa Perusahaan	7,25	7,16	-1,74	3,49	6,89
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,84	8,33	1,14	4,71	-0,54

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Jasa Pendidikan	7,22	6,02	2,64	0,83	3,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,18	4,78	7,52	8,20	4,59
Jasa lainnya	7,02	6,78	-0,86	0,84	6,29
PDRB	4,65	3,72	-1,95	3,45	5,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Dilihat dari tabel di atas, secara agregat perekonomian Tanah Laut mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen di tahun 2022 setelah pada tahun 2020 mencapai angka negatif. Pertumbuhan positif ini artinya pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sektor lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan paling rendah adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu -0,54 persen. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi pada tahun sebelumnya pertumbuhannya paling rendah yaitu -1,44 persen pada tahun 2022 naik menjadi 0,54 persen. Sementara itu sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling besar pada tahun 2022 yaitu 13,64 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Gambar 2.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, 2018-2022

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi, namun dinyatakan dalam istilah nominal, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diamati dalam rentang waktu yang lebih besar, seperti tahun ke tahun (YoY), atau dekade ke dekade. Gambar 2.5 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut berkontraksi cukup dalam di angka -1,95 yang merupakan salah satu dampak dari pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut mampu bangkit ke angka 3,45 dan pada tahun 2022 menjadi 5,12 %.

Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di atasnya dimana pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2022 mencapai 3,11%. Dan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawahnya, dimana pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 mencapai 5,31%.

2.1.2.1.2 Struktur Ekonomi

Beragamnya potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di suatu wilayah memberikan warna pada struktur ekonomi pada wilayah tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusinya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Tabel 2.20 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kab.Tanah Laut (%), 2018-2022

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Atas Dasar Harga Berlaku				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.92	19.01	19.28	18,03	15,58
Pertambangan dan Penggalian	23.85	22.59	21.67	25,18	34,30
Industri Pengolahan	12.79	12.52	12.29	12,10	10,50
Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.09	0.1	0,10	0,09
Pengadaan Air	0.18	0.19	0.2	0,19	0,16
Konstruksi	7.26	7.5	7.52	7,28	6,37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.2	11.53	11.49	11,29	10,45
Transportasi dan Pergudangan	6.08	6.27	6.25	5,78	5,55
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.54	1.59	1.61	1,52	1,34
Informasi dan Komunikasi	2.96	3.03	3.23	3,11	2,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.48	1.52	1.56	1,45	1,24
Real Estate	1.97	2.02	2.09	2,02	1,72
Jasa Perusahaan	0.34	0.36	0.37	0,35	0,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.44	5.73	5.95	5,68	4,64
Jasa Pendidikan	4,06	4.16	4.37	4,01	3,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04	1.06	1.19	1,18	1,01
Jasa lainnya	0,78	0.81	0.82	0,75	0,67
PDRB	100	100	100	100	100

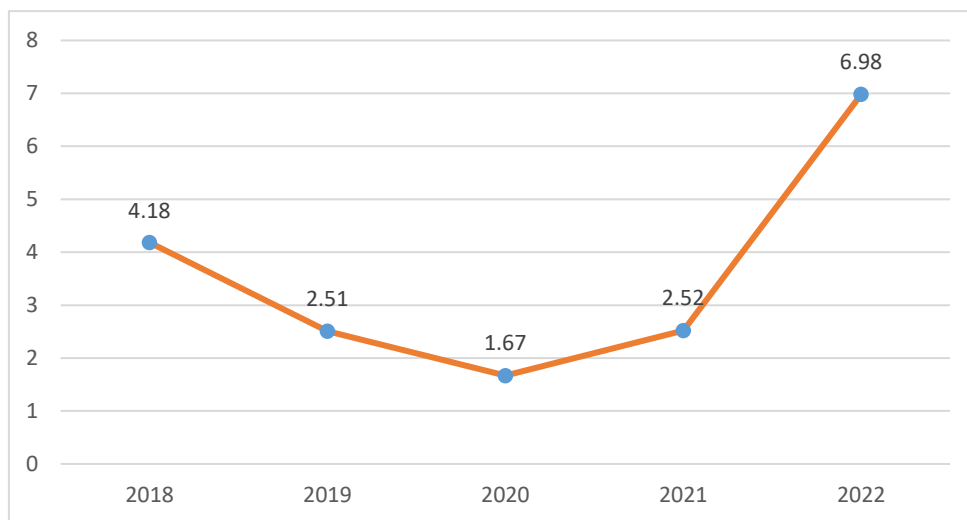
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Dilihat dari tabel di atas, perekonomian Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sebesar 34,30% pada tahun 2022. Kemudian sektor andalan kedua di Kabupaten Tanah Laut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, distribusi sektor ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 sebesar 15,58%, menurun dari tahun 2021 yang mana distribusinya sebesar 18,03%. Industri lainnya yang perlu diperhitungkan karena distribusinya terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan. Distribusi sektor ini juga mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, namun pada tahun 2022, kontribusi mencapai 10,50%, meenurun dari 2021

distribusinya sebesar 12,10%. Kekayaan sumber daya alam pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang mendorong tumbuhnya sektor industri, baik formal maupun non formal.

2.1.2.1.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Menurut Bank Indonesia (2020), inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provisinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.6 Laju Inflasi Kota Banjarmasin (persen), 2018-2022

Menurut tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu inflasi ringan (< 10 persen per tahun), inflasi sedang (10-30 persen per tahun), inflasi berat (30-100 persen per tahun), dan inflasi sangat berat/hiperinflasi (> 100 persen per tahun). Pengukuran inflasi hanya dilakukan di 66 kota di Indonesia dan salah satunya di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dijadikan sebagai salah satu rujukan angka inflasi di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dapat diasumsikan bahwa inflasi di Kabupaten Tanah Laut akan sama dengan inflasi di Kota Banjarmasin. Pada periode 2018-2020 tingkat inflasi di Kota Banjarmasin mengalami penurunan dari 4,18% menjadi 1,67%, kemudian naik pada tahun 2021

menjadi 2,52% dan kembali naik menjadi 6,98% pada tahun 2022. Secara umum inflasi Kota Banjarmasin masih tergolong inflasi ringan.

2.1.2.1.4 Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau per capita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

Tabel 2.21 PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB (Rp Ribu)	39.037,24	40.773,03	39.507,25	43.252,92	52.678,29

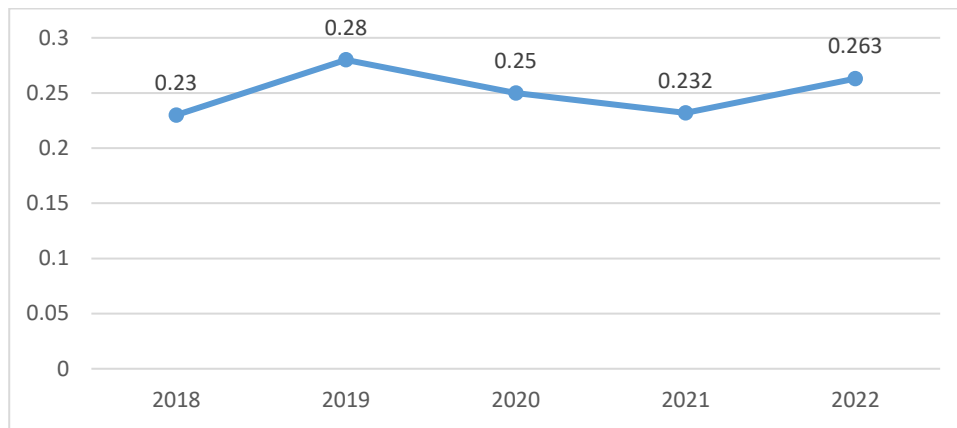
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut cenderung meningkat setiap tahunnya, baik untuk PDRB ADHB. Pada tahun 2018 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 36,037 juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp 52,678 juta. Peningkatan dari PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut pada setiap tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Namun PDRB Per Kapita Kab. Tanah Laut masih berada di bawah PDRB Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Rp. 60,08 juta dan PDRB Per Kapit Naional yaitu Rp 71 juta pada tahun 2022.

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Pengukuran tingkat pemerataan dapat dilakukan dengan pendekatan koefisien gini. Koefisien gini atau rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk. Nilai rasio gini antara 0 hingga 1. Apabila nilai rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusipendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) Gini Ratio>0,5

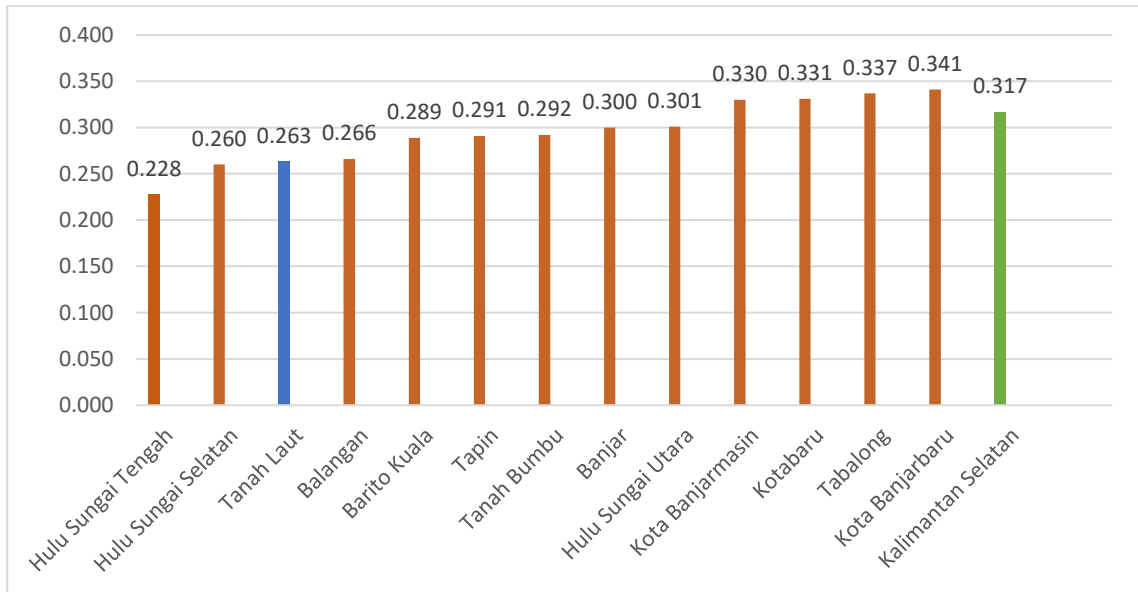
yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) Gini Ratio 0,3–0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan (c) Gini Ratio <0,3 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan rendah.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.7 Angka Gini Rasio Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Berdasarkan Gambar 2.9, terlihat bahwa sepanjang periode 2018-2022, nilai gini rasio Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, nilai gini rasio adalah sebesar 0,23, kemudian nilai gini rasio naik menjadi 0,28 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,25 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 0,232, dan naik kembali menjadi 0,263 pada tahun 2022. Selama periode 2018-2022, dapat disimpulkan bahwa nilai rasio gini di Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori rendah yang menggambarkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Tanah Laut tingkat ketidakmerataannya rendah. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut menjadi Kabupaten terendah ketiga wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang distribusi pendapatannya dengan ketidakmerataan yang rendah pada tahun 2022. Wilayah dengan nilai rasio gini tertinggi adalah Kota Banjarbaru sebesar 0,341, kemudian Kabupaten Tabalong yaitu sebesar 0,337, disusul Kabupaten Kotabaru sebesar 0,331.

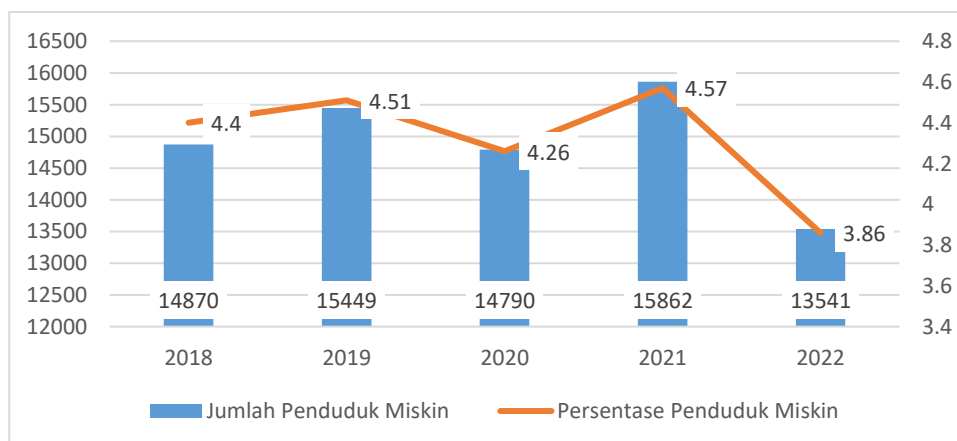


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.8 Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2022

2.1.2.1.6 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

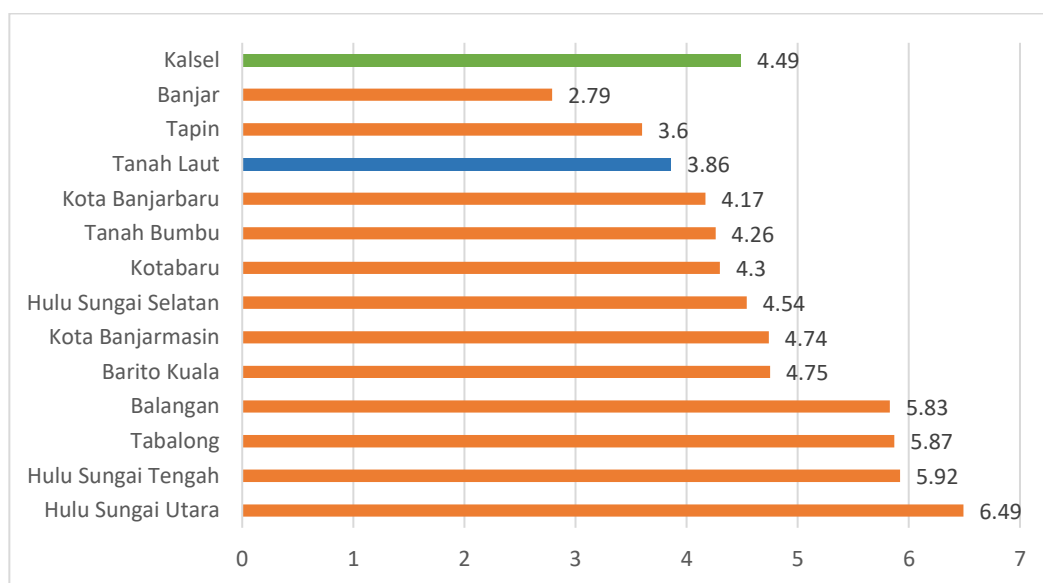
Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut, namun telah menjadi permasalahan dunia. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin jika rata-rata pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Pada periode 2018-2022, perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut cukup fluktuatif.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Pada tahun 2018 ke tahun 2019, terjadi kenaikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut dari 4,4 persen menjadi 4,51 persen. Umumnya, dinamika jumlah penduduk miskin sejalan dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah yang dicerminkan dari persentase penduduk miskin. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Akan tetapi, pada tahun 2020 kondisi tersebut dapat teratasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan yang cukup signifikan pada persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020. Penanganan kemiskinan pada tahun 2020 memang menjadi perhatian besar bagi pemerintah mengingat kondisi pandemi yang tengah berlangsung. Namun pada tahun 2021, persentase kembali meningkat menjadi 4,57 persen. Seiring dengan meredanya pandemi Covid-19, aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 menurun kembali menjadi sebesar 3,86%.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.10 Persentase Angka Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan, 2022

Pada Gambar 2.12, menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berada pada urutan terendah ke 3 dari 13 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan. Persentase angka kemiskinan terendah dimiliki oleh Kabupaten Banjar, dan persentase tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang diukur dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap-P1*) dan Indeks Keparahannya (*Poverty Severity Index-P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2018-2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan nilai indeks kedalaman kemiskinan dari 0,71 menjadi 0,55, kemudian naik menjadi 0,58 pada tahun 2019 dan 2020. Dan Kembali naik pada tahun 2021 menjadi 0,68. Hal ini menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh pada garis kemiskinan. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2022 terjadi penurunan indeks dari 0,14 menjadi 0,061, yang menandakan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan untuk menurun dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.22 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,55	0,58	0,58	0,679	0,374
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,14	0,11	0,12	0,142	0,061

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam

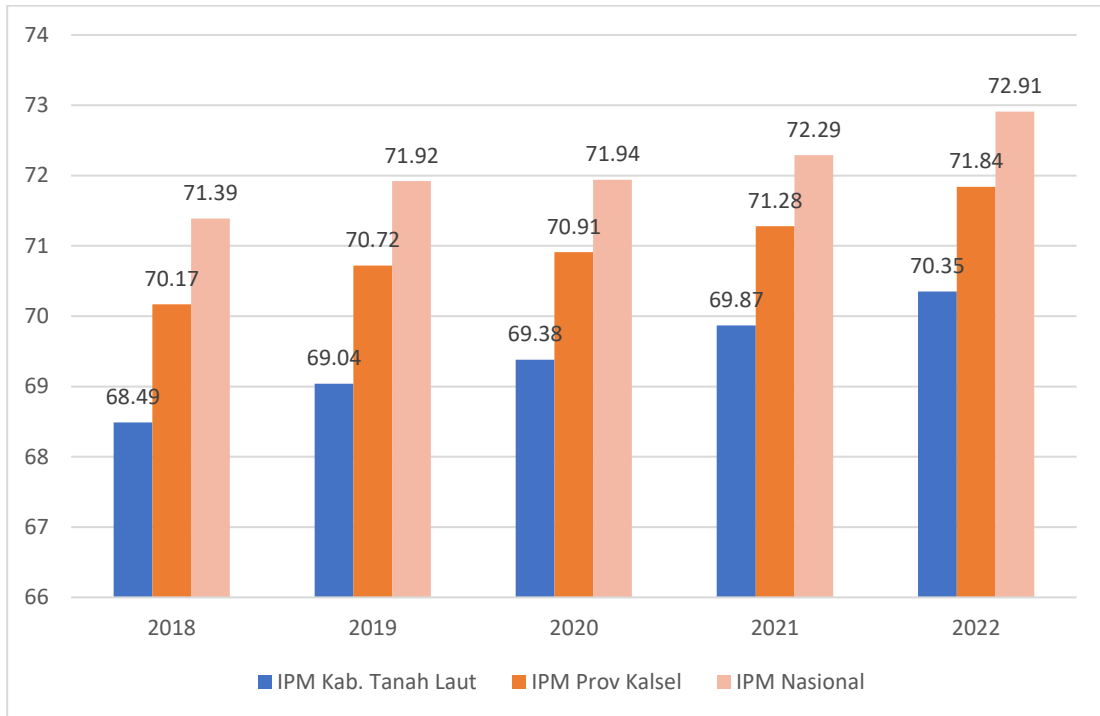
pemikiran paradigma pembangunan manusia. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusiasikan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Di sini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Secara praktikal, pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perhitungan IPM terdiri atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek perekonomian yang digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

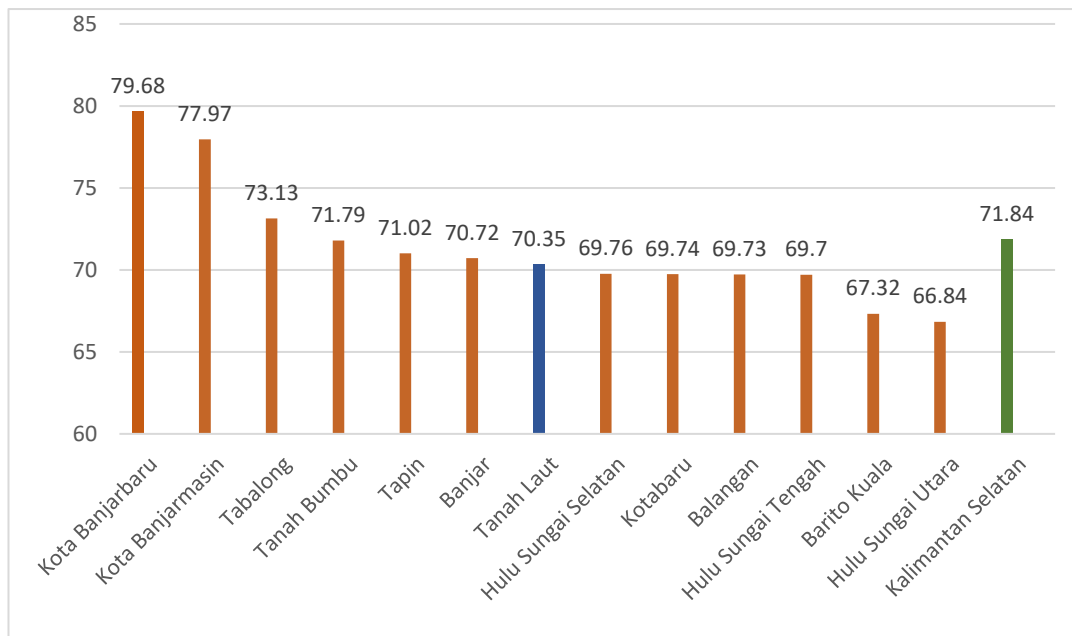
Sebagai Indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. IPM suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori menurut UNDP, yaitu (1) $IPM \geq 80$ termasuk kategori sangat tinggi; (2) $70 \leq IPM < 80$ termasuk kategori tinggi; (3) $60 \leq IPM < 70$ termasuk kategori sedang; dan (4) $IPM < 60$ termasuk kategori rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Gambar 2.11 Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Selama periode 2018-2022, perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Tanah Laut adalah 68,49, tahun 2019 sebesar 69,04, tahun 2020 sebesar 69,38 dan tahun 2021 meningkat kembali menjadi 69,87, dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 70,35. Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, IPM Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berada pada posisi 7 dari 13 kabupaten/kota yang ada. Dengan posisi yang berada di kategori tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus bekerja keras untuk meningkatkan nilai IPM tersebut melalui berbagai kebijakan pembangunan baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun sektor ekonomi lainnya agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal dalam pembangunan tersebut. Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri posisi pertama ditempati oleh Kota Banjar Baru dengan nilai sebesar 79,68, diikuti Kota Banjarmasin sebesar 77,97, dan Kabupaten Tabalong sebesar 73,13.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota, 2022

2.1.2.2.2 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah berkurangnya penduduk yang buta huruf. Angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Penduduk yang buta huruf diduga didominasi oleh kelompok tersulit dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan.

Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun keatas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

Tabel 2.23 Angka Melek Huruf Usia 15+ di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2023

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Angka Melek Huruf Usia 15+	98,74%	98,29%	97,87%

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Pada tahun 2022, angka melek huruf di Kabupaten Tanah Laut untuk penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 97,87%, menurun dari tahun 2021 yaitu sebesar 98,29% dan 2020 sebesar 98,74%. Penurunan yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dalam kemampuan literasi aksara atau membaca dan menulis yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Namun demikian pemerintah tetap akan terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah sesuai dengan target SDGs yaitu mencapai pemerataan kualitas pendidikan.

2.1.2.2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Pada penghitungan metode baru menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2018-2022, RLS Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahun walaupun tidak signifikan. RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 adalah sebesar 7,38 tahun, meningkat menjadi 7,64 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, RLS Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 7,88 tahun, naik menjadi 7,89 tahun pada tahun 2021 dan tahun 2022 meningkat menjadi 7,90 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Tanah Laut baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Angka RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan Nasional masing-masing sebesar 8,34 tahun dan 8,54 tahun. Angka RLS Kabupaten Tanah Laut lebih rendah jika dibandingkan angka RLS Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dalam rangka peningkatan rata-rata lama sekolah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus

terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan formal.

Tabel 2.24 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
RLS (tahun)	7,38	7,64	7,88	7,89	7,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

2.1.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Kemampuan bertahan seorang anak dalam dunia pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Semakin lama seorang anak mampu bertahan untuk terus bersekolah, maka sistem pendidikan yang terbangun di daerah tersebut akan semakin baik. Angka harapan lama sekolah diharapkan mampu memotret fenomena tersebut pada tiap wilayah. Sesuai dengan publikasi terbaru BPS, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.25 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
HLS (tahun)	11,95	11,96	12,01	12,31	12,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Angka HLS Kabupaten Tanah Laut selama periode 2018-2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018 Angka HLS sebesar 11,95 tahun. Angka HLS

tersebut mengalami peningkatan sepanjang 5 (lima) tahun sehingga menjadi 12,32 tahun pada tahun 2022. HLS sebesar 12,32 pada tahun 2022 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 12,32 tahun atau telah mencapai pendidikan di kelas 3 SMA. Angka HLS Kabupaten Tanah Laut lebih rendah jika dibandingkan HLS Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 yang mencapai 12,81 tahun dan Nasional sebesar 13,10 tahun. Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, angka HLS tertinggi ditempati Kota Banjarbaru yaitu sebesar 14,83 tahun. HLS di Kabupaten Tanah Laut masih berada jauh di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.

2.1.2.2.5 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Tanah Laut juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018 AHH adalah 69,08 tahun, naik pada tahun 2019 menjadi 69,31 tahun dan terus kembali naik menjadi 69,59 tahun pada tahun 2021, hingga pada tahun 2022 naik menjadi 69,89 tahun. AHH sebesar 69,89 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tanah Laut dapat menjalani hidup selama 69 tahun, lebih lebih tinggi dari AHH Provinsi sebesar 68,83 tahun. Dengan kisaran idealnya usia 25-85 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa umur panjang dan sehat penduduk Kabupaten Tanah Laut masih belum mencapai umur maksimal 85 tahun.

Tabel 2.26 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup (tahun)	69,08	69,31	69,45	69,59	69,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Tanah Laut memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang cukup besar dengan potensi budaya dan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Kebijakan pembangunan

seni dan kebudayaan diarahkan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat daerah, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya lokal. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala pengembangan seni budaya. Peran pemerintah di bidang kebudayaan adalah sebagai pelaksana pembangunan yang nantinya diharapkan menciptakan iklim yang nyaman agar pelaku usaha di bidang kebudayaan dapat berkembang secara efektif dan efisien. Terkait dengan sektor pariwisata secara khusus, sektor tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena memiliki *multiplier effect* yang tinggi. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk menarik minat pengunjung. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Di bidang kepemudaan dan olah raga, pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas dan pembinaan terhadap pemuda dan cabang olah raga, mulai dari pembinaan pelatih dan fasilitasi kegiatan olah raga hingga pengembangan kapasitas SDM pemuda. Keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala bagi pengembangan seni budaya dan olah raga, misalnya belum ada gedung gedung kesenian dan olah raga yang representatif. Jadi, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, fasilitas serta sarana prasarana di bidang kepemudaan dan olah raga menjadi sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan di masa mendatang.

Pada tahun 2018-2023, Kabupaten Tanah Laut berhasil mencetak atlet-atlet berprestasi yang tergambar dengan medali-medali yang diraih diberbagai macam cabang olahraga dan kejuaraan olahraga yang diikuti baik tingkat Provinsi maupun Nasional. Hal ini merupakan hasil positif dari keseriusan dalam membentuk atlet-atlet di Kabupaten Tanah Laut agar berprestasi di cabang-cabang olahraga yang ada. Pada tahun 2020, dimana terjadi pandemi Covid-19 berimbas pada pegelaran kejuaraan olahraga, sehingga tidak banyak kejuaraan yang dapat diikuti oleh atlet Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.27 Jumlah Atlet dan Jumlah Medali yang diraih oleh atlet Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022.

No	Nama Kejuaraan Olahraga yang Diikuti	Jumlah Atlet				Jumlah Medali			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Pekan Olahraga Pelajar (POPDA)	90	122	144	115	54	20	83	21
2	Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)	20	-	-	-	19	-	-	-
3	Pekan Paralimpik Provinsi (PEPARPROV)	-	-	-	52	-	-	-	71
4	Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)	-	-	-	415	-	-	-	193
5	Porda Soina Kalimantan Selatan	34	-	53	-	29	-	20	-
6	Kompetisi Pelajar Daerah (KOPDA)	12	-	-	-	9	-	-	-
7	Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA)	-	-	-	2	-	-	-	2
8	Pra Pekan Olahraga Nasional (Pra PON)	13	-	-	-	4	-	-	-
9	Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	-	2	-	-	-	2	-
10	Pekan Special Olympic Nasional (PESONAS)	-	-	-	30	-	-	-	12
11	Pekan Paralimpik Nasional (PAPERNAS)	-	-	3	-	-	-	-	-
12	Kejuaraan Daerah (KEJURDA)	15	-	-	-	3	-	-	-
13	Kejuaraan Provinsi Karate Paman Birin I	10	-	-	-	6	-	-	-
14	Open Tournament	14	-	-	-	4	-	-	-
15	Liga Birdge Nasional (LBSN) Kejuaraan Nasional Pelajar dan Mahasiswa	16	-	-	-	10	-	-	-

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Tabel 2.28 Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut, 2022

No	Cagar Budaya
1	Makam Keramat Habib Alwi Bin Idrus Bahasyim
2	Makam Keramat Ahmad Syamhudi
3	Makam Keramat Datu Bungur
4	Makam Keramat Datu Timang
5	Makam Keramat Datu Insad
6	Makam Keramat Kai Tuan Datu Ismail
7	Makam Keramat Syekh Abdul Gani Bin Abdurahman
8	Makam Keramat Datu Pamulitan
9	Mercusuar Peninggalan Kolonial Belanda

10	Benteng Tabanio
11	Makam Keramat KH Abdussamad Khairi
12	Makam Keramat Datu Panjang
13	Makam Keramat Lok Batu Datu Ahmad
14	Makam Keramat Datu Nafis
15	Bunker Peninggalan Kolonial Jepang
16	Makam Keramat Istana Pangeran Datu Ahmad

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.29 Kesenian yang diadakan di Kabupaten Tanah Laut menurut Kecamatan, 2022

Kecamatan	Jumlah Kesenian
Bajuin	21
Kurau	11
Bumi Makmur	35
Jorong	29
Batu Ampar	79
Bati-Bati	62
Takisung	141
Panyipatan	57
Kintap	51
Tambang Ulang	51
TOTAL	537

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang lebih baik dan merata. Pembangunan sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa/daerah banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Makin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan,

tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD sebesar 100% dan APS SMP sebesar 100% atau dengan kata lain semua anak usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah. Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan.

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Kelompok Usia	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI [7-12]	99,84	99,76	99,41	99,54	98,71
SMP/MTs [13-15]	90,79	92,06	91,51	91,76	91,8
SMA/MA/SMK [16-18]	68,32	67,46	67,02	67,46	67,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi dari anak sekolah pada usia di jenjang pendidikan tertentu yang termasuk dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Selama periode 2018-2022, APS untuk kelompok umur 7-12 tahun (usia SD) dapat dikatakan cenderung fluktuatif walaupun secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 berada pada 99,83%. Menurun pada tahun 2019, APS kelompok umur 7-12 menjadi sebesar 99,76%, begitu juga pada tahun 2020 menurun menjadi 99,41%. Namun meningkat menjadi 99,54% pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022, menurun menjadi 98,71%.

Hal yang sama juga ditemui pada APS kelompok umur 13-15 tahun (usia SMP) yang nilainya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, APS kelompok umur 13-15 tahun adalah sebesar 90,79%. Pada tahun 2019, APS kelompok umur 13-15 tahun mengalami kenaikan

hingga menjadi sebesar 92,06%. Kemudian menurun menjadi 91,51% pada tahun 2020, namun naik Kembali pada tahun 2021 menjadi 91,76%, dan menurun Kembali menjadi 91,8% pada tahun 2022. Capaian APS Kabupaten Tanah Laut masih belum memenuhi target wajar 9 tahun, sehingga ke depannya program pendidikan ini harus lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misalnya, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

APK untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2020 adalah sebesar 106,86% dan menurun di 2021 menjadi sebesar 106,04%. Hal tersebut berarti terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah SD dimana terlihat dari angka APK SD yang nilainya lebih besar dari 100%, namun pada 2021 persentasenya menurun. Artinya sudah ada penurunan penduduk di luar usia sekolah SD yang masih bersekolah di SD. Untuk jenjang pendidikan SMP, APK pada tahun 2021 adalah sebesar 85,73%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMP berapapun usianya di antara penduduk berumur 13-15 tahun hanya sebesar 85,73%. APK untuk jenjang pendidikan SMA adalah sebesar 87,56% yang artinya persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMA berapapun usianya di antara penduduk berumur 16-18 tahun sebesar 87,56%.

Tabel 2.31 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Murni (%)					
SD/MI (%)	99,84	99,51	99,41	99,54	98,71
SMP/MTS (%)	72,60	73,83	73,76	74,02	74,35
SMA/MA/SMK (%)	54,89	55,52	55,44	55,71	56,15
Angka Partisipasi Kasar (%)					
SD/MI (%)	107,5	108,69	106,86	106,04	105,49
SMP/MTS (%)	88,4	83,02	84,57	85,73	85,34
SMA/MA/SMK (%)	79,8	86,21	85,18	87,56	84,89

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2023

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan caramembagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedangbersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misalnya APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APM jenjang pendidikan SD di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 adalah sebesar 99,54%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang berusia 7-12 tahun, terdapat sekitar 99 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SD. APM jenjang pendidikan SMP pada tahun 2020 adalah sebesar 74,02% dimana hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang yangberusia 13-15 tahun, terdapat sekitar 74 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMA pada tahun 2021 adalah sebesar 55,71%, yang berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia 16-18 tahun, terdapat sekitar 55 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA.

Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi manajemen pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan.

Tabel 2.32 Rasio Guru dan Murid TK, SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah guru TK	1523	1467	1359	1312	1306
Jumlah murid TK	13559	13151	12371	11360	12012
Rasio guru terhadap murid TK	11,23	11,16	10,99	11,55	10,87
Jumlah guru SD/MI/ sederajat	2327	2825	2825	2778	2977
Jumlah murid SD/MI/ sederajat	36113	37650	38514	38254	38061
Rasio guru terhadap murid SD/MI/ sederajat	6,44	7,50	7,33	7,26	7,82
Jumlah guru SMP/MTs/ sederajat	750	1149	1149	1453	1679
Jumlah murid SMP/MTs/ Sederajat	9455	13819	13339	12763	14206
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs/ sederajat	7,93	8,31	8,61	11,38	11,82

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2023

Pada tabel di atas, rasio guru terhadap murid, baik pada jenjang TK, SD/MI maupun SMP/MTs sangat dipengaruhi oleh pemenuhan SDM yaitu guru pada satuan pendidikan serta pertumbuhan penduduk pada daerah tersebut. Di Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 2022 capaian rasio guru terhadap murid pada jenjang TK mencapai 10,87, pada jenjang SD/MI mencapai 7,82 dan pada jenjang SMP/MTs sebesar 11,82. Angka ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar yaitu setiap rombongan belajar/kelas terdapat 11 siswa untuk setiap 1 orang guru di tingkat TK, 8 orang siswa untuk setiap satu orang guru pada tingkat SD/MI, dan 12 orang siswa setiap 1 orang guru pada tingkat SMP/MTs.

Terkait dengan fasilitas pendidikan, ketersediaan ruang kelas sebagai sarana penyampaian pembelajaran menjadi tidak kalah penting dibanding tenaga pendidik. Di

Kabupaten Tanah Laut, ketersediaan ruang kelas dari tahun 2018-2022 untuk tingkat pendidikan TK, SD/MI, dan SMP/MTs tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.33 Jumlah Ruang Kelas di Kabupaten Tanah Laut menurut Tingkat Pendidikan, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
TK	1051	686	611	656	786
SD/MI/Sederajat	1680	1845	1845	1700	1917
SMP/MI/Sederajat	374	1149	528	543	550

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.34 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, MI, SMP/Mts)	100 %	100 %
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100 %	100 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	100 %	100 %

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2023

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal antara lain:

1. Sulitnya Melacak Peserta didik yang menempuh Pendidikan di pondok pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan program wajib belajar, sehingga peserta didik tersebut tidak terdata di dalam dapodik.
2. Sebagian besar orang tua memilih untuk menyekolahkan anak mereka ke pondok pesantren karna pada masa pandemik Sebagian besar pondok pesantren melakukan kegiatan belajar mengajar secara (luring) tatap muka
3. Masih belum sempurnanya aplikasi Standar Pelayanan Minimal yang dibuat oleh kementerian pendidikan terkait verifikasi data ATS, yang Ketika kita verifikasi jumlah dari Anak Tidak Sekolah (ATS) mulai berkurang secara signifikan.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai. Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik. Kesehatan merupakan bentuk investasi pada kualitas sumberdaya manusia. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik maka diharapkan kualitas manusia juga semakin baik, yakni masyarakat dapat semakin produktif. Berikut merupakan beberapa indikator yang menunjukkan kondisi kesehatan di Kabupaten Tanah Laut.

Fasilitas Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk menyetatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah terutama lapisan masyarakat yang paling bawah dan terpencil. Bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakatpun tidak henti-hentinya dilaksanakan. Salah satu cara adalah dengan mengaktifkan kembali fungsi posyandu. Tidak ketinggalan juga dengan menambah tenaga medis dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Sebagai contoh langkah yang ditempuh adalah memperbanyak penerimaan pegawai khususnya tenaga kesehatan. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai, derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel 2.35 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Sakit	1	1	4	4	4

Rumah Bersalin	3	3	0	0	0
Puskesmas	19	19	19	21	21
Apotek	10	11	13	15	15
Poliklinik	11	16	10	9	9
Pustu	59	54	55	55	55

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Keberadaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dapat dikatakan telah memadai. Seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kabupaten Tanah Laut dari rumah sakit sampai dengan Pustu. Sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Pelaihari memiliki fasilitas kesehatan yang paling lengkap yaitu 3 unit rumah sakit, 3 unit Puskesmas, 5 unit Apotek, 2 unit Poliklinik, dan 9 unit Pustu. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 tersebar merata di seluruh kecamatan dengan jumlah keseluruhan Puskesmas sebanyak 19 unit. Pada awal tahun 2023, kembali dioperasikan 1 unit Puskesmas di Kecamatan Pelaihari, sehingga jumlah Puskesmas pada awal tahun 2023 menjadi 22 unit.

Tenaga Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, tersedianya tenaga kesehatan juga berperan dalam peningkatan kualitas kesehatan di suatu wilayah. Tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2022 terbagi ke dalam 5 kelompok yaitu Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, dan Tenaga Kefarmasian.

Tabel 2.36 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Dokter Umum	54	70	66	85	90
Dokter Gigi	14	11	25	28	29
Perawat	412	535	480	639	664
Bidan	320	415	398	459	484
Tenaga Kefarmasian	52	75	48	120	140

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Imunisasi Balita

Imunisasi balita merupakan pemberian imunisasi kepada balita yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh balita dari berbagai penyakit. Hal ini dilakukan juga sebagai



salah satu upaya peningkatan kualitas kesehatan. Beberapa jenis imunisasi bagi balita antara lain imunisasi BCG, Campak, DPT, Polio, dan Hepatitis B. Pada tahun 2018, persentase balita yang telah mendapat imunisasi terbesar pada jenis imunisasi di Kabupaten Tanah Laut yaitu 95,86% balita telah mendapat imunisasi Polio 1-Polio 4, dan cakupan imunisasi pada balita paling sedikit yaitu 76,925 dengan jenis imunisasi campak. Secara keseluruhan pada tahun 2022, Hepatitis B merupakan imunisasi yang paling banyak didapat oleh balita dan imunisasi Polio 4 merupakan imunisasi yang paling sedikit didapat oleh balita di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2022, persentase balita yang mendapatkan imunisasi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dimana dari 10 jenis imunisasi yang diberikan, seluruh jenis imunisasi sudah mencapai angka persentase di atas 80%.

Tabel 2.37 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Jenis Imunisasi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
BCG	95,23	88,3	87,5	89,5	88,03
Campak	76,92	90,5	78,3	93	88,12
DPT 1	93,18	90,6	88,1	89,1	88,62
DPT 2	93,18	90,3	85,4	86,5	85,55
DPT 3	93,18	87,0	82,1	83,5	83,63
Polio 1	95,86	91,5	83,8	92,6	87,66
Polio 2	95,86	90,3	88,2	87,8	88,85
Polio 3	95,86	89,9	85,0	85,1	85,38
Polio 4	95,86	88,6	82,3	96,9	83,55
Hepatitis B	93,55	89,3	91,2	87,4	92,47

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Jumlah Kasus Penyakit

Kualitas kesehatan dapat dilihat pula melalui kasus penyakit yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Hal ini merupakan indikator eksternal selain indikator internal seperti fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Berikut tersaji jumlah kasus penyakit di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022:

Tabel 2.38 Jumlah Kasus Penyakit di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Jenis Penyakit (kasus)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Hipertensi Primer	30.098	26.227	15.648	13.434	11.878
Dyspepsia	14.524	13.382	9.125	6.770	6.809
Kencing Manis (DM)	-	7.848	4.885	5.053	4.820
Infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas	13.946	17.902	8.271	3.295	3.468
Cepalgia	7.615	3.611	4.520	3.022	2.312
Hipertensi Sekunder	-	-	3.701	2.879	-
Gastritis	6.868	-	-	3.260	-
Myalgia	3.969	4.462	4809	3.781	3.431
Nasopharingitis akuta (common cold)	4.474	-	4.363	2.585	3.944
HIV/AIDS	-	29	21	123	130
DBD	-	267	496	36	69

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Bayi Gizi Buruk

Jumlah kelahiran bayi di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2018-2022 berada di kisaran 6.000an bayi lahir. Pada tahun 2021 jumlah bayi lahir adalah sebanyak 6.367 bayi dengan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 452 bayi dan bayi gizi buruk sebanyak 1 bayi.

Tabel 2.39 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bayi Gizi Buruk di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bayi Lahir	6.400	6.491	6.510	6.367	5.936
BBLR	432	409	376	452	388
BBLR Dirujuk	133	125	-	-	-
Gizi Buruk	2	1	2	1	-

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Kunjungan Ibu Hamil



Jumlah ibu hamil di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan peningkatan dari sebanyak 6.608 ibu hamil menjadi sebanyak 7.490. Pada tahun 2020, dari 7.490 ibu hamil, yang melakukan kunjungan K1 adalah sebanyak 7.154 ibu hamil dan yang melakukan kunjungan K4 sebanyak 6.012 ibu hamil. Ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis (KEK) sebanyak 1.033 ibu hamil dan yang mendapatkan zat besi sebanyak 6.307 ibu hamil.

Tabel 2.40 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Jenis Imunisasi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ibu Hamil	7.728	7.489	7.490	6.616	6.608
Kunjungan K1	7.080	7.231	7.154	6.616	6.358
Kunjungan K4	6.065	5.922	6.012	5.817	5.559
Kurang Energi Kronis (KEK)	1.175	1.071	1.033	889	925
Mendapat Zat Besi (Fe)	5.612	6.889	6.307	5.976	5.546

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Kematian Ibu dan Bayi

Tabel 2.41 Jumlah AKI dan AKB di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	122,8	267	50
2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	9,5	11,3	10

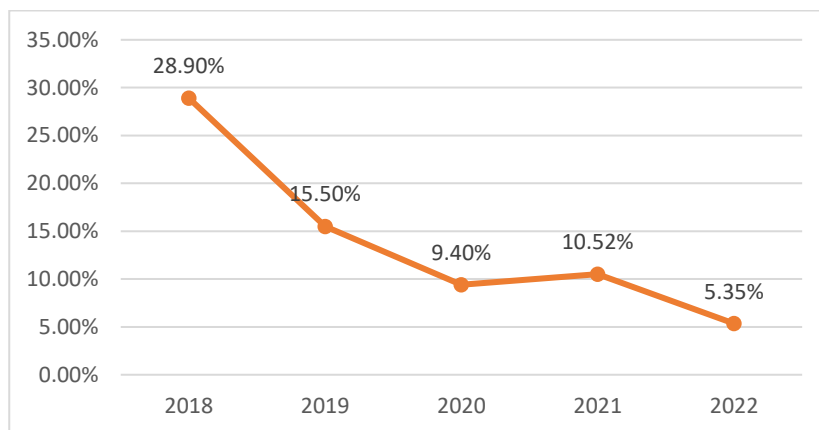
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Dari data tabel di atas dapat digambarkan AKI mengalami penurunan di tahun 2022 Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 50 per 1000 kelahiran dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 10 per 1000 kelahiran..

Prevalensi Stunting

Stunting adalah kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) dengan Z-score < -2 SD (pendek dan sangat pendek) dan target nasional balita stunting sampai tahun 2024 sebesar 14%. Stunting merupakan masalah gizi yang bersifat kronis yang disebabkan oleh banyak faktor baik dari masalah kesehatan maupun di luar kesehatan dan berlangsung lama. Stunting berdampak pada gangguan kognitif dan resiko menderita penyakit degeneratif pada usia dewasa.

Prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2018 – 2022 menunjukkan penurunan yang signifikan yaitu dari 29,90% persen pada Tahun 2018 menjadi 5,35% persen pada Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Gambar 2.13 Prevalensi Stunting Kabupaten Tanah Laut (EPPGBM), 2018-2022

Untuk mendorong konvergensi percepatan pencegahan stunting di Kabupaten/Kota, Bappenas RI bersama Kementerian Dalam Negeri telah Menyusun panduan 8 Aksi Integrasi, dengan pendampingan kepada Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Gambar 2. 14 8 (Delapan) Aksi Konvergensi di Tingkat Kabupaten/Kota

Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Terdapat poin intervensi gizi spesifik, antara lain:

1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dilakukan kepada ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronik (KEK)
2. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja, wanita usia subur (WUS) dan ibu hamil
3. Pemberian ASI eksklusif sejak bayi lahir sampai usia 6 bulan, pemberian MP-ASI mulai usia 6 bulan, lanjutan pemberian ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih
4. Kegiatan pemantauan pertumbuhan dilakukan sejak anak berusia 0-72 bulan dengan penimbangan berat badan setiap bulan dan pengukuran tinggi badan setiap 3 bulan sekali
5. Suplementasi mikronutrien terdiri dari suplementasi kalsium untuk ibu hamil serta suplementasi kapsul vitamin A, Vitamin A diberikan di Posyandu setiap bulan Februari dan Agustus.
6. Pemeriksaan kehamilan (Antenatal care) dilakukan selama minimal 4 kali selama masa kehamilan

Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan. Intervensi sensitif terbagi menjadi 4 Jenis yaitu penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan bergizi.

Capaian SPM Bidang Kesehatan

Tabel 2.42 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	243	179	73,7 %
		Batakan	100%	249	196	78,7 %
2	Jorong	Jorong	100%	270	235	87,0 %
		Asam -Asam	100%	386	407	105,4 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	234	172	73,5 %
		Durian Bungkok	100%	305	236	77,4 %
4	Kintap	Kintap	100%	523	525	100,4 %
		Sei Cuka	100%	308	239	77,6 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	862	710	82,4 %
		Sei Riam	100%	132	103	78,0 %
		Angsau	100%	525	389	74,1 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	135	99	73,3 %
		Tirta Jaya	100%	242	203	83,9 %
7	Takisung	Takisung	100%	641	440	68,6 %
8	Bati – Bati	Bati – Bati	100%	357	302	84,6 %
		Kait - Kait	100%	161	122	75,8 %
		Bentok Kampung	100%	355	286	80,6 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	352	314	89,2 %
10	Kurau	Kurau	100%	76	56	73,7 %
		Padang Luas	100%	196	143	73,0 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	269	203	75,5 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	6.821	5559	81,5 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.43 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang

Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	232	181	78,0 %
		Batakan	100%	238	217	91,2 %
2	Jorong	Jorong	100%	258	286	110,9 %
		Asam -Asam	100%	368	398	108,2 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	223	188	84,3 %
		Durian Bungkuk	100%	291	273	93,8 %
4	Kintap	Kintap	100%	500	357	71,4 %
		Sei Cuka	100%	294	257	87,4 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	823	743	90,3 %
		Sei Riam	100%	126	111	88,1 %
		Angsau	100%	501	396	79,0 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	129	120	93,0 %
		Tirta Jaya	100%	231	215	93,1 %
7	Takisung	Takisung	100%	612	503	82,2 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	340	304	89,4 %
		Kait - Kait	100%	154	143	92,9 %
		Bentok Kampung	100%	339	349	102,9 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	336	293	87,2 %
10	Kurau	Kurau	100%	73	65	89,0 %
		Padang Luas	100%	187	148	79,1 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	256	242	94,5 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	6.511	5939	91,2 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.44 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang

Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	221	178	80,5 %
		Batakan	100%	227	220	96,9 %
2	Jorong	Jorong	100%	245	278	113,5 %
		Asam -Asam	100%	347	389	112,1 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	213	187	87,8 %
		Durian Bungkuk	100%	282	280	99,3 %
4	Kintap	Kintap	100%	476	503	105,7 %
		Sei Cuka	100%	280	260	92,9 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	784	740	94,4 %
		Sei Riam	100%	120	97	80,8 %
		Angsau	100%	477	390	81,8 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	123	124	100,8 %
		Tirta Jaya	100%	219	214	97,7 %
7	Takisung	Takisung	100%	584	512	87,7 %
8	Bati – Bati	Bati – Bati	100%	324	301	92,9 %
		Kait – Kait	100%	146	148	101,4 %
		Bentok Kampung	100%	323	342	105,9 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	319	327	102,5 %
10	Kurau	Kurau	100%	69	50	72,5 %
		Padang Luas	100%	178	144	80,9 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	244	243	99,6 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	6.201	5927	95,6 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

**Tabel 2.45 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang
Kesehatan Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2022**

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Balita		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	1111	365	32,9 %
		Batakan	100%	1138	1119	98,3 %
2	Jorong	Jorong	100%	1234	1137	92,1 %
		Asam -Asam	100%	1760	1563	88,8 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	1067	889	83,3 %
		Durian Bungkok	100%	1391	1172	84,3 %
4	Kintap	Kintap	100%	2390	2656	111,1 %
		Sei Cuka	100%	1406	1424	101,3 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	3940	3374	85,6 %
		Sei Riam	100%	603	496	82,3 %
		Angsau	100%	2399	1919	80,0 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	617	554	89,8 %
		Tirta Jaya	100%	1105	874	79,1 %
7	Takisung	Takisung	100%	2930	2502	85,4 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	1630	1456	89,3 %
		Kait - Kait	100%	734	514	70,0 %
		Bentok Kampung	100%	1622	1347	83,0 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	1607	1264	78,7 %
10	Kurau	Kurau	100%	347	163	47,0 %
		Padang Luas	100%	896	726	81,0 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	1228	867	70,6 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	31155	26381	84,7 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.46 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	2.184	1996	91,4%
		Batakan	100%	1.559	1528	98,0%
2	Jorong	Jorong	100%	502	502	100%
		Asam -Asam	100%	4.350	4119	94,7%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	2.059	2059	100%
		Durian Bungkok	100%	2.259	2259	100%
4	Kintap	Kintap	100%	4.392	4392	100%
		Sei Cuka	100%	2.243	2243	100%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	8.891	8891	100%
		Sei Riam	100%	778	778	100%
		Angsau	100%	4.145	4145	100%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	718	719	100,1%
		Tirta Jaya	100%	1.344	1344	100%
7	Takisung	Takisung	100%	4.362	4362	100%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	3.044	3044	100%
		Kait - Kait	100%	1.254	1254	100%
		Bentok Kampung	100%	3.210	3210	100%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	1.041	1041	100%
10	Kurau	Kurau	100%	347	347	100%
		Padang Luas	100%	1.455	1455	100%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	1.850	1850	100%
		Spm Bidang Kesehatan	100%	51987	51538	99,1%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.47 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	7.779	6207	79,8 %
		Batakan	100%	7.965	4012	50,4 %
2	Jorong	Jorong	100%	8.638	3735	43,2 %
		Asam -Asam	100%	12.322	4188	34,0 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	7.477	6440	86,1 %
		Durian Bungkok	100%	9.745	1423	14,6 %
4	Kintap	Kintap	100%	16.740	7371	44,0 %
		Sei Cuka	100%	9.846	3378	34,3 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	27.588	14140	51,3 %
		Sei Riam	100%	4.225	1168	27,6 %
		Angsau	100%	16.793	5264	31,3 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	4.321	2452	56,7 %
		Tirta Jaya	100%	7.740	5488	70,9 %
7	Takisung	Takisung	100%	20.522	20522	100,0 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	11.410	7979	69,9 %
		Kait - Kait	100%	11.362	4909	43,2 %
		Bentok Kampung	100%	5.084	1629	32,0 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	11.260	7348	65,3 %
10	Kurau	Kurau	100%	2.431	2612	107,4 %
		Padang Luas	100%	6.273	3425	54,6 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	8.595	6307	73,4 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	218.115	119997	55,0 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

**Tabel 2.48 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan
Kesehatan Pada Usia Lanjut Tahun 2022**

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	1.349	836	62,0 %
		Batakan	100%	1.380	780	56,5 %
2	Jorong	Jorong	100%	1.498	742	49,5 %
		Asam -Asam	100%	2.137	453	21,2 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	1.297	907	69,9 %
		Durian Bungkok	100%	1.690	979	57,9 %
4	Kintap	Kintap	100%	2.903	1706	58,8 %
		Sei Cuka	100%	1.708	1548	90,6 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	4.784	2005	41,9 %
		Sei Riam	100%	732	337	46,0 %
		Angsau	100%	2.912	1998	68,6 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	749	553	73,8 %
		Tirta Jaya	100%	1.342	1312	97,8 %
7	Takisung	Takisung	100%	3.558	1206	33,9 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	1.978	1195	60,4 %
		Kait - Kait	100%	893	510	57,1 %
		Bentok Kampung	100%	1.970	278	14,1 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	1.953	1414	72,4 %
10	Kurau	Kurau	100%	422	354	83,9 %
		Padang Luas	100%	1.087	841	77,4 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	1.490	1168	78,4 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	37.832	21122	55,8 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.49 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	807	758	94,0 %
		Batakan	100%	826	592	71,7 %
2	Jorong	Jorong	100%	896	363	40,5 %
		Asam -Asam	100%	1.278	876	68,6 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	775	632	81,5 %
		Durian Bungkok	100%	1.011	642	63,5 %
4	Kintap	Kintap	100%	1.736	1709	98,4 %
		Sei Cuka	100%	1.021	706	69,1 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	2.861	1824	63,8 %
		Sei Riam	100%	438	342	78,1 %
		Angsau	100%	1.741	988	56,7 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	448	285	63,6 %
		Tirta Jaya	100%	803	725	90,3 %
7	Takisung	Takisung	100%	2.128	1659	78,0 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	1.183	144	12,2 %
		Kait - Kait	100%	1.178	282	23,9 %
		Bentok Kampung	100%	527	220	41,7 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	1.168	715	61,2 %
10	Kurau	Kurau	100%	252	364	144,4 %
		Padang Luas	100%	650	812	124,8 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	891	626	70,2 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	22.619	15264	67,5 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

**Tabel 2.50 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun 2022**

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	144	111	77,3 %
		Batakan	100%	147	118	80,2 %
2	Jorong	Jorong	100%	160	189	118,5 %
		Asam -Asam	100%	228	103	45,3 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	138	127	92,0 %
		Durian Bungkok	100%	180	180	100,0 %
4	Kintap	Kintap	100%	309	334	108,1 %
		Sei Cuka	100%	182	557	306,4 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	509	483	94,8 %
		Sei Riam	100%	78	140	179,5 %
		Angsau	100%	310	359	115,8 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	80	77	96,5 %
		Tirta Jaya	100%	143	69	48,3 %
7	Takisung	Takisung	100%	379	392	103,4 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	211	103	48,9 %
		Kait - Kait	100%	210	45	21,4 %
		Bentok Kampung	100%	94	133	141,7 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	208	131	63,0 %
10	Kurau	Kurau	100%	45	289	643,8 %
		Padang Luas	100%	116	234	202,0 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	159	237	149,3 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	4.027	4411	109,5 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

**Tabel 2.51 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pencapaian
SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Tahun 2022**

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	18	25	142,5 %
		Batakan	100%	18	28	155,9 %
2	Jorong	Jorong	100%	19	23	118,0 %
		Asam -Asam	100%	28	18	64,8 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	17	19	112,7 %
		Durian Bungkok	100%	22	12	54,6 %
4	Kintap	Kintap	100%	38	9	23,8 %
		Sei Cuka	100%	22	12	54,0 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	62	63	101,2 %
		Sei Riam	100%	10	11	115,4 %
		Angsau	100%	38	27	71,3 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	10	10	102,6 %
		Tirta Jaya	100%	17	19	108,8 %
7	Takisung	Takisung	100%	46	47	101,5 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	26	26	101,0 %
		Kait - Kait	100%	26	8	31,2 %
		Bentok Kampung	100%	11	16	139,5 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	25	8	31,5 %
10	Kurau	Kurau	100%	5	5	91,2 %
		Padang Luas	100%	14	18	127,2 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	19	33	170,2 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	492	437	88,8 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

**Tabel 2.52 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2022**

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	203	38	18,7 %
		Batakan	100%	208	95	45,7 %
2	Jorong	Jorong	100%	226	52	23,0 %
		Asam -Asam	100%	322	142	44,1 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	195	68	34,9 %
		Durian Bungkok	100%	255	39	15,3 %
4	Kintap	Kintap	100%	437	152	34,8 %
		Sei Cuka	100%	257	73	28,4 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	721	347	48,1 %
		Sei Riam	100%	110	63	57,3 %
		Angsau	100%	439	206	46,9 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	113	5	4,4 %
		Tirta Jaya	100%	202	90	44,6 %
7	Takisung	Takisung	100%	536	160	29,9 %
8	Bati – Bati	Bati – Bati	100%	298	120	40,3 %
		Kait – Kait	100%	135	61	45,2 %
		Bentok Kampung	100%	297	215	72,4 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	294	100	34,0 %
10	Kurau	Kurau	100%	64	15	23,4 %
		Padang Luas	100%	164	94	57,3 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	225	70	31,1 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	5.701	2205	38,7 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

**Tabel 2.53 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan
Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun 2022**

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	281	96	34,2 %
		Batakan	100%	288	28	9,7 %
2	Jorong	Jorong	100%	347	99	28,5 %
		Asam -Asam	100%	448	405	90,4 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	280	148	52,9 %
		Durian Bungkok	100%	354	111	31,4 %
4	Kintap	Kintap	100%	611	214	35,0 %
		Sei Cuka	100%	363	107	29,5 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	889	408	45,9 %
		Sei Riam	100%	152	97	63,8 %
		Angsau	100%	793	528	66,6 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	156	23	14,7 %
		Tirta Jaya	100%	279	125	44,8 %
7	Takisung	Takisung	100%	742	349	47,0 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	416	346	83,2 %
		Kait - Kait	100%	186	173	93,0 %
		Bentok Kampung	100%	409	176	43,0 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	406	86	21,2 %
10	Kurau	Kurau	100%	51	92	180,4 %
		Padang Luas	100%	206	115	55,8%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	316	248	78,5 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	7.973	3974	49,8 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang Kesehatan yaitu:

1. Pendataan sasaran SPM terlalu besar, semua siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, usia produktif, usia lanjut dan kematian.
2. Terbatasnya SDM di fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. Terbatasnya peralatan Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang menunjang pada kegiatan Pelayanan SPM.
4. Juknis pada pencapaian tiap indikator SPM terlalu banyak persyaratannya.
5. Ketidakjelasan kebutuhan biaya penganggaran alat Kesehatan, BMHP maupun sumber daya Kesehatan lainnya yang mendukung pencapaian SPM.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara umum, kondisi dari suatu daerah yang terkait dengan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat digambarkan melalui indikator kondisi jalan serta kondisi infrastruktur pendukung lainnya. Dengan kondisi jalan yang baik, berperan mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kondisi sosial budaya melalui kemudahan akses antarwilayah. Kondisi infrastruktur pendukung lainnya juga menjadi modal dalam meningkatkan kondisi perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi akan dicapai apabila didukung oleh kondisi jalan dan infrastruktur yang baik dan memadai.

Kondisi Jalan

Pembangunan jalan menjadi hal penting dalam upaya peningkatan akses antarwilayah. Dengan kondisi jalan yang baik, maka akan mendorong peningkatan perekonomian penduduk di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2018-2022, panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Tanah Laut terlihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.54 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Tahun	Jumlah Ruas Jalan	Panjang Ruas (km)	Kondisi Jalan			
			Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)
2018	380	1826,63	628.51	299.59	742.41	161.47
2019	380	1826,63	700.94	268.582	349.278	508.288

2020	380	1826,63	1003.92	84.94	84.52	653.308
2021	380	1826,63	565.14	615.16	75.35	570.99
2022	380	1826,63	818.643	523.507	99.899	384.584

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Laut, 2023

Kondisi permukaan jalan didominasi oleh jalan dengan kondisi baik dengan kondisi akhir pada tahun 2022 sepanjang 818,643 km. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 dengan panjang 565,14 km, begitu juga kondisi jalan dalam kondisi rusak berat berkurang menjadi 384,584 km pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sepanjang 570,99 km. Belum semua jalan berkondisi mantap, pada tahun 2022 capaian jalan dalam kondisi mantap mencapai 73,48%.

Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran salah satunya sebagai kebutuhan budidaya pertanian. Persentase irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berada pada angka 68,07%.

Tabel 2.55 Jaringan Irigasi Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Jaringan Irigasi/Perairan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Panjang Jaringan Irigasi Non Teknis (Km)					
	a. Saluran Kondisi Baik	0.522	0.522	0.522	0.522	16.326
	b. Saluran Kondisi Sedang	61.108	61.108	83.716	83.716	88.676
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	459.36	460.35	460.35	460.35	455.39
	d. Saluran Kondisi Rusak Berat	200.05	200.05	200.05	207.58	191.780
B	Panjang Jaringan Irigasi Non Teknis (Km)					
	1. Panjang Saluran Irigasi Primer					
	a. Saluran Kondisi Baik	0.522	0.522	0.522	0.522	16.326
	b. Saluran Kondisi Sedang	53.376	54.361	54.361	54.361	59.320
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	162.59	162.59	162.59	162.59	157.64
	d. Saluran Kondisi Rusakk Berat	47.983	47.983	47.983	55.513	39.709
	2. Panjang Saluran Irigasi Sekunder					
	a. Saluran Kondisi Baik	-	-	-	-	-

No	Jaringan Irigasi/Perairan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	b. Saluran Kondisi Sedang	28.502	28.502	28.502	28.502	28.502
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	209.14	209.14	222.74	222.74	222.74
	d. Saluran Kondisi Rusak Berat	60.419	60.419	69.419	69.419	69.419
3. Panjang Saluran Irigasi Tersier						
	a. Saluran Kondisi Baik	-	-	-	-	-
	b. Saluran Kondisi Sedang	0.854	0.854	0.854	0.854	0.854
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	75.01	75.01	75.012	75.009	75.012
	d. Saluran Kondisi Rusak Berat	82.652	82.652	82.65	82.652	82.651

Sumber: DPUPRP Kab. Tanah Laut, 2023

Sarana Air Minum

Kebutuhan air minum tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitas air minum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum dikatakan aman untuk kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Kualitas air minum dapat dilihat dari hasil uji laboratorium terkait kandungan air minum.

Tabel 2.56 Jumlah KK yang Terlayani Air Minum Layak dan Sanitasi Layak di Kabupaten Tanah Laut, 2022

Uraian	Jumlah KK	Jumlah KK Kabupaten
Air Minum Layak	62.255	86.569
Sanitasi Layak	63.585	86.569

Sumber: DPUPRP Kab. Tanah Laut, 2023

Sementara itu, pemenuhan kebutuhan air minum suatu rumah tangga dapat diukur dari akses ke air minum layak. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap akses air minum layak adalah jenis sumber air utama yang digunakan untuk minum, sumber air utama yang digunakan untuk memasak dan mandi/cuci, serta jarak sumber air ke penampungan limbah.

Pada tahun 2022, sebanyak 62.255 KK terlayani air minum layak dari 85.569 KK se Kabupaten Tanah Laut. Capaian persentase rumah tangga yang terlayani air minum layak dan sanitasi layak masing-masing sebesar 71,89% dan 73,45%. Untuk Sanitasi layak, sebanyak berdasarkan jenisnya, sumber air minum dapat dikelompokkan menjadi sumber air minum

bersih dan tidak bersih. Sumber air minum bersih terdiri dari air minum yang bersumber dari air minum kemasan, air ledeng, sumur bor atau pompa, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Khusus untuk air minum yang bersumber dari sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi kriteria jarak lebih dari atau sama dengan 10 meter dari penampungan akhir tinja terdekat.

Tabel 2.57 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum, 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (KK)	Realisasi (KK)	Capaian %
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	62.238	62.238	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	63.371	63.585	100,33%

Sumber: DPUPRP Kab. Tanah Laut, 2023

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal antara lain:

- a. Kondisi wilayah Kabupaten Tanah Laut yang luas dan pemukimannya tersebar dalam beberapa wilayah pelayanan pada 11 Kecamatan, sehingga mempengaruhi nilai investasi dengan layanan yang diberikan.
- b. Kurangnya sumber air baku yang tersedia pada Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung dan Kecamatan Panyipatan.
- c. Luasnya wilayah pelayanan IKK Pelaihari dan IKK Bajuin, sehingga membutuhkan nilai investasi yang besar, salah satunya kondisi infrastruktur produksi dan distribusi IKK Bajuin yang telah melewati umur ekonomis.
- d. Sedang dilakukannya review Perjanjian Kerja Sama / Nota Kesepakatan SPAM Regional Banjarbakula yang harus diperbaharui, dimana saat ini yang beroperasi hanya di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur sedangkan Kecamatan Takisung sedang dalam tahap usulan untuk cakupan layanan.
- e. Sedang dalam tahap serah terima asset IPLT Kabupaten Tanah Laut dengan BPPW



Kalimantan Selatan yang pendanaannya bersumber dari APBN.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi kriteria indikator sebagai berikut: 1) jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas (60 persen lebih) terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah, 2) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (60 persen lebih) terbuat dari bambu/kayu kualitas rendah. Jumlah rumah tidak layak huni pada Tahun 2022 sebanyak 3.575 unit, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.58 Rumah Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni, dan Total Rumah di Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2019-2022

No	Jenis Rumah	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Rumah Layak Huni	73,324	99,836	100,160	100,659
2	Rumah Tidak Layak Huni	5,237	4,398	4,074	3,575
3	Total Rumah	78,561	104,234	104,234	104,234

Sumber: Dinas PRKPLH Kab. Tanah Laut, 2023

Upaya penurunan jumlah rumah tidak layak huni telah ditempuh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui berbagai program dan skema. Program Bedah Rumah merupakan salah satu program yang dilaksanakan guna mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanah Laut. Penurunan jumlah RTLH cukup signifikan pada kurun waktu tahun 2019-2022, pada tahun 2019 berjumlah 5.237 unit dan pada tahun 2022 menurun menjadi 3.575 unit.

Tabel 2.59 Pengurangan Kawasan Kumuh di Perkotaan Kab. Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Luas Kumuh Awal (Ha)	160.38	130.89	123.49
Realisasi Pengurangan Luas Kumuh (Ha)	23.88	7.40	44.75

Sumber: Dinas PRKPLH Kab. Tanah Laut, 2023

Selain permasalahan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat, timbulnya kekumuhan terutama di kawasan perkotaan juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu

ditangani di bidang perumahan dan permukiman. Adapun rincian luas kawasan kumuh di perkotaan dan luasan pengurangan kumuh sampai dengan tahun 2022 sebagaimana dalam tabel di atas. Masih terdapatnya wilayah kumuh di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dengan luasan kawasan kumuh mencapai 1478,49 Ha yang ditetapkan melalui SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/473-KUM/2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hasil penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK).

Tabel 2.60 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat, 2022

Jenis Pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
	Indikator	Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Indikator	Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%	Setiap Tahun	Rehabilitasi Pembangunan Kembali	0%	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Penyediaan Rumah (Relokasi)			
				Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana			
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	Jumlah warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	0%	Setiap Tahun	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0%	Setiap Tahun	

Sumber: Dinas PRKPLH Kab. Tanah Laut, 2023

Beberapa kendala dan permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman terhadap SPM yang belum komprehensif dan merata.
2. Belum ada nya penyusunan rencana aksi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
3. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) khusus nya pada bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman untuk mendukung pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan, kenyamanan lingkungan, dan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Tabel 2.61 Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian	Keterangan
1.	Pelayanan dan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum dan perkara	102 kasus (100)	102 kasus (100)	Satpol PP dan Damkar
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	67 kejadian (100%)	67 kejadian (100)	Satpol PP dan Damkar
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	354.340 orang (100%)	354.340 orang (100%)	BPBD
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	71 orang (100%)	71 orang (100%)	BPBD
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.216 orang (100%)	3.216 orang (100%)	BPBD

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, BPBD Kab. Tanah Laut, 2023

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota serta penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota adalah:

- a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda/Perkada di Kabupaten Tanah Laut
- b. Kurangnya Sumber Daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

- c. Sarana dan prasarana yang belum memadai dan mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran Perda/Perkada tersebut.

Pada tahun 2022 dalam rangka penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum untuk kegiatan pengendalian dan penindakan dilapangan berupa razia-razia terhadap warung-warung yang mempekerjakan anak di bawah umur, para gelandangan/gepeng yang terindikasi mengganggu ketentraman masyarakat, para pemuda yang diduga mengkonsumsi miras/obat-obatan terlarang. Adanya demo/unjuk rasa yang terstruktur dan pelayanan-pelayanan insidentil lainnya. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Kurangnya ejukasi dan kesadaran kepada masyarakat seperti yang mempekerjakan anak di bawah umur
- b. Sering ditemui adanya back up dari pihak ketiga yang melegalkan kegiatan
- c. Tidak jarang timbul perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda/Perkada tersebut.

Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yaitu:

- a. Tidak semua kecamatan mempunyai pos sektor Damkar masih ada 4 (empat) kecamatan lagi yang belum memiliki pos sektor sehingga penanganan pemadaman kebakaran terkendala dan kurang maksimal.
- b. Keadaan masyarakat dilokasi kebakaran kadang ingin mengambil alih selang pemadaman sehingga mengganggu aktifitas kelancaran pemadaman.

Dalam melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2022, BPBD Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa kendala dan permasalahan, yaitu:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum tersedia secara lengkap akibat besarnya biaya yang diperlukan untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana.
- b. Belum efektifnya Gudang penyimpanan sarana prasarana karena Gedung yang kurang memadai.
- c. Penyimpanan logistic belum efisien karena tidak tersedianya Gudang logistik.

2.1.3.1.6 Sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program jaminan sosial berupa jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tabel 2.62 Persentase Rumah Tangga dengan Jaminan Sosial Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2021

Maksud Utama	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Jaminan Pensiun/Veteran	11,11	5,58	5,52	19,98
Jaminan Hari Tua	9,44	4,93	3,30	21,26
Asuransi Kecelakaan Kerja	10,19	8,31	7,28	17,92
Jaminan/Asuransi Kematian	9,56	8,92	5,04	18,77
Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	5,56	4,54	4,77	34,68

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Adapun pencapaian SPM di Bidang Sosial pada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.63 Pencapaian SPM Bidang Sosial Kab. Tanah Laut, 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	287	287	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	Layanan data dan pengaduan	287	287	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2	2	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki	2	2	0	100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru				
	Penyediaan permakanaan	287	287	0	100%
	Penyediaan sandang	20	20	0	100%
	Penyediaan alat bantu	2	2	0	100%
	Penyediaan perbekalan kesehatan	287	287	0	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	20	20	0	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	25	25	0	100%
	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	25	25	0	100%
	Akses ke layanan pendidikan	260	260	0	100%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	287	287	0	100%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	287	287	0	100%
	Layanan rujukan	35	35	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	2	2	0	100%
	JUMLAH	1,828	1,828	0	1.500%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Tota Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	369	369	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	Layanan data dan pengaduan	369	369	0	100%
	Penyediaan permakanaan	369	369	0	100%
	Penyediaan sandang	369	369	0	100%
	Penyediaan alat bantu	18	18	0	100%
	Penyediaan perbekalan kesehatan	369	369	0	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	369	369	0	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	315	315	0	100%
	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat	369	369	0	100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak				
	Akses ke layanan pendidikan	369	369	0	100%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	369	369	0	100%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	369	369	0	100%
	Layanan rujukan	18	18	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2	2	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2	2	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	2	2	0	100%
	JUMLAH	3,678	3,678	0	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	2,833	2,833	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	Layanan data dan pengaduan	2,833	2,833	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2	2	0	100%
	Penyediaan permakanan	2,833	2,833	0	100%
	Penyediaan sandang	2,833	2,833	0	100%
	Penyediaan alat bantu	20	20	0	100%
	Penyediaan perbekalan kesehatan	2,833	2,833	0	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	15	15	0	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	15	15	0	100%
	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat	2,833	2,833	0	100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak				
	Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2,833	2,833	0	100%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2,833	2,833	0	100%
	Layanan rujukan	2,833	2,833	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	2	2	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2	2	0	100%
	JUMLAH	22,721	22,721	0	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	10	10	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	Layanan data dan pengaduan	10	10	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2	2	0	100%
	Penyediaan permakanan	10	10	0	100%
	Penyediaan sandang	10	10	0	100%
	Penyediaan alat bantu	10	10	0	100%
	Penyediaan perbekalan kesehatan	10	10	0	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	10	10	0	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	10	10	0	100%
	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	10	10	0	100%
	Akses ke layanan pendidikan	10	10	0	100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	0	100%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	0	100%
	Layanan rujukan	2	2	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	2	2	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2	2	0	100%
	JUMLAH	118	118	0	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	8,208	8,208	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	Penyediaan permakanan	8,208	8,208	0	100%
	Penyediaan sandang	121	121	0	100%
	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	10	10	0	100%
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	10	10	0	100%
	Pelayanan dukungan Psikososial	8,208	8,208	0	100%
	JUMLAH	16,557	16,557	0	100%

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tanah Laut, 2023

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 antara lain:

1. Permasalahan Internal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari dalam Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain:

- a. Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
- b. Sarana dan Prasarana Kantor yang belum lengkap/ belum memadai.

- c. Kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum terisi.
- d. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial.

2. Permasalahan Eksternal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari luar Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain:

- a. Masih kurangnya Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di lingkungan Masyarakat.
- b. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial.
- c. Pembangunan Industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.
- d. Kurangnya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan Pihak luar seperti Dinas terkait dan Dunia Usaha/ CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.
- e. Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah rawan bencana sehingga diperlukan banyak persediaan logistik dalam Penanganan Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam menjalankan segala urusan pemerintah daerah dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka sangat diperlukan serapan dan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, urusan ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam menjalankan proses pemerintahan.

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja,

karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja.

Jika melihat data TPT pada tahun 2018 sebesar 3,28% kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,41%, dan pada tahun 2020 terjadi kenaikan persentase pengangguran hingga TPT menjadi sebesar 3,57%, namun pada tahun 2021 turun menjadi 3,52%, dan kembali naik menjadi 4,17% pada tahun 2022.

Tabel 2.64 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,28	3,41	3,57	3,52	4,17

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*supply*) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa. TPAK yang dirinci menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK Kabupaten Tanah Laut selama periode Tahun 2018–2022 seperti terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.65 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,85	69,19	72,03	72,27	70,92

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Terlihat dari tabel di atas, selama periode 2018-2021 TPAK Kabupaten Tanah Laut terus meningkat hingga 72,27%, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 70,92%. Penurunan TPAK salah satunya disebabkan terjadinya peningkatan penduduk bukan angkatan kerja pada saluran "sekolah" karena pandemi yang sudah mereda dan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah.X

Tabel 2.66 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Bekerja (jiwa)	158.596	166.334	175.337	178.543	176.458
2	Angkatan Kerja (jiwa)	163.969	172.161	181.827	185.049	184.133
3	Penganggur/Mencari Kerja (jiwa)	5.373	5.827	6.490	6.506	7.675

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak harus terus diperkuat. Hal ini dirasa perlu mengingat perempuan dan anak merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki fungsi yang penting untuk masa depan suatu daerah.

Tabel 2.67 Jumlah Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan, 2018-2021

Jenis Tindak Pidana	2018		2019		2020		2021	
	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak
Fisik	9	1	2	2	5	1	4	8
Psikis	2	36	4	2	4	2	4	7
Seksual	3	54	2	14	3	14	-	7
Penelantaran	2	1	3	4		2	3	1
Perdagangan Orang	3	0	0	0		2	1	-
Eksploitasi	1	0	0	0		4	-	4
Lainnya	1	17	0	2	1	1	-	3

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2023

Angka Pernikahan dini di Kabupaten Tanah Laut tergolong tinggi. Tertinggi berada pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, masing-masing berjumlah 174 orang, 188 orang dan 137 orang perempuan berusia dibawah 19 tahun.

Tabel 2.68 Jumlah Pernikahan Dini di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pernikahan Dini (orang)	54	66	174	188	137

Sumber: DP2KBP3A Kab. Tanah Laut, 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan.

Tabel 2.69 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Tahun	IPG Kab Tanah Laut	IPG Prov Kalimantan Selatan
2018	87,14	88,61
2019	86,96	88,61
2020	87,19	88,86
2021	86,86	88,86
2022	87,28	89,44

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2018-2021 berfluktuasi setiap tahunnya. Peningkatan terjadi bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi Kesehatan, Pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut mengalami perbaikan meskipun masih belum signifikan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

Tabel 2.70 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2021

Tahun	IDG Kab Tanah Laut	IDG Prov Kalimantan Selatan
2018	65,96	71,31
2019	70,67	74,60
2020	72,80	74,48
2021	72,86	74,58

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan apabila penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau ancaman kelaparan. Ketahanan pangan dapat dilihat dari kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.

Ketahanan pangan di suatu daerah dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu, jumlah regulasi ketahanan pangan, ketersediaan pangan utama, cakupan binaan kelompok tani, pelayanan bidang ketersediaan dan cadangan pangan, penguatan cadangan pangan, Ketersediaan Informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah, Stabilitas harga dan pasokan pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, serta Penanganan Daerah rawan Pangan.

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi danimbang, serta meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui pencapaian skor PPH. Pola Konsumsi Pangan ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Untuk mencapai konsumsi energi dan PPH yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya, meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi

masyarakat yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan. Untuk itu dimasa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Tabel 2.71 Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Tahun	Skor PPH
2019	81,5
2020	82,8
2021	84,1
2022	90,7

Sumber: DKPP Kab. Tanah Laut, 2023

Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor pangan (dietary score)/skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Melihat skor pangan harapan Kabupaten Tanah Laut menunjukkan capaian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun meskipun belum mencapai angka standar 100. Pada tahun 2021 skor PPH mencapai 84,1 dan mengalami peningkatan 1,3 dibanding tahun 2020. Hal ini menunjukkan kesadaran dalam konsumsi pangan beragam dan berimbang semakin tinggi.

Tabel 2.72 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Tahun	IKP	Peringkat Nasional	Peringkat Provinsi
2018	79,76	59	6
2019	74,71	90	3
2020	81,85	93	4
2021	81,61	97	4
2022	82,06	88	4

Sumber: DKPP Kab. Tanah Laut, 2023

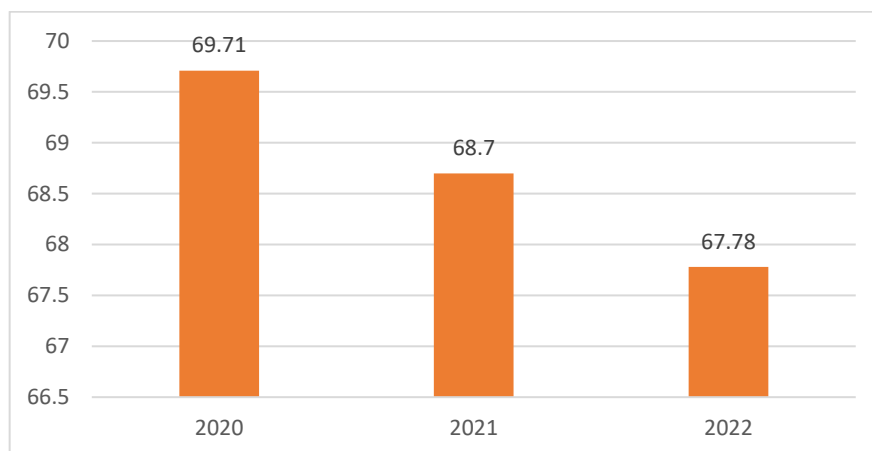
Pada tahun 2022, di Kabupaten Tanah Laut masih terdapat desa rentan ketersediaan pangan. Sebanyak 20 desa dengan kategori tinggi, 20 desa dengan kategori sedang, dan 28 desa dengan kategori rendah.

2.1.3.2.4 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup perlu untuk dilestarikan dan dijaga mengingat lingkungan hidup memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan keseimbangan alam. Oleh karena itu, perlu akan adanya upaya perlindungan dan pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan hidup sehingga tidak punah dan tetap terjaga atau lestari.

Lingkungan hidup memiliki beberapa indikator antara lain pencemaran status mutu air, kondisi lingkungan hidup dan tata ruang, persentase penanganan sampah, Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal, Penegakan Hukum Lingkungan, serta Cakupan Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan.

Pada tahun 2022 nilai IKLH meunjukkan penurunan menjadi 67,78 yang mana pada tahun 2021 IKLH Kabupaten Tanah Laut sebesar 68,7. Pada tahun 2020, metode perhitungan IKLH menggunakan metode baru, yaitu terdapat perbedaan pembobotan, dimana bobot terbesar ada pada Indeks Kualitas Air. Dimana sebelumnya bobot terbesar ada pada Indeks Kualitas lahan.



Sumber: Dinas PRKPLH Kab Tanah Laut, 2023

Gambar 2.15 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

2.1.3.2.5 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan yang penting dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Data kependudukan menjadi dasar dan rujukan pengambilan kebijakan-kebijakan di berbagai sektor pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan administrasi kependudukan secara berkesinambungan dapat

menjamin pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel 2.73 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran, 2020-2022

NO	KABUPATEN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		JML PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	JML PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA	%	JML PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	JML PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA	%	JML PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	JML PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA	%
1	TANAH LAUT	113,453	110,399	97.31	108,021	105,874	98.01	105,893	104,603	98.78
	JUMLAH	113,453	110,399	97.31	108,021	105,874	98.01	105,893	104,603	98.78

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut, 2023; Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2020, Tahun 2021; Tahun 2022 berdasarkan Data pelayanan pada Aplikasi Monitoring Pelayanan pertanggal 06 Maret 2023

Tabel 2.74 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga, 2020-2022

NO	KABUPATEN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		JML KK	JML PENDUDUK YANG MEMILIKI KK	%	JML KK	JML PENDUDUK YANG MEMILIKI K	%	JML KK	JML PENDUDUK YANG MEMILIKI KK	%
1	TANAH LAUT	117,185	104,891	89.51	118,015	108,493	91.93	122,571	122,392	99.85
	JUMLAH	117,185	104,891	89.51	118,015	108,493	91.93	122,571	122,392	99.85

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut, 2023; Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2020, Tahun 2021; Tahun 2022 berdasarkan Data pelayanan pada Aplikasi Monitoring Pelayanan pertanggal 06 Maret 2023

Tabel 2.75 Jumlah Kepemilikan KTP Elektronik, 2020-2022

NO	KABUPATEN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		WAJIB KTP-el	WAJIB KTP-el YANG SUDAH MEREKAM	%	WAJIB KTP-el	WAJIB KTP-el YANG SUDAH MEREKAM	%	WAJIB KTP-el	WAJIB KTP-el YANG SUDAH MEREKAM	%
1	TANAH LAUT	250,049	247,445	98.96	251,091	247,221	98.46	258,300	253,526	98.15
	JUMLAH	250,049	247,445	98.96	251,091	247,221	98.46	258,300	253,526	98.15

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut, 2023; Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2020, Tahun 2021; Tahun 2022 berdasarkan Data pelayanan pada Aplikasi Monitoring Pelayanan pertanggal 06 Maret 2023

Tabel 2.76 Jumlah Kepemilikan KIA, 2020-2022

NO	KABUPATEN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		JML PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN	JML PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA	%	JML PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN	JML PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA	%	JML PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN	JML PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA	%
1	TANAH LAUT	101,525	29,035	28.60	103,523	43,397	41.92	99,790	58,204	58.33
	JUMLAH	101,525	29,035	28.60	103,523	43,397	41.92	99,790	58,204	58.33

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut, 2023; Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2020, Tahun 2021; Tahun 2022 berdasarkan Data pelayanan pada Aplikasi Monitoring Pelayanan pertanggal 06 Maret 2023

2.1.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Wilayah desa memiliki peran dalam menunjang pembangunan. Keberhasilan pembangunan desa menjadi faktor penting untuk mencegah laju urbanisasi yang dapat memicu berbagai permasalahan sosial. Langkah penting dalam pembangunan desa adalah melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai sumber daya manusia dan factor penentu kemandirian suatu wilayah. Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu indikator untuk menentukan

kemandirian Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah.

Pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan cara untuk membendung arus urbanisasi ke kota, karena apabila suatu daerah mampu melakukan pemberdayaan masyarakat. Maka suatu daerah berhasil dalam melakukan proses pembangunan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah desa.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu mengarahkan dan mendampingi agar dana yang diterima desa dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengukur Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran ini dimaksudkan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa, dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun.

Tabel 2.77 Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Kriteria IDM	Jumlah Desa				
		2017/2018	2019	2020	2021	2022
1	Sangat Tertinggal	2	1	0	0	0
2	Tertinggal	55	15	4	2	0
3	Berkembang	66	89	98	85	70
4	Maju	7	25	26	40	52
5	Mandiri	0	0	2	3	8
Jumlah		130	130	130	130	130

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut, 2023

Capaian IDM pada tahun 2022 nilai IDM 0,7272 yang terdiri dari 8 desa masuk dalam kategori “Mandiri”, 52 desa masuk dalam kategori “Maju”, 70 desa masuk dalam kategori “Berkembang”.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada awal tahun 2020 telah dilakukan *rebranding* nama program oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dari Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Bangga Kencana merupakan program untuk memberdayakan keluarga menjadi keluarga yang berkualitas (tentram, mandiri, dan bahagia) melalui upaya: 1) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), 2) Pengaturan Kelahiran, 3) Pembinaan Ketahanan Keluarga, 4) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, 5) Pengelolaan Kependudukan.

Upaya pengaturan kelahiran melalui program Keluarga Berencana dari tahun ke tahun semakin dipermudah dalam mendapatkan pelayanan. Terlihat dari tabel di bawah ini, bahwa jumlah peserta KB aktif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif, hingga pada tahun 2022 jumlahnya menjadi 42.653 peserta. Sama halnya dengan Pasangan Usia Subur yang ada di Kabupaten Tanah Laut, jumlahnya menurun dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2022 jumlahnya 56.727 pasangan.

Tabel 2.78 Perkembangan Peserta KB Aktif dan Pasangan Usia Subur di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Peserta KB Aktif	53.049	53.679	52.981	53.277	42.653
Pasangan Usia Subur (PUS)	65.191	65.741	63.254	63.968	56.727

Sumber: Satu Data Kab. Tanah Laut; BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.79 Data Kampung KB di Kabupaten Tanah Laut, 2022

No	Kecamatan	Desa Kampung KB	Klasifikasi			
			Dasar	Berkembang	Mandiri	Berkelanjutan
1	Jorong	Asam Jaya	√			
2	Kurau	Tambak Sarinah	√			
3	Kintap	Bukit Mulya	√			
4	Panyipatan	Kuringkit	√			
5	Takisung	Batilai	√			
6	Bumi Makmur	Handil Suruk	√			
7	Tambang Ulang	Sungai Jelai	√			
8	Bati-Bati	Padang	√			
9	Batu Ampar	Damar Lima	√			

No	Kecamatan	Desa Kampung KB	Klasifikasi			
			Dasar	Berkembang	Mandiri	Berkelanjutan
10	Pelaihari	Panggung Baru	√			
		Ujung Batu	√			
11	Bajuin	Tirta Jaya	√			
		Sungai Bakar	√			
		Galam	√			
		Pemalongan	√			
		Kunyit	√			

Sumber: DP2KBP3A Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.2.8 Perhubungan

Perhubungan merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan pergerakan manusia yang berkembang sangat dinamis, serta berperan dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Perkembangan sektor transportasi mencerminkan pertumbuhan perekonomian secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. Prasarana transportasi berkaitan erat dengan infrastruktur yang tersedia sebagai penunjang mobilisasi barang dan manusia. Infrastruktur yang baik mampu meningkatkan efisiensi proses distribusi barang dan jasa.

Tabel 2.80 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Jenis	Satuan	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angkutan Barang	unit	3,687	4,194	4,527	4,808	5,048
Angkutan Penumpang	unit	30	33	37	40	45
TOTAL		3,717	4,227	4,564	4,848	5,093

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.81 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Ketersediaan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rambu darat Standart	1,254	1,306	1,344	1,402	1,402
2	Rambu Sungai	51	56	56	60	60
3	Rambu Elektronik	2	2	2	2	2

No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Ketersediaan				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	RPPJ	21	23	28	31	31
5	Cermin cembung	5	10	10	10	20
6	Delinator	93	93	93	133	133
7	Warning light	6	7	7	8	8
8	APILL	3	3	3	3	3
9	Guardril	-	93	93	93	93
10	Halte	11	11	11	11	11
11	Pagar Besi Barrier	10	20	20	20	20
12	Road Barrier	40	55	55	55	55
13	Traffic Cone	20	30	30	30	30
14	Marka Jalan (ml)	14000	16260	2987.5		

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut, 2023

Pada tahun 2023, akan dilaksanakan pembangunan tahap awal Terminal Tipe C di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari. Dan akan dilanjutkan ke tahap pemenuhan sarana dan prasarana wajib di lokasi pembangunan Terminal tersebut.

Tabel 2.82 Jumlah Lokasi Parkir yang Dikelola Dinas Perhubungan, 2020-2021

No	Lokasi Parkir di Wilayah	Jumlah Lokasi Parkir				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kecamatan Pelaihari	9	9	9	25	25
2.	Kecamatan Bajuin	0	0	1	1	1
3.	Kecamatan Takisung	1	1	2	2	2
4.	Kecamatan Panyipatan	1	1	2	3	3
5.	Kecamatan Batu Ampar	1	2	2	2	2
6	Kecamatan Jorong	3	3	5	5	5
7	Kecamatan Kintap	1	1	1	1	1
8.	Kecamatan Tambang Ulang	1	1	1	1	1
9.	Kecamatan Bati-Bati	0	0	0	0	0
10	Kecamatan Kurau	0	1	1	1	1
11	Kecamatan Bumi makmur	0	0	0	0	0
	Jumlah	17	19	24	41	41

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.2.8 Komunikasi dan Infromatika

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada hasil evaluasi mandiri tingkat kematangan SPBE

Tabel 2.83 Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022

Tahun	Indeks	Predikat
2019	2,76	Baik
2020	3,21	Baik
2021	2,75	Baik
2022	3,11	Baik

Sumber: Kementerian PAN dan RB RI, 2023

Tabel 2.84 Jumlah Blank Spot di Kabupaten Tanah Laut, 2022

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa Blank Spot	Ket
1	Kintap	0	-
2	Jorong	2	-
3	Batu Ampar	5	-
4	Pelaihari	6	-
5	Panyipatan	0	-
6	Takisung	12	-

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa Blank Spot	Ket
7	Bajuin	4	Tahun 2022 telah disediakan layanan jaringan internet lastmile
8	Kurau	0	-
9	Bumi Makmur	3	-
10	Tambang Ulang	1	-
11	Bati-Bati	0	-
Jumlah		33	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilakukan melalui pemberdayaan guna meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi secara langsung dapat memicu peningkatan ekonomi. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UKM, serta meningkatkan kemandirian UKM. Adapun sasaran yang hendak dicapai, yaitu meningkatkan sumber daya manusia pengelola koperasi dan UKM yang berkompeten dan berdaya saing, meningkatkan akuntabilitas dan pemberdayaan koperasi dan UKM, serta meningkatkan sarana dan prasarana koperasi dan UKM.

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Saat ini koperasi masih menjadi soko guru perekonomian dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tabel 2.85 Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Jenis Koperasi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
KUD	38	38	38	38	38
KPR	14	15	17	16	15
KPN	16	17	16	16	15

Jenis Koperasi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lainnya	78	80	92	92	95
Jumlah	146	150	163	163	163

Sumber: BPS Kab Tanah Laut, 2023

Pada tahun 2021, jumlah Koperasi sebanyak 168 unit dengan 102 unit Koperasi yang aktif dan 66 unit Koperasi tidak aktif. Sedangkat pada tahun 2022 jumlah koperasi menurun menjadi 163 unit koperasi dengan 77 unit Koperasi aktif dan 86 unit Koperasi tidak aktif.

Tabel 2.86 Perkembangan Data Keragaan Koperasi Kab. Tanah Laut per Desember 2022

Kabupaten	Aktif (kop)	Tidak (kop)	Total (kop)	AGT (ORG)	RAT TB.2021	Modal sendiri (Rp.000)	Modal Luar (Rp.000)	Volume Usaha (Rp.000)	SHU (Rp.000)
Tanah Laut	77	86	163	29,001	45	70,079,430	212,869,433	25,600,610	7,389,519

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tanah Laut, 2023 (diolah)

Tabel 2.87 Data Umum Jumlah UMKM Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2022

Bidang Usaha	2022											
	Pelaihari	Bati-Bati	Takisung	Panyipatan	Kintap	Jorong	Tambang Ulang	Kurau	Bumi Makmur	Batu Ampar	Bajuin	Jumlah
Pedagang Eceran	2058	2383	1623	1193	808	762	828	825	658	325	258	11721
Kuliner	2055	1583	735	620	673	695	356	369	295	341	262	7984
Pancarekanaan	737	723	347	266	499	310	238	200	128	212	154	3814
Agribisnis	369	223	800	237	85	38	105	43	42	40	40	2022
Jasa	351	154	199	63	71	54	37	41	39	31	14	1054
Peternakan	306	190	216	213	157	80	124	105	306	137	21	1855
Fashion	278	545	107	85	145	183	78	96	67	57	41	1682
Otomotif	206	139	86	67	62	42	44	41	32	43	46	808
Pengolahan	206	147	330	139	106	47	32	55	20	27	27	1136
Penjahit	186	139	67	63	74	54	37	36	58	30	15	759
Ponsel	81	137	60	43	56	71	37	29	27	26	10	577
Online Shop	50	141	52	36	47	64	30	14	14	22	16	486
Salon/Kecantikan	43	63	18	16	24	22	8	13	5	6	6	224
Produk Kreatif	32	63	65	36	20	26	11	7	9	7	7	283
ATK	17	27	16	5	14	9	7	11	6	7	1	120
Penyewaan	17	7	7	8	11	5	1	0	1	4	0	61
Percetakan	12	12	4	6	5	2	0	2	2	0	1	46
Nelayan	1	0	49	49	2	49	0	1	85	0	0	236
JUMLAH	7005	6676	4781	3145	2859	2513	1973	1888	1794	1315	919	34868

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, 2023

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka memperhatikan tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan prima serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (*multiflier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian.

Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Tabel 2.88 Nilai Investasi Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	845,192,000,000	662,410,200,000	78%
2020	887,452,000,000	1,614,763,180,000	182%
2021	931,824,000,000	773,620,960,000	83%
2022	978,415,000,000	1,588,807,660,000	162%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.2.12 Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu,

statistik sectoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral. Hal tersebut menjadikan terlambatnya penyajian data untuk pembangunan. Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan $n+2$, sedangkan data yang tersedia adalah $n-1$. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan urusan statistik dilaksanakan dengan penyusunan dokumen analisis makro ekonomi, analisis PDRB, analisis IPM, dokumen database daerah, pengelolaan Portal Satu Data Tanah Laut serta koordinasi pengelolaan data bersama dengan BPS.

2.1.3.2.13 Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian.

Capaian kegiatan yang telah dilakukan untuk program persandian yaitu terlaksananya pengelolaan dan pengamanan jaringan komunikasi sandi internal Pemkab (JKS), jaringan Telepon dan Radio, sinyal frekuensi pada 21 ruang, dan koordinasi persandian dalam Forum komunikasi petugas sandi satu kali, pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah. Saat ini isu pengamanan informasi mengarah pada pengamanan sistem informasi manajemen pemerintah, sehingga dilakukan upaya pengamanan terhadap sistem informasi manajemen pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara bertahap.

2.1.3.2.14 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah jumlah kunjungan perpustakaan. Untuk meningkatkan angka kunjungan ke perpustakaan daerah Kabupaten Tanah Laut maka didukung oleh program dan kegiatan yaitu Pengadaan Buku Perpustakaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca.

Tabel 2.89 Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2018-2022

No	Judul/Kelompok	Jumlah Judul Buku dan Jumlah Eksampler									
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
1	Umum	36	77	25	37	7	8	4	7	35	102
2	Filsafat	8	13	40	69	10	17	8	8	15	48
3	Agama	64	117	165	311	65	147	82	165	150	428
4	Ilmu-ilmu Politik	91	110	237	870	71	81	70	140	91	249
5	Bahasa	10	10	11	20	9	11	29	60	6	9
6	Ilmu Murni	6	9	9	15	10	13	8	16	12	34
7	Ilmu Terapan	71	116	152	261	26	31	69	137	74	241
8	Kesenian	14	25	3	6	2	3	111	222	23	59
9	Sastra	32	57	129	235	31	70	70	144	128	512
10	Sejarah dan Geografi	8	15	35	57	9	10	12	24	30	98
11	Fiksi	26	57	2760	2923	594	1323	1712	3524	139	483
12	Non Buku (Peta)										16 buah
13	Non Buku (Globe)										4 buah
14	Non Buku (E-Book)			-		-		-			-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.90 Perpustakaan yang Terstandar di Kabupaten Tanah Laut 2022

No	Nama Perpustakaan yang Terstandar
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut
2	SMP Negeri 3 Pelaihari
3	Perpustakaan Desa Cahaya Hati Kecamatan Batu Ampar

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.91 Perpustakaan yang Terstandar di Kabupaten Tanah Laut 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pustakawan	6 Orang	6 Orang	6 Orang	7 Orang	8 Orang
2	Tenaga Ahli	-	-	-	-	1 Orang

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.2.15 Kearsipan

Arsip memiliki nilai dan arti penting karena merupakan bukti resmi mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kehidupan kebangsaan. Adapun komponen yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan arsip di suatu daerah, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang memadai, tempat penyimpanan yang nyaman

atau representatif, serta dukungan dari pejabat yang lebih tinggi.

Tabel 2.92 Capaian Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah unit kerja yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan	-	-	-	6	17
2	Jumlah unit kerja	40	40	40	40	40
3	Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan	-	-	-	-	11
4	Jumlah desa/kelurahan	135	135	135	135	135

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.93 SDM Pengelola Arsip Kabupaten Tanah Laut 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Tenaga Arsiparis	1	1	1	1	5
2	Jumlah Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan	-	-	-	-	265

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut, 2023

Indeks kearsipan adalah Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan secara keseluruhan yang diperoleh dari Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Provinsi kepada Lembaga Kearsipan Kabupaten dengan bobot nilai 60% dan Nilai Hasil Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten kepada SKPD dengan bobot nilai 40%.

Tahun 2022 Nilai Hasil Pengawasan Kab. Tanah Laut adalah =

- Nilai Hasil Pengawasan Eksternal Baik (B) = $63,61 \times 60\% = 38,17$

- Nilai Hasil Pengawasan Internal Cukup (C) = $57,80 \times 40\% = 23,12$

Jumlah Nilai Pengawasan Kearsipan Pemkab Tanah Laut = 61,29

2.1.3.2.16 Pertanahan

Tabel 2.94 Realisasi PTSL Kabupaten Tanah Laut, 2020-2022

Kecamatan	Jumlah Sertifikat	
	2021	2022
Panyipatan	-	1476
Takisung	-	1479
Bumi Makmur	1.362	
Kurau	1.138	
Bati-Bati	-	1.395
Tambang Ulang	-	751
Pelaihari	-	942
Bajuin	-	243
Batu Ampar	-	1.423
Jorong	-	513
Kintap	-	1.778
TOTAL	2500	10.000

Sumber: DPUPRP Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri atas kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan ketransmigrasian. Berikut adalah penjelasan serta data terkait.

2.1.3.3.1 Pertanian dan Peternakan

Pertanian menjadi salah satu fokus yang penting bagi Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai Petani. Dalam hal ini maka diperlukan penyelenggaraan khusus oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut bidang pertanian, karena selain menjadi ikon, pertanian juga memberikan kontribusi yang besar terhadap ketersediaan sandang dan pangan. Demi mewujudkan hal tersebut maka melalui kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan jasa perkebunan, serta



perikanan.

Tabel 2.95 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	18,92	19,02	19,28	18,03	15,58

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

PDRB sektor pertanian dipengaruhi fluktuasi produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan) pada setiap tahunnya. Terlihat pada tabel di atas, selama kurun waktu 2018-2022, distribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut mengalami fluktuasi. Distribusi tertinggi dicapai pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 15,58. Penurunan ini tentu memerlukan kebijakan dan tindakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga nantinya sektor Pertanian dapat menjadi sektor dominan untuk menyumbang distribusi PDRB.

Tabel 2.96 Kondisi Produksi Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Padi (ton)	293.608	271.941	289.645	145.890	143.962
Produksi Jagung (ton)	212.903	238.792	225.084	124.267	122.835
Produksi Kedelai (ton)	-	61	5,7	32	1.670
Produksi Ubi Jalar (ton)	1.535	1.666	1.684	1.707	824
Produksi Ubi Kayu (ton)	600	654	10.501	5.330	4.476
Produksi Kacang Hijau (ton)	66	80	190,3	132	100,3
Produksi Kacang Tanah (ton)	292	477	534	569	252
Produksi Bawang Merah (ton)	77,7	71,4	17,3	36,6	11,00
Produksi Cabe (ton)	1.468,8	1.893	2.128	2.135,5	2.350,90
Produksi Karet (ton)	7.619	8.117	6.920,3	14.324,3	14.601,70
Produksi Sawit (ton)	19.140	21.975	21.192	49.473,7	50.865,7
Populasi Ternak Besar (ekor)	89.757	94.311	106.215	78.769	84.055

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Populasi Ternak Kecil (ekor)	25.942	27.548	29.446	29.849	20.451
Populasi Unggas (ekor)	58.656.559	81.990.650	57.320.961	54.989.206	75.680.611
Produksi Daging Ternak (kg)	351.879	287.156	375.665	442.246	603.851
Produksi Telur (kg)	-	85.383.851	99.592.650	116.784.447	75.638.230

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Tanah Laut; BPS Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.3.2 Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawannya.

Tabel 2.97 Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata yang Ada di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Nama Objek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pantai Takisung	61.348	92.450	103.810	45.630	48.800
2	Pantai Batakan	46.709	26.258	75.830	50.256	117.700
3	Pantai Swarangan	1.578	264	100	-	10.980
4	Air Terjun Bajuin	3.875	3.618	87.400	29.911	36.152
5	Mina Tirta	4.430	2.505	240	80	2.940
6	Gunung Kayangan	6.314	5.457	1.871		
7	Pantai Kintap	400	468	-	97	911
8	Pantai Turki	109.104	114.500	26.555	29.900	40.136
9	Pantai Asmara	40.400	65.500	9.360	8.480	22.546
10	Pantai Cemara 1	7.145	3.990	-	-	9.347
11	Pantai Cemara 2	10.600	4.342	-	-	8.092
12	Pantai Tanjung Dewa	8.910	6.800	3.294	235	27.678
13	Pulau Datu	10.560	6.285	-	446	30.160
14	Gunung Birah	1.627	1.589	9.772	4.901	21.852
15	Dewa Katar	2.988	2.255	-	25	4.320
16	Taman Labirin	15.613	-	-	-	-
17	Taman Bunga Meisya	215	256	-	-	-

No	Nama Objek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2018	2019	2020	2021	2022
18	Wisata Mangrove	3.600	1.800	974	14.372	11.795
19	Kerbau Rawa	773	652	-	400	6.089
20	Surai Bekantan Panjaratan		-	825	424	3.379
21	Wisata Mahuni	-	-	6.500	4.200	7.340
22	Pantai Karindangan	-	-	-	963	16.292
23	Pantai THR	1.975	1.977	5.400	1.795	20.282
24	Taman Permana	-	-	-	1.556	80.350
25	Pantai Tabaniao	-	-	-	-	17.356
26	Bukit Timah	-	-	-	-	31.699
27	Danau Sari Ambun	881	691	-	-	-
28	Bukit Teletubies	1.317	1.565	-	-	-
TOTAL		340.362	343.222	331.931	193.671	576.196

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Kaut, 2023

Tabel 2.98 Perkembangan Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022

Kecamatan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Panyipatan	-	-	-	-
Takisung	1	1	1	1
Kurau	-	-	-	-
Bumi Makmur	-	-	-	-
Bati-Bati	-	1	-	-
Tambang Ulang	2	2	4	5
Pelaihari	22	17	17	25
Bajuin	-	-	-	-
Batu Ampar	1	1	1	1
Jorong	1	5	5	3
Kintap	1	1	2	1
TOTAL	28	28	30	36

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Kaut, 2023

Tabel 2.99 Perkembangan Jumlah Hotel di Kabupaten Tanah Laut, 2021-2022

Kecamatan	Hotel		Kamar		Tempat Tidur	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Panyipatan	-	-	-	-	-	-
Takisung	-	-	-	-	-	-
Kurau	-	-	-	-	-	-
Bumi Makmur	-	-	-	-	-	-
Bati-Bati	-	-	-	-	-	-
Tambang Ulang	-	-	-	-	-	-

Kecamatan	Hotel		Kamar		Tempat Tidur	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Pelaihari	11	13	218	164	322	247
Bajuin	-	-	-	-	-	-
Batu Ampar	-	-	-	-	-	-
Jorong	3	3	44	47	58	72
Kintap	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14	16	262	211	380	319

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

2.1.3.3.3 Perikanan

Selain sektor pertanian dan sektor perkebunan, dimana sektor perikanan Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu unggulan daerah untuk memenuhi permintaan ikan dalam lokal maupun di luar daerah. Perikanan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 2 (dua) macam yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap (ikan laut).

Tabel 2.100 Produksi Perikanan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022 (ton)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Perikanan Budidaya	1201.44	1329.98	1352.15	1386.78	1415
Perikanan Tangkap	57301	59974	61225.1	64545.1	65031

Sumber: DKPP Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.3.4 Perdagangan

Urusan perdagangan selain melaksanakan fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat dan pendorong bagi pengembangan perekonomian daerah juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Aktivitas perdagangan di Kabupaten Tanah Laut salah satunya tercermin dari jumlah pasar tradisional di Kabupaten Tanah Laut seperti tabel di bawah ini

Tabel 2.101 Jumlah Pasar Tradisional di Kab. Tanah Laut, 2019-2021

Kecamatan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Panyipatan	2	2	2	2
Takisung	3	3	3	3
Kurau	1	1	1	1
Bumi Makmur	-	-	-	-
Bati-Bati	4	4	4	4
Tambang Ulang	1	1	1	1
Pelaihari	1	1	1	1
Bajuin	1	1	1	1

Batu Ampar	2	2	2	2
Jorong	2	2	2	2
Kintap	1	1	1	1
TOTAL	18	18	18	18

Sumber: Satu Data Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.102 Jumlah Toko Modern di Kab. Tanah Laut, 2020-2022

Kecamatan	Tahun		
	2020	2021	2022
Panyipatan	-	-	-
Takisung	3	3	3
Kurau	-	-	1
Bumi Makmur	-	-	-
Bati-Bati	5	5	7
Tambang Ulang	1	1	2
Pelaihari	19	21	24
Bajuin	-	1	1
Batu Ampar	3	3	3
Jorong	6	6	8
Kintap	8	8	8
TOTAL	45	48	57

Sumber: Satu Data Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.3.5 Perindustrian

Tabel 2.103 Jumlah IKM yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna di Kab. Tanah Laut, 2019-2021

Kecamatan	Tahun		
	2019	2020	2021
Tambang Ulang	17	42	46
Takisung	17	96	99
Pelaihari	25	66	70
Panyipatan	19	94	94
Batu Ampar	10	65	67
Bumi Makmur	33	84	84
Bati-Bati	25	85	87
Bajuin	15	39	40
Kurau	18	58	58
Kintap	22	92	95
Jorong	23	55	60
TOTAL	224	776	800

Sumber: Satu Data Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perumusan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah

Pembentukan Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pada pedoman PD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan.

Berdasarkan Peratiran Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memiliki 40 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, 6 Badan, 19 Dinas, 1 Satuan dan 11 Kecamatan.

Tabel 2.104 Data Perangkat Daerah menurut Perda Nomor 6 Tahun 2016

No	SKPD	BIDANG URUSAN	TIPE BEERDASARKAN PERDA 6 2016
1	Sekretariat Daerah	Penunjang (Sekretariat Daerah)	A
2	Sekretariat DPRD	Penunjang (Sekretariat DPRD)	B
3	Inspektorat Kabupaten	Penunjang (Inspektorat)	A
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	A
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	C
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Keuangan	A
7	Badan Pendapatan Daerah	Keuangan	A
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		Dibentuk berdasarkan Perda 10 Tahun 2013
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Dibentuk berdasarkan Perda 10 Tahun 2013
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pendidikan Kebudayaan	A
11	Dinas Kesehatan	Kesehatan	A
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	A

No	SKPD	BIDANG URUSAN	TIPE BEERDASARKAN PERDA 6 2016
		Pertanahan	
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	A
		Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
14	Dinas Sosial	Sosial	A
15	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Kepemudaan Dan Olahraga	B
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Admindak Dan Capil	A
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi Dan Informatika	
		Statistik	B
		Persandian	
18	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Kelautan Dan Perikanan	A
		Pangan	
19	Dinas Pariwisata	Pariwisata	B
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pmd	B
		Transmigrasi	
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	A
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk Dan Kb	A
		P3A	
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Koperasi, Ukm	B
		Perdagangan	
24	Dinas Perhubungan	Perhubungan	B
25	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Perpustakaan	B
		Kearsipan	
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	Pertanian	A
27	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Pertanian	
28	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Perindustrian	B
		Tenaga Kerja	
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Sub Urusan Tibum	A
		Sub Urusan Kebakaran	
30	Kecamatan Pelaihari	Kecamatan	A
31	Kecamatan Bati-Bati	Kecamatan	A
32	Kecamatan Takisung	Kecamatan	A

No	SKPD	BIDANG URUSAN	TIPE BEERDASARKAN PERDA 6 2016
33	Kecamatan Batu Ampar	Kecamatan	A
34	Kecamatan Jorong	Kecamatan	A
35	Kecamatan Bajuin	Kecamatan	A
36	Kecamatan Kintap	Kecamatan	A
37	Kecamatan Bumi Makmur	Kecamatan	A
38	Kecamatan Kurau	Kecamatan	A
39	Kecamatan Tambang Ulang	Kecamatan	A
40	Kecamatan Panyipatan	Kecamatan	A

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut, 2023

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai 60,19. Perolehan nilai ini meningkat jika dibandingkan Tahun 2021 yaitu 60,16. Penilaian ini menunjukkan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Tabel 2.105 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	53	56,21	60,06	60,19

Sumber: Kementerian PAN RB, 2023

Tabel 2.106 Daftar Bank yang Ada di Kabupaten Tanah Laut, 2022

No.	Nama Bank	Jumlah (unit)	Jenis dan Lokasi
1.	BNI	2	Kantor Kas BNI KK Asam-Asam Kantor Bank BNI KCP Pelaihari
2.	BRI	16	Kantor Kas BRI Teras Pasar Batu Ampar Kantor Kas BRI Teras Sarang Halang Kantor Kas BRI Teras Angsau Kantor Kas BRI Teras Nusa Indah Kantor Kas BRI Teras Pasar Pelaihari Kantor Kas BRI Teras RSUD H. Boedjasin BRI Teras Keliling KCP Bank BRI Unit Sungai Cuka KCP Bank BRI Unit Kintap KCP Bank BRI Unit Bati-Bati KCP Bank BRI Unit Gagas KCP Bank BRI Unit Pelaihari Kota KCP Bank BRI Unit Takisung

No.	Nama Bank	Jumlah (unit)	Jenis dan Lokasi
3.	BTN	7	KCP Bank BRI Unit Jorong
			KCP Bank BRI Unit Asam-Asam
			Kantor Cabang BRI Pelaihari
			Kantor Kas BTN Pelaihari
			Kantor Kas BTN Takisung
			Kantor Kas BTN Kurau
			Kantor Kas BTN Kintap
4.	Bank Mandiri	1	Kantor Kas BTN Tajau Pecah
			Kantor Kas BTN Batu Tungku
5.	Bank Syariah Indonesia	1	Kantor Kas BTN Bat-Bati
			KCP Bank Mandiri Pelaihari
6.	Bank Kalsel	8	KCP Bank Syariah Indonesia
			KCP Bank Kalsel Unit Asam-Asam
			KCP Bank Kalsel Unit Bati-Bati
			KCP Bank Kalsel Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
			Bank Kalsel Keliling
			Layanan Syariah Bank Kalsel KCP Pemkab Tanah Laut
			Layanan Syariah Bank Kalsel LS Unit Asam-Asam
Layanan Syariah Bank Kalsel LS Cabang Pelaihari			
			Kantor Cabang Bank Kalsel Pelaihari

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Pada tabel di bawah ini terlihat penurunan jumlah BUMD di Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah BUMD di Kabupaten Tanah Laut masing-masing berjumlah 4 BUMD. Namun pada tahun 2022, menjadi 3 BUMD yang masing-masing berjeniss BUMD Bidang Jasa, Bumd Bidang Pertambangan, dan BUMD Bidang Keuangan.

Tabel 2.107 Perkembangan Jumlah BUMD di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2022

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
BUMD Bidang Jasa	2	2	1
BUMD Bidang Pertambangan	1	1	1
BUMD Bidang Keuangan	1	1	1
JUMLAH	4	4	3

Sumber: Satu Data Kab. Tanah Laut; Bag. Ekonomi Setda Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.108 Lembaga BUMD di Kabupaten Tanah Laut, 2022

No	BUMD	Unit Usaha	Penyertaan Modal (Rp.)	Modal Sendiri (Rp.)	Omset (Rp.)	Laba Tahun Berjalan (Rp.)	Laba yang disetor (Rp.)	Aset (Rp.)
1	PT. AM BERKAH BANUA	Pelayanan Air Bersih	64,568,504,147	-	11,181,155,542	(2,791,799,646)	-	28,492,857,616
2	PD. Baratala Tuntung Pandang	Pertambangan	0	1,000,000,000	15,070,981,795	1,426,092,929	0	3,709,359,949
3	PT. BPR TANAH LAUT	PERBANKAN	6,100,000,000	-	4,380,855,274	1,116,165,203	462,935,100	34,843,757,731
Jumlah			70,668,504,147	1,000,000,000	30,632,992,611	(249,541,514)	462,935,100	67,045,975,296

Sumber: Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut, 2023 (No 2 dan 3, Berdasarkan un-audit 31/12/2022)

2.1.3.4.2 Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Laut sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reuiu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.109 Pelaksanaan Pemeriksaan, Evaluasi dan Reuiu Tahun 2018-2022

No	Jenis Obyek Pemeriksaan	2018			2019			2020		
		Hasil (LHP,L HE,LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP,L HE,LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP,L HE,LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi
1	Pemeriksaan Khusus / Kasus	4	-	-	2	-	-	3	-	-
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Khusus / Kasus	0	-	-	2	-	-	2	-	-
3	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan	75	616	1252	75	645	1318	50	533	1071
4	Reuiu Laporan Keuangan OPD	40	-	-	40	-	-	40	-	-
5	Laporan Keuangan Pemda	1	-	-	1	-	-	1	-	-
6	Evaluasi SPIP	1	-	-	1	-	-	1	-	-
7	Evaluasi LkjIP	40	-	-	40	-	-	40	-	-

No	Jenis Obyek Pemeriksaan	2018			2019			2020		
		Hasil (LHP,LHE,LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP,LHE,LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP,LHE,LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi
8	Reviu RKA	2	-	-	2	-	-	2	-	-
9	Reviu RKPD	2	-	-	2	-	-	2	-	-
10	Reviu DAK Fisik	0	-	-	26	-	-	31	-	-
11	Pemeriksaan Cash dan Stock Opname	40 (BA)	-	-	40 (BA)	-	-	40 (BA)	-	-

Lanjutan

No	Jenis Obyek Pemeriksaan	2021			2022		
		Hasil (LHP,LHE,LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP,LHE,LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi
1	Pemeriksaan Khusus / Kasus	3	-	-	0	-	-
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Khusus / Kasus	13	-	-	6	-	-
3	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan	11	111	239	75	214	445
4	Reviu Laporan Keuangan OPD	40	-	-	40	-	-
5	Laporan Keuangan Pemda	1	-	-	1	-	-
6	Evaluasi SPIP	1	-	-	1	-	-
7	Evaluasi LkjIP	40	-	-	40	-	-
8	Reviu RKA	2	-	-	2	-	-
9	Reviu RKPD	2	-	-	2	-	-
10	Reviu DAK Fisik	22	-	-	41	-	-
11	Pemeriksaan Cash dan Stock Opname	40 (BA)	-	-	40 (BA)	-	-

Sumber: Inspektorat Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.110 Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah LKjIP yang nilainya meningkat	5	29	1	15	20
2	Jumlah Perangkat Daerah	40	40	40	40	40
3	Jumlah obrik yang tidak ada temuan keuangan	5	5	2	6	1
4	Jumlah obrik	101	86	57	85	38
5	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	587	430	174	276	72
6	Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan	1442	1386	1106	1138	510

Sumber: Inspektorat Kab. Tanah Laut, 2023



2.1.3.4.3 Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah (PD).

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar **67,28** dengan predikat “**B**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 2.111 Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Tanah Laut, 2022

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,43
2	Pengukuran Kinerja	30	19,46
3	Pelaporan Kinerja	15	10,59
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,80
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,28
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Sumber: Kementerian PAN RB RI, 2022

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai institusi pembina perencanaan pembangunan, mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah salah satunya dengan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja pembangunan sejak tahun 2011.

Pada awalnya, apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan melalui penilaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seiring dengan berjalannya waktu, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah, tidak hanya dilihat dari aspek dokumen, melainkan juga melihat pada aspek pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan.

Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2019 hingga 2023, mengikuti Penilaian Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan berhasil mendapat juara ke-2 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.3.4.4 Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut golongan dalam kurun waktu tahun 2019-2022 semakin menurun.

Tabel 2.112 Perkembangan Jumlah ASN menurut Golongan Kepangkatan di Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022

Pangkat	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Golongan I	58	51	45	36
Golongan II	622	644	632	624
Golongan III	3119	3023	3033	3015
Golongan IV	1200	1155	1124	1081

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.113 Daftar Inovasi Daerah yang Terkirim Melalui Aplikasi Inovation Government Award (IGA) Tahun 2022

No	SKPD		Nama Inovasi Daerah	Nilai Kematangan	Ket
1	Dinas Kesehatan	1.1	Survei Indikator PHBS Online oleh Kader (SIP OK)	97.00	Kesehatan
2	RSUD H. Boejasin	2.1	Boejasin Informasi Sistem Aplikasi (BISA)	72.00	Kesehatan

No	SKPD		Nama Inovasi Daerah	Nilai Kematangan	Ket
3	Bagian PBJ Sekretariat Daerah	3.1	Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut (SOSIALITA)	102.00	Fungsi Penunjang Lainnya
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.1	Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS)	102.00	Adm. Dukcapil, Kominfo
		4.2	Desa Tertib Administrasi Kependudukan (DETAK)	86.00	Adm. Dukcapil
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	5.1	Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup melalui Nomor WA Pos Pengaduan DPRKPLH	66.00	Lingkungan Hidup
		5.2	Layanan Masyarakat Pengaduan Lampu Penenrangan Jalan Umum (LAMPU PJU)	68.00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.1	Sistem Informasi Layanan Online (SIMFONI)	93.00	Kominfo Kepegawaian
		6.2	Sistem Informasi Dokumen Kepegawaian (SIDIKA)	97.00	Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian
7	Dinas P2KBP3A	7.1	Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	57.00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: Bappeda Kab. Tanah Laut, 2023

Selain itu Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut masuk dalam kategori “Inovatif” selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu masing-masing 52,42 dari nilai 100 pada tahun 2021 dan 52,12 dari 100 pada tahun 2022.

2.1.3.4.6 Keuangan

Realisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 (sembilan) kali berturut-turut. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan aset daerah.



Tabel 2.114 Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kab. Tanah Laut, 2018-2022

Kabupaten	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Tanah Laut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kab. Tanah Laut, 2023

Selain itu, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 berada pada kategori “Sangat Perlu Perbaikan” dengan nilai 49,8. Dari segi pendapatan, kontribusi PAD yang digunakan dalam pendanaan pembangunan daerah masih rendah. Pada tahun 2022, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 7,88, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 13,53%.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan. Indikator yang digunakan untuk menganalisis daya saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, fasilitas wilayah dan iklim investasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis

makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Hukum *Engel/Engel Law* bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Tabel 2.115 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022 (persen)

Kelompok Makanan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Makanan					
Padi-padian	11,45	10,71	10,65	11,66	10,48
Umbi-umbian	0,45	0,47	0,58	0,81	0,73
Ikan/udang/cumi/kerang	13,20	11,99	10,49	12,76	11,84
Daging	3,26	3,36	3,30	3,01	4,58
Telur dan susu	5,31	5,19	6,28	5,75	5,19
Sayur-sayuran	6,07	6,08	6,58	7,89	7,93
Kacang-kacangan	1,61	1,57	1,76	1,78	1,63
Buah-buahan	4,96	3,64	3,97	3,29	4,11
Minyak dan kelapa	2,63	2,48	2,48	2,57	3,45
Bahan minum	3,63	3,50	3,68	4,08	3,41
Bumbu-bumbuan	2,13	2,08	2,04	2,63	2,30
Konsumsi lainnya	2,27	1,96	2,22	2,30	2,17
Makanan dan minuman jadi	31,77	33,35	32,32	28,08	29,91
Rokok	11,26	13,60	13,65	13,40	12,28
Jumlah makanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bukan makanan					
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	58,14	60,05	54,50	57,34	52,68
Aneka komoditas dan jasa	25,12	18,30	21,99	19,20	20,97
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	6,93	6,82	6,61	6,93	5,65
Komoditas tahan lama	4,43	7,39	7,95	7,46	10,44
Pajak, pungutan, dan asuransi	5,38	5,57	6,80	8,24	8,71
Keperluan pesta dan upacara	58,14	1,87	2,15	0,82	1,54
Jumlah bukan makanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pengeluaran tertinggi pada kelompok makanan dan minuman jadi diikuti kelompok ikan/udang/cumi/kerang, padi-padian, sayur-sayuran. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Tanah Laut pola konsumsinya menginginkan yang lebih praktis dan siap saji dan didukung juga kemudahan akses berbagai jenis makanan dan minuman jadi.

Untuk konsumsi rokok, tingkat konsumsinya masih cukup tinggi walaupun dalam kurun waktu lima tahun persentasenya fluktuatif. Sementara itu untuk konsumsi umbi-umbian masih sangat rendah, hanya berkisar 0,73% pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan umbi-umbian bukan menjadi makanan pokok.

Pada tahun 2022, tingkat pengeluaran tertinggi pada Kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga 52,28% dan diikuti oleh Kelompok Aneka Komoditas dan Jasa sebesar 20,97%, sedangkan pengeluaran terendah pada Kelompok Keperluan Pesta dan Upacara.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur adalah salah satu faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah, karena dengan infrastruktur yang baik akan mempermudah kehidupan suatu wilayah. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur jua pada akhirnya akan mendorong pekonomian daerah kerana adanya kemudahan aksesibilitas.

2.1.4.2.1 Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut seluas 3.631,35 km². Rencana Kawasan budidaya yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas seluas 5.204,96 ha di Kecamatan Kintap, hutan produksi tetap seluas 68.764,87 ha, dan hutan produksi konversi seluas 9.739,52 ha. Untuk kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tanah Laut meliputi kawasan pertanian tanaman pangan yang terdiri dari kawasan pertanian lahan basah seluas 42.322,38 ha, kawasan pertanian lahan kering seluas 44.904,74 ha, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 39.425,54 ha, dan proyeksi untuk cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 2.680,82 ha. Kawasan hortikultura di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 10 kecamatan dengan luasan keseluruhan sebesar 786 ha. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan pusat agropolitan di Kecamatan Pelaihari, Batu Ampar, Panyipatan, dan Kurau. Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut seluas 106.233,30 ha yang tersebar di seluruh

kecamatan termasuk Kawasan agropolitan. Kawasan peternakan yang dikembangkan merupakan pengembangan komoditas sapi, sapi perah, kerbau rawa, dan kerbau darat.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebesar kurang lebih 3.969,35 ha, termasuk didalamnya kawasan Minapolitan seluas kurang lebih 530,95 ha terdiri atas: (1) perikanan budidaya air tawar meliputi jenis ikan introduksi dan jenis ikan lokal tersebar di setiap kecamatan; (2) perikanan budidaya air laut meliputi ikan, udang, kepiting, kerang-kerang, serta rumput laut di Kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Takisung, Kurau, dan Bumi Makmur; dan (3) perikanan budidaya air payau meliputi udang, bandeng dan kepiting terdapat di Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Takisung, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Kintap. Kawasan pengolahan hasil perikanan meliputi industri kecil rumah tangga berbasis minapolitan terdapat di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan; dan Kawasan konservasi seluas kurang lebih 3.080,09 ha yang terdapat di Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung, dan Kecamatan Kurau.

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan Tahun 2021 kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebesar 88,29 persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang. Nilai kesesuaian ruang merupakan perpaduan keterwujudan dan keselarasan pemanfaatan ruang yang setidaknya terdiri atas aspek struktur ruang dan pola ruang. Nilai tersebut merupakan hasil audit kesesuaian tata ruang yang dilakukan secara periodik setiap tahun.

Tabel 2.116 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019-2021

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Tanah Laut (%)	65	70	78	87	97

Sumber: DPUPRP Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.4.2.2 Luas Wilayah Industri

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 kawasan industri atau pusat kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Kecamatan Jorong. Selain berfungsi sebagai kawasan industri, Kecamatan Jorong juga berfungsi sebagai pusat kawasan industri berat dan pusat kawasan pertambangan. Kawasan ekonomi khusus ini dibentuk untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, impor, dan perdagangan dalam rangka mendorong perekonomian suatu wilayah. Lebih dari itu kawasan ekonomi khusus juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah, dan juga membangun daya saing dengan memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki. Sedangkan kawasan industri bertujuan untuk mengendalikan tata ruang, meningkatkan upaya industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri dan investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait. Komoditi unggulan industri pengolahan adalah industri pengolahan makanan yang memiliki jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan nilai produksi terbanyak di Kabupaten Tanah Laut. Walaupun jumlah investasi dan nilai produksi terbesar berada di Kecamatan Bati-Bati lalu setelah itu disusul oleh kecamatan Jorong. Namun demikian, dengan adanya penetapan Kecamatan Jorong sebagai kawasan industri diharapkan kedepannya mampu bersaing dengan Kecamatan Bati-Bati.

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 10.878,50 ha yang terdiri atas kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah, dan kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga. Rencana Kawasan peruntukan industri besar meliputi industri pertambangan dan perkebunan di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap. Rencana kawasan peruntukan industri menengah terdiri dari pengembangan industri pengolahan dan industri pertanian di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang dan pengembangan industri pengolahan hasil laut sebagai penunjang minapolitan di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang. Rencana kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan, karena selain dapat memberikan keuntungan kepada penanam modal, penanaman modal juga berfungsi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk menyusun kebijakan yang mendorong penguatan daya saing perekonomian nasional. Investasi asing dan domestik yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan, salah satu caranya adalah dengan memberikan kemudahan perizinan dalam proses pembuatan administrasi investasi.

2.1.4.3.1 Proses Perizinan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan panduan terkait proses perizinan di Kabupaten Tanah Laut. Panduan pelayanan tersebut ditujukan untuk kemudahan akses dan kepastian perizinan bagi kegiatan Penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan Dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Tanah Laut, telah ditetapkan berbagai perizinan dalam memulai usaha di Kabupaten Tanah Laut. Proses perizinan tersebut telah ditampilkan pada situs resmi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut di alamat http://dpmpptsp.tanahlautkab.go.id/website/web/page/40/informasi_izin. Jenis dan jumlah perizinan yang ada di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 2.117 Rekapitulasi Izin Terbit dan Retribusinya menurut Jenis Permohonan Izin di Kabupaten Tanah Laut, 2022

Jenis Permohonan Izin	Jumlah	Retribusi (Rp)
Persetujuan Bangunan Gedung/PBG	122	931,579,507
Izin Reklame	119	
Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	18	
Surat Keterangan Penelitian	141	
Izin Peternakan	5	
Izin Usaha Toko Swalayan	14	
Izin Apotek	4	
Izin Operasional Klinik	1	
Izin Operasional Puskesmas	2	
Izin Praktek Perawat	307	

Jenis Permohonan Izin	Jumlah	Retribusi (Rp)
Izin Praktek Apoteker	40	
Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	40	
Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	29	
Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	63	
Izin Praktek Tenaga Psikologi Klinis	1	
Izin Praktek Tenaga Anestesi	2	
Izin Praktek Tenaga Gizi	16	
Izin Praktek Dokter	183	
Izin Praktek Bidan	233	
Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	10	
Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien	1	
Surat Izin Kerja Sanitarian	35	
Surat Izin Kerja Promotor Kesehatan	13	
Surat Izin Kerja Fisioterapis	2	
Surat Izin Kerja Tenaga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	14	
Surat Izin Kerja Radiografer	5	
Surat Izin Kerja Tenaga Opukasi Terapi	1	
Surat Izin Praktek Dokter Hewan	2	
Surat Izin Operasional PAUD	91	
Surat Izin Praktek Tenaga Promotor Kesehatan dan Ilmu Perilaku	13	
Surat Izin Kerja Terapis Wicara	2	
Surat Izin Praktek Elektromedis	1	
Izin Pengumpulan Uang dan Barang	3	
Izin Hiburan	3	
Sertifikat Laik Higine Depo Air Minum	1	
Sertifikat Laik Higine Depo Sanitasi Jasa Boga	1	
Surat Keterangan Tatat Ruang	105	
Surat Keterangan Berusaha Perorangan	509	39,060,000
Surat Keterangan Berusaha CV	183	65,880,000
Surat Keterangan Berusaha PT	132	118,800,000
Sertifikast Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	61	
Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	39	
Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	1	
TOTAL	2568	1,155,319,507

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

2.1.4.3.2 Angka Kriminalitas

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah tindak pidana kejahatan yang masuk di Kejaksaan Negeri Pelaihari.

**Tabel 2.118 Jumlah Tindak Pidana Kejahatan yang Masuk di
Kejaksaan Negeri Pelaihari, 2020-2022**

Jenis Tindak Pidana	Tahun		
	2020	2021	2022
Umum	102	88	75
Ekonomi	5	-	-
Subversi	-	-	-
Korupsi	3	6	4
Narkotika	117	112	124
Imigrasi	-	-	-
Senjata api atau tajam	13	12	21
Lain-lain	35	36	39
TOTAL	275	254	263

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Tanah Laut diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah.

2.1.4.4.1 Rasio Ketergantungan

Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah. Pada tahun 2022, angka ketergantungan di Tanah Laut mencapai 47,07 persen meningkat dari tahun 2021 sebesar 46,88 persen. Angka ini berarti bahwa secara rata-rata setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 orang penduduk usia tidak produktif. Hal ini dengan asumsi bahwa setiap penduduk usia 15-64 tahun benar-benar dapat produktif. Jika usia produktif tidak dapat diberdayakan untuk benar-benar produktif secara ekonomi atau hanya

menjadi pengangguran, maka justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan sosial diantaranya kesenjangan sosial dan kerawanan sosial.

Tabel 2.119 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
0-14 tahun	97,884	98,401	94,829	95,559	96,672
15-64 tahun	226,648	230,082	237,828	241,248	245,494
65+	14,663	7,624	16,309	17,533	18,878
Rasio Ketergantungan (%)	49.66	46.08	46.73	46.88	47.07

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023 (diolah)

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022

2.2.1. Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019 – 2022

Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019-2022 berisi perbandingan target dan realisasi yang tujuan dan sasaran daerah yang dilaksanakan berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2018-2023. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 12 Tujuan Daerah dengan 12 Indikator Tujuan dan 25 Sasaran Daerah dengan 47 Indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Angka realisasi indikator tujuan dan sasaran daerah pada RPJMD 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.120

Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022

Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		2022		2023	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		2022		2023
		T	R	T	R	T	R	T	R				T	R	T	R	T	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Misi 1: BERKARYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA																					
Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68	69,04	68,5	69,38	68,7	69,87	68,9	70,35	70,1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	7,97	7,64	8,06	7,88	9	7,89	10	7,90	12
												Harapan lama sekolah	12,83	11,96	13,12	12,01	13,41	12,31	13,7	12,32	14
													Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja	500	1669	500	787	500	999	500
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,3	69,04	68,5	69,38	68,7	69,87	68,9	70,35	70,1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	68,9	69,31	69,1	69,45	69,3	69,59	69,6	69,86	69,8
												Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tujuan masyarakat	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		2022		2023	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		2022		2023	
		T	R	T	R	T	R	T	R				T	R	T	R	T	R				
Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	82,73	80	84,59	76.5 (Baik)	84,56	77.5 (Baik)	85.65	80 (Baik)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	2,2	2,99	1,48	2,81	1,38	2,32	1,2	2,12	1,1	
												Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil	100	100	100	100	100	100	100	98,78	100	
													Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATE N) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
													Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi	Cakupan Pelestarian dan Penge	100	100	100	100	100	100	100	100



Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		2022		2023	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		2022		2023	
		T	R	T	R	T	R	T	R				T	R	T	R	T	R				
											generasi muda dan olah raga	mbangan Budaya daerah (%)										
												Indeks Pembangunan Pemuda	45,7	NA	45,9	NA	46	NA	46,5	NA	46,75	
												Jumlah Atlet yang berprestasi	62	138	68	61	74	136	81	534	89	
											Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Misi 2: MENCIPTAKAN INOVASI DI SEGALA SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI																						

Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		2022		2023	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		2022		2023
		T	R	T	R	T	R	T	R				T	R	T	R	T	R			
Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan inovasi public	1	0	1 penghargaan	0	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	1 inovasi	5 inovasi	2 inovasi	5 inovasi	2 inovasi	6 Inovasi	2 inovasi	10 Inovasi	2 inovasi
Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	5	10	25	25	15 Unit Usaha	103 Unit Usaha	20 Unit Usaha	134 unit usaha	25 Unit Usaha	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	4 Unit Usaha	5 Unit Usaha	7 unit usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha
											Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	25 Unit Usaha	15 Unit Usaha	103 Unit Usaha	20 Unit Usaha	134 unit usaha	25 Unit Usaha
MISI 3: MEMBANGUN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)																					
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	60	53	64	56,21	62 (Baik)	60,06	63 (Baik)	60,19	64 (Baik)	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah	BB	B	BB (74)	B (65.88)	BB (77.00)	B	A (81)	B	A (81)



Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		2022		2023	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		2022		2023			
		T	R	T	R	T	R	T	R				T	R	T	R	T	R						
yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi											reformasi pelayanan publik	(kategori)												
												Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P
											Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik	11,9	16	23,81	23,73	35,71	55,87	47,62	58,98	59,52			
											Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)	15	40	15	40	20	40	25	40	25			



Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		2022		2023	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		2022		2023
		T	R	T	R	T	R	T	R				T	R	T	R	T	R			
MISI 4: MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS DAN RELIGIUSITAS DALAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT																					
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarmasyarakat beragama (kasus)	0	2	0	3	0	0	0	0	0
											Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan	11 Kec.	11 Kec.	11 Kec.	11 Kec.	11 Kec.	10 Kec.	11 Kec.	10 Kec.
MISI 5: MEMBANGUN SINERGITAS YANG BAIK ANTARTINGKAT PEMERINTAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																					
Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan	4,39	4,51	4,35	4,26	4,37	4,57	4,36	3,86	4,35	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,85	3,76	4,90	-1,99	4,95	3,47	5	5,12	5,05
												Indeks Gini (skor)	0,257	0,271	0,256	0,252	0,255	0,232	0,254	0,263	0,253
													PDRB per kapita (ADHK)	31,5	30,16	33,07	29,12	34,73	29,67	36,81	30,62



Tujuan	Indikat or Tujuan	2019		2020		2021		2022		2023	Sasaran	Indikat or Sasara n	2019		2020		2021		2022		2023
		T	R	T	R	T	R	T	R				T	R	T	R	T	R			
											Meningkatny a peranan perempuan dalam pembanguna n daerah	Indeks Pembana ngunan Gender (skor)	88, 25	86, 96	88,5 0	87,1 9	88,7 5	86,8 6	89,0 0	87, 28	89,5 0
											Menurunnya tingkat penganggura n	Tingka t Pengan gguran Terbuk a (%)	3,3	3,4 1	3	3,57	2,8	3,52	2,6	4,1 7	2,5
											Meningkatny a perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah	150	151 ,36	135 (Sed ang)	105. 9 (sed ang)	130 (Sed ang)	105, 95 (Sed ang)	125 (Sed ang)	156	120 (Sed ang)
											Persentase Penyele saian Gangguan Ketente raman dan Keterti ban Umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
											Persentase PMKS yang menjad i mandir i (%)	12, 5	9,3 6	15	6,98	20	56,3 2	25	13, 32	30	

Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		2022		2023	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		2022		2023
		T	R	T	R	T	R	T	R				T	R	T	R	T	R			
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,5	51,95	73	53	71	54,66	72	58,12	73	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	38	59,61	43	67,55	64	64,61	80	73,48	85
												Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	84	84	87	84	93	67	97	68,07	100
												Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	65	32,74	70	38,90	73	42,18	75	71,91	80
												Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak (%)	25	51,70	30	52,29	35	53,28	40	73,45	45
MISI 5: MEMBANGUN SINERGITAS YANG BAIK ANTARTINGKAT PEMERINTAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																					

Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		2022		2023	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		2022		2023
		T	R	T	R	T	R	T	R				T	R	T	R	T	R			
Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan sektor unggulan daerah	5,02	6,81	5,06	-4,82	5,04	11,27	5,05	13,66	5,06	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0%	100	327	120	501	125	602	130	309	135
												Pertumbuhan sektor Pertanian	3,5	3,42	3,51	-0,34	3,52	1,81	3,53	2,7	3,57
												Pertumbuhan sektor Industri Olahan	7,56	2,63	7,57	-4,48	7,58	5,01	7,59	3,86	7,6
												Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah	280,000	346,366	285,000	330,241	290,000	193,671	300,000	219,258	350,000



Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		2022		2023	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		2022		2023
		T	R	T	R	T	R	T	R				T	R	T	R	T	R			
											Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Keterseediaan	95	81,5	95	82,8	95	84,1	95	90,7	95
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,21	58,06	60,58	69,71	60,96	68,70	61	67,78	61,71	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	60,21	58,06	60,58	69,71	60,96	68,70	61,34	67,78	61,71
												Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	70	74,19	78	82,66	87	87	92	97	98
Peningkatan Upaya Membina Desa dan Menata Kota	Indeks Desa Membangun	0,715 (Maju)	0,67 (berkembar)	0,73	0,67 (berkembar)	0,750 (Maju)	0,68357	0,800 (Maju)	0,707	0,815	Meningkatnya Pembinaan Desa	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahan baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
												Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tujuan	Indikat or Tujuan	2019		2020		2021		2022		2023	Sasaran	Indikat or Sasara n	2019		2020		2021		2022		2023
		T	R	T	R	T	R	T	R				T	R	T	R	T	R			
												Membangun									
												Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat	26	26	26	9	26	25	26	29	20
												Jumlah Desa di bina berciri khas	5	5	5	5	5	6	5	7	5
												Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	12	0,51	10	0,44	7	0,33	3	0,21	1
												Persentase penataan pasar Pelaihari (%)	20	20	35	20	50	50	60	61,97	80

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanah Laut, 2023



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dibutuhkan analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Kapasitas keuangan daerah harus diketahui, agar daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien. Analisis proyeksi pendapatan daerah untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis kinerja keuangan Kabupaten Tanah Laut didasarkan pada data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah terjadi perubahan struktur APBD baik klasifikasi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan struktur APBD ini dilaksanakan mulai tahun 2021. Pada struktur pendapatan, dana perimbangan yang sebelumnya sebagai satu dari tiga sumber pendapatan daerah berubah menjadi pendapatan transfer. Sedangkan klasifikasi belanja yang sebelumnya menggunakan belanja langsung dan tidak

langsung, mulai tahun 2021 menggunakan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2018 – 2022

3.1.1.1. Pendapatan Daerah 2018 – 2022

Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah retribusi daerah, penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun pendapatan dari dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari bantuan/hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kemudian berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020, pendapatan terdiri atas PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Transfer terjadi perubahan klasifikasi dan nomenklatur menjadi terdiri atas transfer Pemerintah Pusat transfer antar daerah.

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan dengan melihat angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam merencanakan upaya mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah di periode tahun 2024-2026. Secara umum, realisasi pendapatan tahun 2018-2022 tumbuh fluktuatif dengan rata-rata tumbuh sekitar 15.92 %. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 terdapat penurunan pertumbuhan pendapatan sebesar -13.77% dan -5.63%. Hal ini dipengaruhi oleh faktor adanya dampak pandemi Covid19 pada sektor kesehatan dan ekonomi pada tahun 2020 dan berlanjut pada tahun 2021 yang kemudian turut berpengaruh negatif pada sektor penunjang pendapatan daerah lain.

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan Kabupaten Tanah Laut kembali tumbuh sebesar 62.98%. Pertumbuhan yang signifikan ini di pengaruhi oleh pertumbuhan dari sector pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang disebabkan adanya kenaikan

harga pada komoditi batubara sehingga nilai Dana Bagi Hasil (DBH) dari minerba untuk Kabupaten Tanah Laut juga mengalami peningkatan. Berikut Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022.



Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	REALISASI				
		2018	2019	2020	2021	2022
4.	Pendapatan Daerah	1,557,958,101,932.69	1,871,377,390,246.69	1,613,752,681,343.77	1,522,901,390,516.55	2,482,006,283,475.42
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	128,454,917,428.69	169,786,229,529.69	189,603,069,628.77	206,135,630,695.55	195,702,609,139.42
4.1.1	Pajak Daerah	32,602,101,845.60	46,690,546,865.00	44,576,818,515.00	43,638,422,656.00	45,360,252,091.80
4.1.2	Retribusi Daerah	6,875,885,025.00	9,291,225,414.00	7,526,749,567.00	5,743,153,528.80	6,971,598,007.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,090,537,348.00	4,875,963,913.00	7,441,598,663.00	9,836,676,685.00	11,010,810,384.00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	76,886,393,210.09	108,928,493,337.69	130,057,902,883.77	146,917,377,825.75	132,359,948,656.62
4.2	Pendapatan Transfer	1,177,983,858,093.00	1,425,729,934,305.00	1,208,327,752,561.00	1,274,449,541,251.00	2,284,116,824,131.00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,177,983,858,093.00	1,425,729,934,305.00	1,104,360,025,851.00	1,174,467,043,937.00	2,102,498,603,378.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	103,967,726,710.00	99,982,497,314.00	181,618,220,753.00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	251,519,326,411.00	275,861,226,412.00	215,821,859,154.00	42,316,218,570.00	2,186,850,205.00
4.3.1	Pendapatan Hibah	38,468,125,704.00	43,486,483,289.00	45,778,129,162.00	3,203,438,570.00	2,186,850,205.00
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	111,500,961,007.00	126,127,028,123.00	-	-	-
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	101,550,239,700.00	106,247,715,000.00	170,043,729,992.00	-	-
4.3.4	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	39,112,780,000.00	-

Sumber: BPKAD Kab. Tanah Laut dan Bapenda Kab. Tanah Laut

3.1.1.2. Belanja Daerah 2018 – 2022

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan belanja daerah harus mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif. Pengelolaan belanja mempunyai tiga tujuan pokok yang ingin dicapai, yaitu menjamin dijalkannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan anggaran dan prioritas anggaran, serta menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Manajemen belanja akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah daerah seperti : *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*.

Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah terjadi perubahan klasifikasi belanja yang dilaksanakan mulai tahun 2021. Klasifikasi belanja tahun 2018-2020 menggunakan klasifikasi belanja langsung dan tidak langsung, sedangkan mulai tahun 2021 menggunakan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2018-2022 sebagaimana tabel 3.2.

Dari tabel 3.2 dapat diketahui bahwa dari tahun 2018-2022 total realisasi belanja cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8.08%. tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar -0.51% dibanding tahun 2021. Adapun yang menjadi permasalahan terjadinya penurunan realisasi belanja pada tahun 2022 ialah penurunan anggaran belanja modal yang turun sekitar 10,28%.

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	REALISASI				
		2018	2019	2020	2021	2022
5	BELANJA	1,402,145,107,254.60	1,529,922,060,481.93	1,535,660,520,668.00	1,894,067,926,592.83	1,884,443,618,556.92
5.1	BELANJA OPERASI	918,123,211,595.00	1,024,112,435,866.43	1,002,473,431,818.00	1,214,778,642,853.00	1,261,936,463,809.92
5.1.1	Belanja Pegawai	529,298,574,555.00	599,817,380,945.45	578,446,294,875.00	639,840,569,796.56	653,956,945,688.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	340,305,425,187.00	383,442,460,125.98	392,824,218,663.00	505,996,286,092.44	535,215,605,700.92
5.1.5	Belanja Hibah	44,812,877,853.00	33,938,431,795.00	25,056,029,030.00	53,691,496,964.00	50,347,412,421.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3,706,334,000.00	6,914,163,000.00	6,146,889,250.00	15,250,290,000.00	22,416,500,000.00
5.2	Belanja Modal	307,362,098,369.60	265,871,491,410.50	208,749,071,699.00	443,098,788,114.83	397,530,685,207.00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1,991,742,240.00	489,647,680.00	5,545,262,443.00	2,897,145,120.00	240,492,000.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55,028,340,628.60	66,562,503,550.50	58,400,912,689.00	87,589,675,673.00	91,424,179,792.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107,310,189,019.00	38,765,044,000.00	44,763,996,794.00	125,469,046,825.83	104,788,622,560.00
5.2.3	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	141,299,345,482.00	158,176,590,680.00	98,075,489,148.00	226,307,789,870.00	200,681,712,555.00
5.2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	170,846,500.00	399,190,500.00	280,695,625.00	835,130,626.00	395,678,300.00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1,561,634,500.00	1,478,515,000.00	1,682,715,000.00	-	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	769,814,040.00	12,987,367.00	84,356,731,883.00	6,471,571,965.00	746,426,000.00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	769,814,040.00	12,987,367.00	84,356,731,883.00	6,471,571,965.00	746,426,000.00
5.4	Belanja Transfer	175,889,983,250.00	239,925,145,838.00	240,081,285,268.00	229,718,923,660.00	224,230,043,540.00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3,348,893,350.00	4,565,993,650.00	4,376,364,987.00	5,183,544,470.00	4,895,286,950.00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	172,541,089,900.00	235,359,152,188.00	235,704,920,281.00	224,535,379,190.00	219,334,756,590.00

Sumber : BPKAD Kab. Tanah Laut

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah 2018 – 2022

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi apabila ada selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Realisasi pembiayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 3.3

Dari tabel pembiayaan daerah dapat dilihat bahwa, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan untuk persiapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. Selain itu juga pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk pemberian pinjaman daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat (Pengelola Program Gapura Karomah) dalam rangka menjalankan program Ungulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut yakni Program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah.

Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	REALISASI				
		2018	2019	2020	2021	2022
6.1	Penerimaan Pembiayaan	436,894,591,211.49	591,805,608,669.58	922,210,305,934.34	996,156,725,010.11	610,994,644,033.83
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	436,894,591,211.49	591,688,396,169.58	922,160,938,434.34	990,302,466,610.11	604,990,188,933.83
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	5,747,184,400.00	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	2,750,000.00	6,230,000.00	-	-
6.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	114,462,500.00	43,137,500.00	-	-
6.1.8	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	107,074,000.00	6,004,455,100.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000.00	11,100,000,000.00	10,000,000,000.00	20,000,000,000.00	75,000,000,000.00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	15,000,000,000.00	40,000,000,000.00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00	-	-	25,000,000,000.00
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00

Sumber: BPKAD Kab. Tanah Laut

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi: (1) aset; (2) kewajiban; dan (3) ekuitas dana, yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening.

3.1.2.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan kedalam Aset Lancar (*current asset*) dan Aset Non Lancar/Tetap (*long-term asset*). Nilai aset Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif. Meningkat dari tahun 2018 sampai 2020 dan pada tahun 2021 terjadi penurunan jika dibandingkan pada tahun 2020. Penurunan aset ini didominasi oleh penurunan aset lancar yang signifikan yakni 1,1 Trilyun pada tahun 2020 menjadi 0.75 Trilyun pada tahun 2021. Penurunan aset lancar ini disebabkan adanya penggunaan SILPA untuk membiayai belanja. Pada tahun 2022 jumlah Aset Kabupaten Tanah Laut kembali mengalami peningkatan ke angka 5,2 T yang sebelumnya berada pada angka 4.3 T. peningkatan ini didominasi oleh peningkatan pada aset lancar dan aset tetap.

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan atau lembaga lain. Selain itu, kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dikelompokkan kedalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada periode tahun 2018-2022, rata-rata pertumbuhan kewajiban daerah Kabupaten yaitu -19,26 persen per tahun, dimana seluruh kewajiban berasal dari komponen Kewajiban Jangka Pendek. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar -40,81 persen. Pada tahun 2022, total kewajiban dalam neraca daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar 24,89 miliar rupiah, yang berarti jumlah aset lebih besar dibandingkan jumlah kewajiban daerah.

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dan kewajiban, dalam hal ini adalah ekuitas dana pemerintah daerah. Dalam periode tahun 2018-2022, rata-rata pertumbuhan ekuitas sebesar 9,73 persen per tahun. Pada tahun 2022, jumlah ekuitas dana Kabupaten Tanah Laut sebesar 5,14 triliun rupiah dengan pertumbuhan 21,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.4. Neraca Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	570,689,893,413.58	897,463,840,437.32	962.569.200.331,74	541.773.574.626,45	682,055,520,320.29
Kas di Bendahara Penerimaan	2,655,000.00	0,00	10.138.500,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	1,967,519.00	0,00	0,00	(600,000.00)
Kas di BLUD	14,621,786,674.00	15,900,308,907.00	25.115.999.257,35	59.162.059.397,36	65,761,548,698.67
Kas Dana BOS	2,256,535,682.00	4,876,795,550.02	2.607.128.521,02	4.054.554.910,02	3,626,594,575.05
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	4,136,720,425.00	3,918,026,021.00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	320,910,840,856.00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piutang Pajak Daerah	16,971,519,291.55	17,581,104,108.00	15.397.452.464,00	16.310.176.319,00	16,305,385,290.00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	1.664.854.010,00	428.041.500,00	745,077,500.00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	22.971.330.675,12	57.002.494.023,12	26,753,317,823.12
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	33.707.093.343,00	24.817.804.050,00	24,817,804,050.00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	36.380.662.390,51	49.896.491.243,53	49,896,491,243.53
Piutang Lainnya	43,368,148,008.37	63,666,142,843.34	897.850.000,00	816.850.000,00	2,192,318,100.00
Penyisihan Piutang	(15,798,836,890.13)	(16,425,739,191.59)	(19.951.441.320,99)	(22.295.734.650,46)	(22,268,003,247.02)
Beban Dibayar Dimuka			0,00	0,00	
Persediaan	21,368,207,701.70	17,530,376,815.31	24.154.425.103,16	27.714.368.100,41	15,289,250,118.19
JUMLAH ASET LANCAR	657,616,629,306.07	1,004,512,823,009.40	1.105.524.693.274,91	759.680.679.519,43	1,186,857,395,327.83
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	18,739,137,716.00	18,714,774,716.00	3.078.018.750,00	2.519.656.250,00	2,519,656,250.00
Investasi Permanen Lainnya	0,00		0,00	0,00	153,429,374,355.60
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	18,739,137,716.00	18,714,774,716.00	3.078.018.750,00	2.519.656.250,00	155,949,030,605.60
Investasi Jangka Panjang Permanen					
Penyertaan Modal	92,573,516,919.58	123,593,952,808.29	120.738.040.350,37	117.587.676.158,88	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00		0,00	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	92,573,516,919.58	123,593,952,808.29	120.738.040.350,37	117.587.676.158,88	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen dana bergulir					
Penyisihan INV dana bergulir	(1,981,175,000.00)	(2,094,531,250.00)			
JUMLAH Penyisihan Investasi Non Permanen dana bergulir	(1,981,175,000.00)	(2,094,531,250.00)			
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	109,331,479,635.58	140,214,196,274.29	123.816.059.100,37	120.107.332.408,88	
ASET TETAP					
Tanah	763,558,446,638.72	764,386,153,777.36	810.833.152.356,52	808.616.413.726,52	808,856,905,726.52
Peralatan dan Mesin	336,263,216,331.30	416,488,002,712.91	485.555.599.058,47	570.096.134.486,45	660,977,264,608.45
Gedung dan Bangunan	798,460,586,174.33	1,104,077,219,513.07	1.120.868.287.443,68	1.234.545.603.141,78	1,326,788,276,462.78
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,789,162,261,572.80	1,948,758,096,478.60	2.113.229.213.765,78	2.334.275.258.255,78	2,533,969,318,138.78
Aset Tetap Lainnya	4,647,510,145.00	5,365,105,145.00	4.756.568.345,00	4.796.764.345,00	4,813,312,645.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	280,742,238,568.40	11,204,494,768.40	18.600.746.970,50	24.530.347.182,50	35,656,594,275.50
Akumulasi Penyusutan	(982,163,847,642.09)	(1,179,522,634,043.41)	(1.373.871.439.146,44)	(1.578.848.367.158,06)	(1,578,848,367,158.06)
JUMLAH ASET TETAP	2,990,670,411,788.46	3,070,756,438,351.94	3.179.972.128.793,51	3.398.012.153.979,97	3,792,213,304,698.97
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	56,160,390,391.32
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	56,160,390,391.32
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	83,293,041.54	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	598,994,421.60	746,692,775.60	5.829.769.010,52	7.556.204.010,52	7,935,334,010.52
Aset Lain-lain	36,981,582,764.63	33,526,050,172.17	39.434.801.554,64	27.764.661.333,35	41,101,173,549.35
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	(4.809.910.060,12)	(5.526.751.385,32)	(5,526,751,385.32)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1,179,522,634,043.41)	(982,163,847,642.09)	(15.417.681.991,23)	(13.971.547.000,94)	(13,971,547,000.94)
JUMLAH ASET LAINNYA	37,663,870,227.77	34,272,742,947.77	25.036.978.513,81	15.822.566.957,61	29,538,209,173.61
JUMLAH ASET	3,795,282,390,957.88	4,249,756,200,583.40	4.434.349.859.682,60	4.308.622.732.865,88	5,220,718,330,197.33
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1,212,702,734.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	234,552,031.60	318,265,371.82	258.884.183,40	218.646.756,26	177,187,297.08
Utang Belanja	85,937,910.00	8,335,140,348.00	2.803.131.333,00	5.599.125.149,25	2,884,650,162.71
Utang Jangka Pendek Lainnya	192,863,194,143.00	106,407,335,129.00	74.986.673.320,00	71.837.958.686,00	71,837,958,686.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	194,396,386,818.60	115,060,740,848.82	78.048.688.836,40	77.655.730.591,51	74,899,796,145.79
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
JUMLAH KEWAJIBAN	194,396,386,818.60	115,060,740,848.82	78.048.688.836,40	77.655.730.591,51	74,899,796,145.79
EKUITAS					
EKUITAS	3,600,886,004,139.28	4,134,695,459,734.58	4.356.301.170.846,21	4.230.967.654.054,38	5,145,818,534,051.54
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3,795,282,390,957.88	4,249,756,200,583.40	4.434.349.859.682,61	4.308.623.384.645,89	3,866,557,593,505.10

Sumber: BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio (Tabel 3.5). Analisis rasio keuangan dianalisis diantaranya terdiri dari Rasio Lancar (*current ratio*), Rasio Cepat (*quick ratio*), Rasio Total Hutang terhadap Total Aset, dan lainnya. Dalam hal ini, yang digunakan dalam analisis rasio keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022 adalah Rasio Lancar (*current ratio*), Rasio Total Hutang terhadap Total Aset, dan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset. Rasio Lancar merupakan perbandingan antara Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek, yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar Kewajiban Jangka Pendek. Nilai rasio lancar Kabupaten Tanah Laut dalam periode tahun 2018-2022 bernilai sedang, dengan rata-rata pertumbuhan 62,84 persen per tahun dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 158,07 persen. Pada tahun 2018, nilai rasio lancar sebesar 3,38 dan mengalami peningkatan hingga menjadi 15,85 pada tahun 2022. Tingginya nilai rasio lancar menunjukkan bahwa nilai aset melampaui kewajiban jangka pendek, sehingga daerah memiliki kemampuan yang tinggi dalam membayar kewajibannya.

Selanjutnya, Rasio Total Hutang terhadap Total Aset menunjukkan perbandingan antara jumlah seluruh kewajiban dan jumlah seluruh aset. Dalam periode tahun 2018-2022, nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Tanah Laut sangat rendah, yang berarti bagian aset yang digunakan untuk membayar kewajiban juga sangat kecil. Pada tahun 2018, Rasio Total Hutang terhadap Total Aset sebesar 0,05 tetapi terus menurun hingga menjadi sebesar 0,01 pada tahun 2022. Sedangkan Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas menunjukkan kemampuan modal pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban. Nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas hampir sama dengan nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset, yang disebabkan nilai aset dan ekuitas yang hampir sama kecuali pada tahun 2022. Dalam analisis rasio keuangan, Rasio Lancar (*current ratio*) termasuk dalam analisis Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*), yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendek. Sedangkan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset maupun Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas termasuk dalam analisis Rasio Solvabilitas, yang dimaksudkan untuk mengukur perbandingan dana yang harus dikeluarkan untuk membayar kewajiban terhadap aset maupun modal yang dimiliki. Dengan demikian, berdasarkan analisis Neraca Daerah dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tanah Laut memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik, sehingga perlu dipertahankan maupun ditingkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

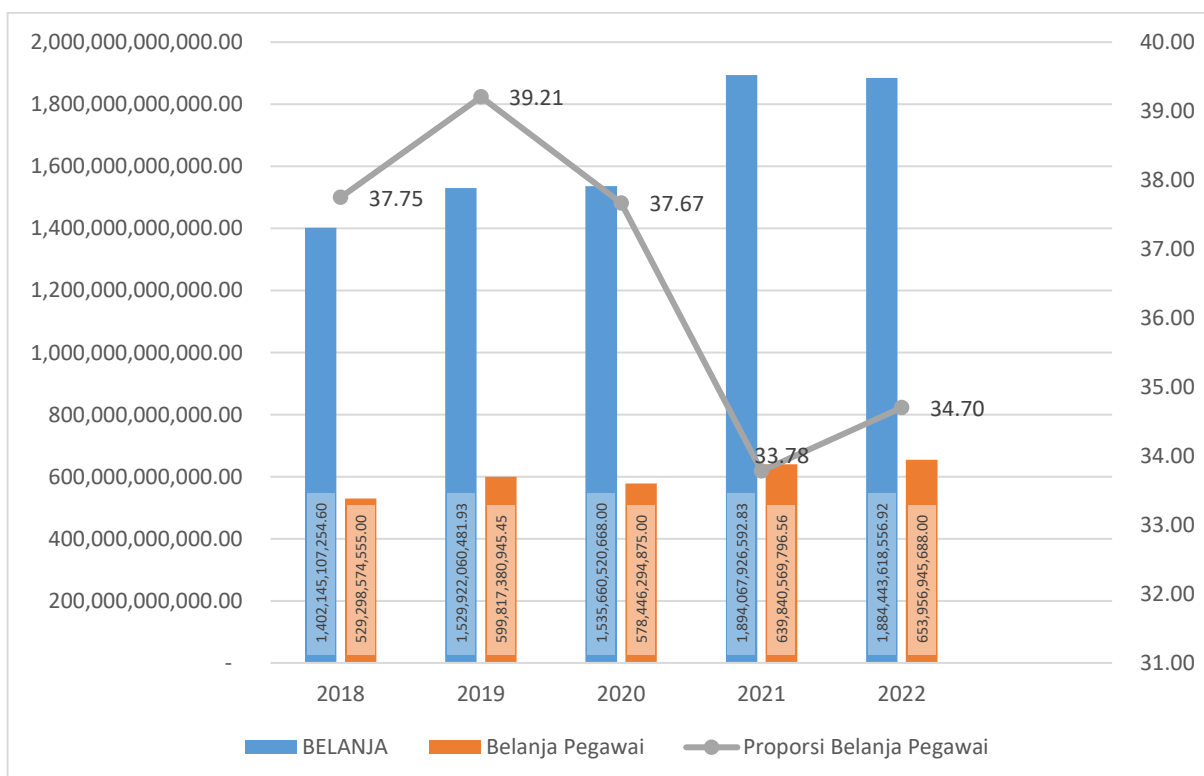
Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata pertumbuhan
Rasio likuiditas						
Rasio Lancar	3.38	8.73	14.16	9.78	15.85	62.84
Rasio Solvabilitas						
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	-25.03
Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	-18.05

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut, khususnya Belanja Pegawai. Proporsi Belanja Pegawai dapat menunjukkan apakah penggunaan keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi Belanja Pegawai maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya, semakin rendah proporsi Belanja Pegawai maka semakin tinggi penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah.



Sumber: BPKAD Kab. Tanah Laut (diolah)

Gambar 3.1 Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah bersifat fluktuatif, dimana nilai proporsinya berkisar antara 33-40 persen dan pada tahun 2022 proporsinya sudah mencapai di angka 34, persen yang mendekati angka 30 %. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya agar proporsi belanja pegawai tidak melebihi 30 % sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengamanatkan proporsi belanja pegawai maksimal 30% dari Total belanja pada APBD.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut ditinjau berdasarkan surplus ataupun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti Pendapatan Daerah lebih besar daripada Belanja Daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti Belanja Daerah lebih besar daripada Pendapatan Daerah. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut dalam periode tahun 2018-2022 selalu mengalami surplus kecuali pada tahun 2021 yang mengalami deficit sebesar -371,16 milyar. Pada tahun 2018, surplus di Kabupaten Tanah Laut sebesar 155,81 miliar rupiah. Terakhir Angka surplus tersebut meningkat pada tahun 2023 sebesar 597,56 miliar.

Tabel 3.6 Defisit/Surplus Anggaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	REALISASI				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Daerah	1,557,958,101,932.69	1,871,377,390,246.69	1,613,752,681,343.77	1,522,901,390,516.55	2,482,006,283,475.42
2	BELANJA	1,402,145,107,254.60	1,529,922,060,481.93	1,535,660,520,668.00	1,894,067,926,592.83	1,884,443,618,556.92
	Surplus/Defisit	155,812,994,678.09	341,455,329,764.76	78,092,160,675.77	- 371,166,536,076.28	597,562,664,918.50

Sumber: BPKAD Kabupaten Tanah Laut



3.3 kerangka Pendanaan

3.3.1 proyeksi keuangan

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut bergantung pada anggaran selama tiga tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan history pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah. Perkiraan Pendapatan Daerah disajikan secara indikator dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Tabel 3.7 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

KODE REKENING	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2		3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1,761,088,881,265.00	1,869,868,143,468.00	1,872,842,207,121.82	1,975,263,001,636.94
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	223,171,641,465.00	229,873,663,359.00	251,257,614,672.22	273,013,479,359.34
4.1.01	Pajak Daerah	49,171,000,000.00	50,448,644,721.00	53,729,859,055.22	55,064,717,248.34
4.1.02	Retribusi Daerah	11,946,804,500.00	8,822,778,361.00	9,400,181,231.00	9,978,328,288.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,330,112,415.00	24,381,144,967.00	24,381,144,967.00	24,381,144,967.00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	148,723,724,550.00	146,221,095,310.00	163,746,429,419.00	183,589,288,856.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,536,761,239,800.00	1,639,994,480,109.00	1,621,584,592,449.60	1,702,249,522,277.60
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,414,901,539,800.00	1,489,620,427,173.00	1,437,588,817,545.09	1,479,154,169,882.64
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,305,543,438,800.00	1,489,620,427,173.00	1,437,588,817,545.09	1,479,154,169,882.64
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	548,181,440,800.00	800,779,821,173.00	745,374,496,795.09	746,117,900,657.64
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	512,108,210,000.00	579,582,505,000.00	582,956,219,750.00	623,778,168,225.00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	71,785,665,000.00	-	-	-
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	173,568,123,000.00	-	-	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	109,258,101,000.00	109,258,101,000.00	109,258,101,000.00	109,258,101,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121,859,700,000.00	150,374,052,936.00	183,995,774,904.51	223,095,352,394.96
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	121,859,700,000.00	150,374,052,936.00	183,995,774,904.51	223,095,352,394.96
5	BELANJA DAERAH	2,255,548,951,409.00	2,109,960,165,785.00	2,062,413,017,642.42	2,069,612,824,883.94
5.01	BELANJA OPERASI	1,434,964,476,863.00	1,305,357,382,882.00	1,273,405,586,547.82	1,274,457,606,219.96

KODE REKENING	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2		3	4	5
5.02	BELANJA MODAL	557,346,687,055.00	526,381,306,976.00	515,603,254,410.61	517,403,206,220.99
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	22,172,915,145.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
5.04	BELANJA TRANSFER	241,064,872,346.00	253,221,475,927.00	248,404,176,684.00	252,752,012,443.00
	Belanja Bagi Hasil	6,111,780,450.00	5,927,142,309.00	6,313,004,029.00	6,504,304,554.00
	Belanja Bantuan Keuangan	234,953,091,896.00	138,036,232,618.00	132,833,071,655.00	136,989,606,889.00
	Total Surplus/(Defisit)	- 494,460,070,140.00	- 240,092,022,317.00	- 189,570,810,520.61	- 94,349,823,247.00
6	PEMBIAYAAN				
6.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	552,779,266,935.00	440,092,022,317.00	189,570,810,520.61	94,349,823,247.00
6.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	58,318,896,928.00	200,000,000,000.00	-	-
	Pembiayaan Netto	494,460,370,007.00	240,092,022,317.00	189,570,810,520.61	94,349,823,247.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	299,863.00	0.00	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Tanah Laut

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Dengan demikian, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan Permasalahan pembangunan daerah pada hakikatnya menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan dengan cita-cita pembangunan.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat diantisipasi/diminimalisir dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan. Untuk itu diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah. Perumusan permasalahan pembangunan daerah sangat berkaitan dengan tahapan atau rumusan dalam Bab – Bab selanjutnya dalam penyusunan dokumen RPD ini, yaitu pada tahapan perumusan Isu strategis Daerah, Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan dan sampai pada perumusan Program Perangkat Daerah yang selanjutnya akan di jabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

NO	ASPEK PERMASALAHAN	ANALISA PERMASALAHAN
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
1.1	Pertumbuhan ekonomi	Struktur Ekonomi di Kabupaten Pada Tahun 2022 masih di dominasi oleh sector pertambangan dan penggalian. Hal ini akan menjadi permasalahan serius di masa mendatang, mengingat pertambangan merupakan sumber daya yang bersifat <i>non renewable resources</i>
1.2	PDRB Perkapita (ADHB)	Capaian PDRB Perkapita di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berada pada angka 52.678 Juta Rupiah. Angka ini masih dibawah PDB Perkapita Nasional 71 Juta Rupiah dan PDRB Perkapita Provinsi Kalimantan Selatan 60,08 Juta Rupiah.
1.3	Angka kemiskinan	Kemiskinan masih menjadi permasalahan pokok di kabupaten Tanah Laut. Selama Periode 2018 sampai 2022. Angka kemiskinan di kabupaten tanah laut berfluktuatif. Terakhir pada tahun 2022 berada pada angka 3.86% yang mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya. Walaupun angka kemiskinan terjadi penurunan, tetapi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus tetap mengatasi karena ketidakpastian ekonomi global yang tidak menentu yang bisa menyebabkan angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut meningkat.
1.4	IPM	Nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sebesar 70.35 atau berada pada urutan ke-7 dari seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, serta masih dibawah nilai indeks pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional
1.5	Gini Ratio	Angka Gini Ratio di Kabupaten Tanah Laut Pada tahun 2022 lebih tinggi jika dibanding dengan angka pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan tingkat kesejangan pendapatan masyarakat di kabupaten tanah laut lebih tinggi dibanding tahun kemarin.
2	ASPEK PELAYANAN UMUM	
2.1	Pendidikan	<p>Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sebesar 7,90 tahun atau masih dibawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 8,34 Tahun dan Nasional yaitu 8,54.</p> <p>Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sebesar 12,32 tahun atau masih dibawah angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 12,81 Tahun dan Nasional 13,10 Tahun.</p>
2.2	Kesehatan	Angka Kematian Bayi pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi di tahun 2022, yaitu 10 per 1.000 kelahiran hidup. Melihat masih tingginya angka kematian bayi mengindikasikan belum optimalnya kualitas kesehatan terutama ibu dan bayi.
2.3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	<p>Masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak. Capaian persentase rumah tangga yang terakses sanitasi layak pada tahun 2022 baru 73,45% sedangkan untuk air minum baru 71.89%.</p> <p>Belum semua irigasi dalam kondisi baik. Persentase irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berada pada angka 68.07%</p> <p>Belum Semua Jalan Berkondisi Mantap. Pada tahun 2022 capaian jalan dalam kondisi mantap baru 73,48 %.</p> <p>Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dengan RTRW Kabupaten belum optimal, data capaian tahun 2022 adalah 97%.</p>
2.4	Perumahan dan pemukiman	Masih terdapatnya wilayah kumuh dikabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2022 luasan permukiman kumuh mencapai 1478,49 Ha.

NO	ASPEK PERMASALAHAN	ANALISA PERMASALAHAN
		Masih Terdapat Rumah Dalam Kondisi Tidak Layak Huni (RTLH). Adapun jumlah seluruh rumah di Kota Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sebanyak 104,234 sehingga masih terdapat 3,575 unit rumah dalam kondisi tidak layak huni. Rumah tidak layak huni ini perlu segera diintervensi oleh Pemerintah Kota, karena hal ini mempengaruhi kelayakan dan keamanan dari bangunan tempat tinggal masyarakat. Dukungan dan kerjasama dari sektor swasta pun dibutuhkan dalam penyediaan rumah layak huni sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).
2.5	Lingkungan hidup	<p>Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Laut selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini bisa terlihat pada IKLH Kab. Tanah Laut. IKLH pada tahun 2022 berada pada angka 67,78. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada angka 68,7.</p> <p>Berdasarkan data dari BNPB Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 masuk kedalam kategori "Tinggi", dengan nilai 156. Bencana tahunan yang sering terjadi Kabupaten Tanah Laut yaitu banjir, tanah longsor, angin puting beliung serta kebakaran hutan dan lahan.</p>
2.6	Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 meningkat di angka 4,17%. Meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,52%.
2.7	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Angka Pernikahan dini di Kabupaten Tanah Laut tergolong tinggi. Berdasarkan data Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sebanyak 137 orang perempuan berusia dibawah 19 tahun.
2.8	Pangan	Di Kabupaten Tanah Laut masih memiliki desa rentan ketersediaan pangan. Berdasarkan data pada tahun 2022, ada 20 desa yang kategori tinggi, 20 desa kategori 20 desa, dan 28 desa kategori rendah.
2.9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa kategori Mandiri masih sedikit. Pada Tahun 2022 baru ada 8 desa mandiri dari 130 desa.
2.1	Perhubungan	<p>Status Pelabuhan Pelaihari yang ada di kawasan Industri Jorong masih "Pengumpan Lokal".</p> <p>moda angkutan Banjarbakula ke ibu kota Kabupaten Tanah Laut belum tersedia</p> <p>Belum tersedianya terminal tipe C yang Definitif. Rencana pembangunan baru dilaksanakan pada tahun 2022</p>
2.11	Komunikasi dan Informatika	Masih terdapat daerah blankspot di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan data pada tahun 2022 ada 34 titik blank spot, yaitu Kecamatan Bajuin 4 titik, Kecamatan Batu Ampar 5 titik, Kecamatan Bumi Makmur 3 titik, Kecamatan Jorong 3 titik, Kecamatan Pelaihari 6 titik, Kecamatan Takisung 12 titik, dan Kecamatan Tambang Ulang 1 titik.
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	Kabupaten Tanah Laut masih sedikit memiliki sarana dan prasarana olahraga yang representatif. Apalagi direncanakan Kabupaten Tanah Laut menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025, Sehingga memerlukan venue dan persiapan sarana prasarana olahraga yang representatif.
2.14	Kearsipan	Kualitas pengelolaan kearsipan di Kabupaten Tanah Laut masih rendah, berdasarkan data dari ANRI, Indeks Kearsipan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berada pada angka 61,29
2.15	Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mencapai 65.031 ton dan produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 1.415 ton Jumlah produksi ini tidak sebanding dengan potensi sungai dan danau serta lahan basah yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas budidaya ikan .
2.16	Pertanian	Produksi hasil pertanian selama lima tahun terakhir fluktuatif kecenderungan menurun. Pada tahun 2022 produksi padi di kabupaten tanah laut berada pada angka 143.962 ton menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 145.890 ton. Begitu juga dengan produksi jagung yang terjadi penurunan.

NO	ASPEK PERMASALAHAN	ANALISA PERMASALAHAN
2.17	Perdagangan	Pengelolaan pasar di Kabupaten Tanah Laut masih secara konvensional masih belum menjadi pasar modern.
2.18	Perindustrian	Belum terbangunnya Kawasan Industri Jorong yang merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020
2.19	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 masih dalam kategori "B".
2.20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut masih dalam kategori "B".
2.21	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut masuk dalam kategori "Inovatif" namun dengan nilai yang belum memuaskan yaitu 52,12 dari 100.
2.22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 berada pada kategori "Sangat Perlu Perbaikan" dengan nilai 49,8. Kontribusi Pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan dalam pendanaan pembangunan daerah masih rendah. Pada tahun 2022 kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 7.88%. bahkan angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu yakni sebesar 13.53%.
3	ASPEK DAYA SAING	
3.1	Investasi	Belum operasionalnya Kawasan Industri Jorong yang merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020. Sehingga pertumbuhan investasi belum maksimal. Diharapkan dengan terealisasinya KIJ ini akan menarik para investor baik itu yang PMDN maupun PMA.
3.2	Pariwisata	Sampai saat ini belum ada kerjasama dengan pihak ketiga/investor dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Tanah Laut sehingga berimbas pada pengelolaan pariwisata di Tanah Laut. Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 mencapai 219.258. Angka ini masih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu strategis yang ditelaah oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berasal dari analisis permasalahan pembangunan daerah serta memperhatikan isu-isu pembangunan global, nasional, dan global yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Berikut ini adalah isu strategis yang dirumuskan dari permasalahan pembangunan.

1. Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan

Mewujudkan suatu bangsa yang berkualitas bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan strategi khusus sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas. Pendidikan menjadi aspek penting yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja, oleh karena itu, Kabupaten Tanah Laut harus memiliki strategi yang tepat untuk menunjang tingkat pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua masyarakat. Selain itu juga Peningkatan Kualitas Kesehatan merupakan modal dasar dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam pemerataan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat mampu mengakses dan memenuhi kebutuhan kesehatan. Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Maka, harus ada pembangunan kesehatan dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemajuan hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Di sisi lain, adanya kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang kesehatan juga dapat memberikan kemajuan terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Dengan terjadinya kemajuan kesehatan, maka memberikan peningkatan pula terhadap derajat kesehatan di Kabupaten Tanah Laut.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menilai perkembangan suatu daerah. Hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai dan bersifat inklusif maka distribusi kesejahteraan akan terjadi. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat. Salah satu sector yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi menjadi bagian yang penting bagi suatu daerah, mengingat investasi akan memberikan dampak perekonomian yang baik apabila terkelola dengan baik terhadap daerah.

Selain itu juga, dengan adanya Pemindahan Ibu kota Negara ke Kalimantan Timur yang tengah direncanakan oleh pemerintah ternyata memiliki dampak ekonomi pada daerah baru tersebut. Pemindahan ibu kota ke lokasi baru ke Kalimantan diharapkan dapat memberikan efek positif karena adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum dimanfaatkan serta diprediksi akan meningkatkan perekonomian daerah di wilayah Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur ini membutuhkan dukungan logistik kepada IKN dari wilayah sekitarnya termasuk Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga memerlukan persiapan penyangga pangan baru.

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan juga diharapkan akan berperan sebagai *hinterland* pemasok kebutuhan logistik pangan kepada IKN di Kalimantan Timur, salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi sentra produksi pangan adalah Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut memiliki produk-produk pertanian yang sangat banyak seperti perkebunan, hortikultura dan peternakan disamping potensi perikanan tangkap. Diharapkan dengan mulai berjalannya roda pemerintahan di IKN baru nantinya, tidak mendatangkan pangan dari wilayah lain di luar Pulau Kalimantan dan kebutuhan pangan dapat diproduksi masyarakat Kalimantan Selatan sendiri, sehingga, ibu kota negara baru akan menuju kemandirian pangan. Untuk menyediakan kebutuhan logistik kepada IKN diperlukan persiapan penggunaan dan pemanfaatan ruang untuk kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan dengan menggunakan teknologi pertanian modern serta menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul untuk menopang kebutuhan tenaga kerja di IKN.

3. Infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

Proses pembangunan memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu: (a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok; (b) Peningkatan standar hidup; dan (c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2006) dalam Warsilan dan Noor (2015:1). Salah satu upaya untuk mewujudkan ketiga tujuan pembangunan tersebut ialah dengan melalui pembangunan infrastruktur, mengingat pembangunan infrastruktur akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pemberdayaan sumber daya untuk membangun infrastruktur, sehingga akan memicu proses ekonomi yang berdampak kepada timbulnya penggandaan ekonomi maupun sosial, Setiadi (2006) dalam Warsilan dan Noor (2015:1).

Selain itu pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup merupakan isu yang menjadi perhatian utama. Sehingga perlu ada upaya untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, baik itu terkait dengan kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan.

4. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang bersih, professional dan dapat merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Penerapan reformasi birokrasi

dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, diharapkan dapat mewujudkan percepatan Reformasi Birokrasi di setiap Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah Laut. Aspek pembangunan Ekonomi

dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan. Sedangkan aspek pembangunan Tata Kelola Pemerintahan adalah aspek yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Selengkapnya proses perumusan konsep RPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Sandingan Dokumen Konsideran dan Isu Strategis dalam Perumusan Konsep Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2026	MISI RPJPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2005-2025	ISU STRATEGIS KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026	RPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing • Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Akseibilitas Pendidikan dan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan • Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan • Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar • Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata • memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian • meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada pengembangan industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata • Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi • infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan ketertiban serta penerapan sistem otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJMD Prov. Kalimantan Selatan 2021-2026, RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2005-2025, Diolah 2023

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing”. Makna dari “Berdaya saing” mengandung arti suatu kemampuan dan kemampuan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing aspek kemudian dielaborasi menjadi 3 tujuan dengan 19 sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (*cross cutting issue*). Penjabaran tujuan dan sasaran tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
				2022 (REALISASI)	2023 (PROYEKSI)	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		IPM	70,35	70,4 - 70,72	70,80	71	71,30	71,30
	1.1	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,32	12,35	12,37	12,39	12,4	12,4
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,90	7,95	8,05	8,15	8,25	8,25
	1.2	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	69,86	69,94	69,96	69,98	70,00	70,00
	1.3	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase pemuda berprestasi	22,22	30	40	45	50	50
			Persentase atlet berprestasi	86,97	85	85	90	95	95
	1.4	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	87,28	87,30	87,32	87,34	87,36	87,36
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan		Pertumbuhan Ekonomi	5,12	4,5 - 5,0	4,6 - 5,0	4,7 - 5,0	4,8 - 5,0	4,8 - 5,0
			Gini Ratio	0,263	0,230	0,229	0,228	0,227	0,227
			Angka Kemiskinan	3,86	3,55	3,45	3,35	3,30	3,30
	2.1	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	2,70	3,80	2,85	2,9	2,95	2,95
	2.2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	3,86	3,48	3,52	3,55	3,58	3,58
	2.3	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	7,10	4,81	4,9	4,95	5,0	5,0
	2.4	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (akomodasi dan Makan Minum)	6,54	12,10	11,75	11,70	11,70	11,70
	2.5	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	83,91	5	5	5	5	5

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
				2022 (REALISASI)	2023 (PROYEKSI)	2024	2025	2026	
2.6	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas		Indeks Infrastruktur	43,64	47,11	47,91	54,21	60,49	60,49
2.7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		IKLH	67,78	68,47	68,57	68,67	68,77	68,77
			Indeks Resiko Bencana	156,33	153,2	150,1	147	144	144
2.8	Meningkatnya kemandirian PPKS		Persentase PPKS yang Mandiri	13,32	15	17,5	20	22,5	22,5
2.9	Meningkatnya ketahanan pangan		Indeks Ketahanan Pangan	82,06	82,3	82,6	82,8	83	83
2.10	Menurunnya tingkat pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,17	3,55	3,45	3,35	3,30	3,30
2.11	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa		Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	0.707	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	60,19 (Baik)	61	62	63	65	65
3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	67.28 (B)	69.00 (B)	70.01 (BB)	75.00 (B)	80.01 (A)	80.01 (A)
3.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	49,38 (SPP)	61 (PB)	66 (PB)	71 (PB)	76 (Baik)	76 (Baik)
3.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah		Indeks Pelayanan Publik	4,53 / A	4,53 / A	4,54 / A	4,55 / A	4,57 / A	4,57 / A
3.4	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	3,11	3,15	3,2	3,4	3,6	3,6

PENYELARASAN INDIKATOR MAKRO

Sebagai salah satu amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 memperhatikan penyelarasan target indikator makro pada RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026. Berikut penyelarasan indikator makro tersebut.

Tabel 5.3 Penyelarasan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Kalsel, dan Kab. Tanah Laut

Indikator Makro Pembangunan	RPJMN 2020 - 2024	RPJMD Kalsel 2021-2026			RPD Tanah Laut 2024-2026		
	2024	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2 – 6,5	5,2 - 6,0	6,0 - 6,24	6,24 - 6,5	4,6 - 5,0	4,7 - 5,0	4,8 - 5,0
Persentase Penduduk miskin (%)	6,0 – 7,0	4,40 - 4,22	4,22 - 4,05	4,05 - 3,77	3,45	3,35	3,30
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,6 – 4,3	4,05	3,88	3,71	3,45	3,35	3,30
Indeks Pembangunan Manusia	75,54	72,65	73,05	73,50	70,80	71,00	71,30
Gini Ratio	0,360 – 0,374	0,324	0,322	0,310	0,229	0,228	0,227

Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJMD Prov. Kalimantan Selatan 2021-202

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026 adalah sebagaimana tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Strategi dan arah kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			
	1.1	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan	Meningkatkan Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, PAUD, dan Kesetaraan	Memenuhi Sarana, Prasarana Bangunan Sekolah yang memadai dan layak guna
				Melaksanakan pendidikan bagi warga belajar di PKBM
			Meningkatkan jumlah Sekolah yang terakreditasi	Menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan
				Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD
			Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan	Melaksanakan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan, Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan
	1.2	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
				Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat
	1.3	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda	Peningkatan Kapasitas dan daya saing Kepemudaan agar dapat partisipasi Aktif dalam pembangunan daerah (Sosial, Politik dan Ekonomi), melalui Fasilitasi Ruang Kreasi

NO	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif
				Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan, olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan organisasi olah raga
	1.4	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera	Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
				Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Peningkatan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan
				Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender
				Perwujudan Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Pemenuhan Hak Anak (PHA)
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan			
	2.1	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	Peningkatan Penyediaan prasarana dan pemanfaatan teknologi pertanian

NO	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Penyediaan benih yang memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga)
				Penyediaan akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan
			Meningkatkan populasi dan produksi peternakan	Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak
				Peningkatan populasi dan produktivitas ternak.
				Meningkatkan ketersediaan dan produksi pakan ternak.
				Menjamin produk hewani yang ASUH dan berdaya saing.
				Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari ikan	Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil
				Penyediaan Akses nelayan/pembudidaya ikan terhadap permodalan, teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2.2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Memperkuat pertumbuhan ekonomi di sektor industri
			Peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang dan mampu mengakses pasar
			Melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
			Melaksanakan pembinaan, pendampingan monitoring dan evaluasi Sentra IKM
	2.3	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Memperkuat pertumbuhan ekonomi di perdagangan
			Peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah
			Peningkatan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
			Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah
			Peningkatan kualitas kinerja Koperasi dan UMKM naik kelas
			Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM secara lintas sektor dan mengedepankan kemitraan
	2.4	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Meningkatkan upaya pengembangan destinasi, promosi dan kelembagaan pariwisata daerah
			Pengembangan pemasaran pariwisata
			Pengembangan destinasi pariwisata prioritas

NO	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif
	2.5	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing	Peningkatan peluang dan potensi serta promosi investasi/penanaman modal di daerah, berbasis potensi lokal
				Peningkatan kualitas pelayanan Penanaman modal
				Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta
	2.6	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan kualitas layanan Air Minum dan Perumahan layak di perkotaan dan perdesaan	Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten
				Penyediaan Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana
				Penyediaan akses dan peningkatan system penyediaan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan di perkotaan maupun perdesaan.
			Meningkatkan kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan dan perdesaan	Penyediaan Infrastruktur persampahan

NO	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase dan sistem air limbah domestik di perkotaan dan perdesaan
			Meningkatkan Jaringan jalan, jembatan, sarana dan prasarana transportasi secara merata dan berkualitas untuk konektivitas wilayah	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Tanah Laut
				Peningkatan kinerja pelayanan sarana dan prasarana perhubungan
				Penyediaan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan
			Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah dan pertanahan	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah
				Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan
2.7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat dengan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle

NO	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/ integrasi pemda dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah	Percepatan penyusunan Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana daerah serta Integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah
	2.8	Meningkatnya kemandirian PPKS	Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor	Validasi Data Penduduk Miskin, rentan miskin serta data penerima penerima bantuan
				Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Inovasi "GAMIS" (Gerakan Atasi Kemiskinan)
				Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Kelembagaan Kesos dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
				Peningkatan Upaya Pemberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosia Bagi PMKS.
				Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
	2.9	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat	Peningkatan Infrastruktur pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan
	2.10	Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi

NO	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Melaksanakan peningkatan Produktivitas pada Perusahaan
			Meningkatkan Penempatan tenaga kerja	Menyediakan informasi pasar kerja dan pencari kerja
				Melaksanakan penyuluhan bimbingan jabatan dan perluasan kesempatan kerja
			Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Melaksanakan hubungan industrial yang kondusif di perusahaan
	2.11	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	meningkatkan status atau kelas desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)			
	3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.	Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan.
				Penerapan Satu data Tanah Laut
				penguatan sistem inovasi daerah
			Meningkatkan pengawasan, transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan level Maturitas SPIP
				Peningkatan Level Kapabilitas APIP
				Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
				Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah
	3.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah
	3.3 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	Peningkatan kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha
			Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan
			Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik
			Peningkatan kompetensi, profesionalitas dan disiplin ASN serta budaya kerja
			Modernisasi/Digitalisasi system dan manajemen pelayanan publik
			Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
			Peningkatan kualitas e-procurement
			Peningkatan kualitas Layanan pada kecamatan
		Meningkatnya penataan peraturan perundangundangan daerah dan penegakan Perda.	Peningkatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	3.4 Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-Government



Berdasarkan Strategi dan arah Kebijakan sebagaimana di atas, perlu dirumuskan Tema dan prioritas pembangunan tahunan daerah yang akan diturunkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap Tahun Anggaran berjalan selama periode 2024 – 2026. Berikut Tema dan prioritas Pembangunan tahunan daerah pada rencana pembangunan daerah kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Tabel 6.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah

Tahun	Tema Pembangunan	Prioritas Pembangunan
2024	Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia dengan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan daya saing sumber daya manusia 2. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi. 3. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik 4. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2025	Peningkatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	
2026	Pemantapan Perekonomian Daerah melalui Pembangunan yang Berkelanjutan	

Penentuan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 sangat berkaitan dengan perumusan permasalahan pembangunan daerah dan penentuan Isu Strategis Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026, sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV sebelumnya. Oleh sebab itu 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah termaksud di atas memiliki keterkaitan dengan Isu Strategis Daerah sebagaimana Tabel Berikut.

Tabel 6.3 Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan daerah

Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2026

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
Aksebilitas Pendidikan dan Kesehatan	Pemantapan daya saing sumber daya manusia
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

6.2 Program Prioritas Daerah

Guna mengimplementasikan masing-masing kebijakan pembangunan dan arah pencapaian kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran daerah, maka disusun program-program prioritas daerah beserta indikatornya. Berikut program prioritas daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditampilkan pada table berikut.

Tabel 6.4 Program Prioritas Daerah

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		IPM	Nilai	70,35	70,4 - 70,72	70,80	71	71,30	71,30	
	1.1	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,32	12,35	12,37	12,39	12,4	12,4	
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,90	7,95	8,05	8,15	8,25	8,25	
	1.1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	44,30	44,32	44,34	44,36	44,38	44,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	107,1	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	90,30	90,31	90,32	90,33	90,34	90,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,50	99,51	99,52	99,53	99,54	99,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	91,80	91,81	91,82	91,83	91,84	91,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Putus Sekolah SD	Persen	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Putus Sekolah SMP	Persen	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PAUD minimal terakreditasi B	Persen	62,96	63	64	65	66	66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Penyelenggaraan PAUD HI	Persen	34	36	38	40	42	42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
				Persentase Sekolah Terakreditasi A SD	Persen	2	2	2,1	2,2	2,3	2,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Sekolah Terakreditasi A SMP	Persen	9,7	10	10,1	10,2	10,3	10,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PKBM yang terakreditasi minimal B	Persen	50	51	52	53	54	54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.1.2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	Persen	47	50	60	70	80	80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.1.3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Siswa Per Guru	Rasio	20	20	20	20	20	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.1.4	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yg memiliki Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persen	26	40	57	77	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.5	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno yang di lestarikan	Persen	0	0	33	67	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.6	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Adat Tradisi dan Budaya yang dilestarikan	Persen	50	55	60	65	70	70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.1.7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku Seni yang Dibina	Persen	42	48	65	70	75	75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.1.8	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Peninggalan Sejarah yang Dilindungi	Persen	50	60	70	80	90	90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.1.9	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Obyek Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	37	45	50	60	70	70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.2	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan		Angka Harapan Hidup	Tahun	69,86	69,94	69,96	69,98	70,00	70,00	

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
	1.1.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	76,4	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
			Persentase FKTP yang Terakreditasi Minimal Madya	Persen	60	63	87	100	100	100	Dinas Kesehatan
			Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi Minimal Madya	Persen	80	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	1.2.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar	Persen	80,95	83	86	90	95	95	Dinas Kesehatan
	1.2.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Apotik, Toko Obat dan Optical yang Memiliki Izin	Persen	84	91	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
			Persentase TPP (Tempat Pengolahan Pangan) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar	Persen	56	56	62	68	74	74	Dinas Kesehatan
	1.2.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	53	55	60	65	70	70	Dinas Kesehatan
	1.2.5	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	Anak	2,12	2,1	2,08	2,07	2,05	2,05	DP2KBP3A
	1.2.6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	Persen	76,31	76,6	77	77,2	77,5	77,5	DP2KBP3A

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
	1.2.7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	72,92	34,53	54,37	73,96	79,01	79,01	DP2KBP3A
	1.4	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase pemuda berprestasi	Persen	22,22	30	40	45	50	50	
			Persentase atlet berprestasi	Persen	86,97	85	85	90	95	95	
	1.4.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Orang	4	7	7	7	7	7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	1.4.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Orang	200	220	300	300	300	300	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	1.4.3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	1.5	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,28	87,30	87,32	87,34	87,36	87,36	
	1.5.1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelompok Organisasi Perempuan yang Dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	DP2KBP3A
	1.5.2	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio	0,008	0,007	0,006	0,005	0,004	0,004	DP2KBP3A

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
	1.5.3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di FAD Kabupaten dan Kecamatan	Persen	16	25	50	75	100	100	DP2KBP3A
	1.5.4	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Anak dari Tindakan kekerasan yang ditinjau lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	DP2KBP3A
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan		Pertumbuhan Ekonomi		5,12	4,5 - 5,0	4,6 - 5,0	4,7 - 5,0	4,8 - 5,0	4,8 - 5,0	
			Gini Ratio		0,263	0,230	0,229	0,228	0,227	0,227	
			Angka Kemiskinan		3,86	3,55	3,45	3,35	3,30	3,30	
	2.1	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan		2,70	3,80	2,85	2,9	2,95	2,95	
	2.1.1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	Persen	N/A	10	15	20	25	25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Hortikultura	Persen	N/A	10	15	20	25	25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	Persen	N/A	10	15	20	25	25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
				Persentase Sarana Peternakan dalam Kondisi Fungsional	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2.1.2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	Persen	N/A	N/A	30	40	60	60	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Perkebunan	Persen	N/A	N/A	5	10	15	15	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Persentase pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	N/A	N/A	25	35	45	45	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Persentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Fungsional	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2.1.3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Angka Kematian Hewan Ternak	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2.1.4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Area Terdampak OPT dan DPI Yang Tertangani Pada Tanaman Pertanian	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		2.1.5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang diRekomendasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
	2.1.6	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian Yang Terlatih	Persen	N/A	12,5	15,6	16,2	16,2	16,2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Jumlah Desa Kawasan Ternak (Sapi Potong dan Itik)	Desa	0	0	2	4	6	6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	2.1.7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	65,013	66,006	66,997	68,002	69,022	69.022	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.1.8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1415	1,360	1,436	1,457	1,479	1,479	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.1.9	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	65,013	66,006	66,997	68,002	69,022	69.022	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.1.10	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Hasil Olahan Perikanan	persen	2,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan		3,86	3,48	3,52	3,55	3,58	3,58	
	2.2.1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	2.2.2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Industri Terdaftar SiiNas	Persen	60	85	90	95	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
	2.2.3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data Industri yang Masuk ke dalam SiiNas dan Sistem Informasi Data Industri	Persen	98	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	2.3	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan		7,10	4,81	4,9	4,95	5,0	5,0	
	2.3.1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Distribusi Pasar	Persen	N/A	0,77	1,08	1,77	2,04	2,04	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
	2.3.2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	N/A	96,61	96,61	98,31	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
	2.3.3	Program Pengembangan Ekspor	Persentase promosi pelaku usaha untuk orientasi ekspor	Pelaku Usaha	N/A	6,67	6,67	8,57	10	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
	2.3.4	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku usaha yang tertib UTPP	Persen	N/A	67,38	67,94	68,57	69,51	69,51	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
	2.3.5	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku UMK yang menggunakan produk dalam Negeri	Persen	N/A	68,18	68,18	75,76	90,91	90,91	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
	2.3.6	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Derajat Kepatuhan Berkoperasi	Persen	N/A	4,44	6,38	8,00	9,26	9,26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
	2.3.7	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam KSP/USP yang dinilai sehat	Persen	N/A	2,27	2,27	4,44	8,51	8,51	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
	2.3.8	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan perkoperasian dan UMK	Persen	N/A	7,25	81,62	85	85,56	85,56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
	2.3.9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Kecil (UMK) yang Terfasilitasi Perizinan dan Kemitraan	Persen	3,90	4	4,13	4,14	4,33	4,33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
	2.4	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata		6,54	12,10	11,75	11,70	11,70	11,70	
	2.4.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Potensi Wisata Alam yang Dikembangkan	Obyek Wisata	0	0	1	2	1	4	Dinas Pariwisata
	2.4.2	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	295,000	490,000	500,000	510,000	520,000	1,530,000	Dinas Pariwisata
	2.4.3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Terbentuk	Ekosistem	N/A	N/A	2	2	2	6	Dinas Pariwisata
	2.4.4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	Orang	45	45	180	180	180	180	Dinas Pariwisata
	2.5	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	83,91	5	5	5	5	5	
	2.5.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai minat investasi berdasarkan lokasi sektor	Pelaku Usaha	N/A	25	25	25	25	75	Dinas Penanaman Modal dan



NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
												Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.5.2	Program Promosi Penanaman Modal	Investor yang menanamkan modal	Investor	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.5.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	Izin	2568	2600	2650	2700	2750	2750	2750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase Izin Usaha yang Terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.5.4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang dibina	Persen	N/A	20	20	20	20	20	20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.5.5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan informasi penanaman modal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.6	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	Nilai	43,64	47,11	47,91	54,21	60,49	60,49	60,49	
	2.6.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Area yang Dilayani Irigasi	Persen	75,65	77,38	78,73	87,09	87,09	87,09	87,09	Dinas Pekerjaan Umum,

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
												Penataan Ruang dan Pertanahan
				Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	68,08	69,17	71,11	73,11	74,65	74,65	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
				Persentase Kawasan Daerah Aliran Sungai yang Terlindungi Daya Rusak Air	Persen	13,30	13,35	15,80	17,80	19,50	19,50	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
				Persentase Kawasan Pesisir yang Terlindungi Daya Rusak Air	Persen	26,46	46,21	49,67	53,72	54,76	54,76	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2.6.2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Layak	Persen	71,89	75	78	82	86	86	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2.6.3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sanitasi Layak	Persen	73,45	75	78	82	86	86	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2.6.4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	4,86	5,51	5,70	6,10	6,40	6,40	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
												Ruang dan Pertanahan
	2.6.5	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Jumlah Bangunan Gedung Terbangun di Wilayah Daerah Kab/Kot	Persen	0,114	0,2	0,286	0,372	0,456	0,456		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	2.6.6	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	73,48	85	85	85	85	85		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	2.6.7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Layanan Jasa Konstruksi	Persen	0	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	2.6.8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten dengan Pemanfaatan Ruang	Persen	25,08	63,43	85,47	100	24,03	24,03		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	2.6.9	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Kelompok Masyarakat, Organisasi, Lembaga dan Perusahaan di Lingkup Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	100	100	100	100	100		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	2.6.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
											Ruang dan Pertanahan
	2.6.11	Program Pengembangan Perumahan	Persentase capaian pemenuhan pelayanan dasar perumahan	Persen	0	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	2.6.12	Program Kawasan Permukiman	Persentase capaian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	2.6.13	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase capaian Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	2.6.14	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase capaian Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
	2.6.15	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalulintas	Nilai	0,17	0,2	0,25	0,35	0,35	0,35	Dinas Perhubungan
			Persentase prasarana perhubungan	Persen	0,71	0,68	33,6	66,7	100	100	Dinas Perhubungan
	2.6.16	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
	2.7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	68,37	68,47	68,57	68,67	68,77	68,77	
			Indeks Resiko Bencana	Nilai	156,78	156,7	156,5	156,25	156	156	
	2.7.1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	2.7.2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	2.7.3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase kawasan taman yang dapat dinikmati masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
											Lingkungan Hidup
	2.7.4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	2.7.5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan untuk masyarakat	Penghargaan	0	2	2	2	2	2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	2.7.6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	2.7.7	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan yang ditangani	Persen	0	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	2.7.8	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
2.8	Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri (PPKS)	Persen	13.32	15	17.5	20	22.5	22.5	
	2.8.1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan kesejahteraan sosial	Persen	85	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	2.8.2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial	Persen	45,30	60	75	85	100	100	Dinas Sosial
	2.8.3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persen	38,29	N/A	45	65	85	85	Dinas Sosial
			Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	50	60	70	80	90	90	Dinas Sosial
	2.8.4	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial selama tanggap darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	2.8.5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2.9	Meningkatnya ketahanan pangan		Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	82.06	82.3	82.6	82.8	83	83	

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
	2.9.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Desa mandiri pangan	Desa	1	1	1	1	1	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.9.2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.9.3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	17	16	15	14	13	13	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.9.4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	90	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.10	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka		4,17	3,55	3,45	3,35	3,30	3,30	
	2.10.1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen	13,38	6,5	90	90	90	90	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	2.10.2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Latih yang Terserap Dunia Usaha Dunia Industri	Persen	73,33	73,05	74	74,05	75	75	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat/Berkompeten	Persen	N/A	0,14	0,15	0,16	0,17	0,17	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	2.10.3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen	13,38	6,5	90	90	90	90	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
	2.10.4	Program Hubungan Industrial	Cakupan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	Persen	30	32	34	36	38	38	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2.1	1	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,707	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76	
	2.11.1	Program Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	Persen	N/A	N/A	73	75	80	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.11.2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase peningkatan kerjasama antar desa	Persen	N/A	N/A	80	83	85	85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.11.3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina administrasinya	Persen	N/A	N/A	70	75	80	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.11.4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LAD yang dibina	Persen	N/A	N/A	80	85	90	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase LKD yang dibina	Persen	N/A	N/A	80	85	90	90	
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,19 (Baik)	61	62	63	65	65	
	3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP KABUPATEN	Nilai	67.28 (B)	69.00 (B)	70.01 (BB)	75.00 (B)	80.01 (A)	80.01 (A)	
	3.1.1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target	Persen	NA	76	77	78	79	79	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
				Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		3.1.2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	NA	76	77	78	79	79	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	NA	76	77	78	79	79	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	NA	76	77	78	79	79	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
				Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		3.1.3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Budaya dan Hubungan Organisasi	Level	3	3	3	3	3	3	Inspektorat Daerah
				Level Peran dan Layanan APIP	Level	3	3	3	3	3	3	Inspektorat Daerah
				Level Praktik Profesional	Level	3	3	3	3	3	3	Inspektorat Daerah
		3.1.4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai	2,408	2,408	2,409	2,41	2,411	2,411	Inspektorat Daerah
				Nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MR)	Nilai	2,797	2,797	2,798	2,799	2,8	2,8	Inspektorat Daerah
				Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal 80,1	Persen	15	15	30	40	50	50	Inspektorat Daerah
		3.1.5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai	N/A	88,31	88,32	88,33	88,34	88,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Kesehatan	Nilai	N/A	81.62	82	83	85	85	Dinas Kesehatan
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Nilai	N/A	78	80	81	82	82	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Nilai	N/A	88.9	89	89.1	90	90	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
				Indeks Kepuasan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nilai	N/A	80.1	82	83	85	85	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	N/A	87.7	87.75	87.8	87.8	87.8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Sosial	Nilai	N/A	75	78	80	82	82	Dinas Sosial
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai	N/A	80	85	86	90	90	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai	N/A	83	84	85	86	86	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai	N/A	80.1	82	83	85	85	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	N/A	92	92.15	92.53	92.9	92.9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai	N/A	90	90	90	90	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Perhubungan	Nilai	N/A	80	82	83	85	85	Dinas Perhubungan
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	N/A	82	84	86	88	88	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	Nilai	N/A	85	90	90	95	95	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	N/A	85	90	90	95	95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Nilai	N/A	85	86	87	88	88	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai	N/A	85	85.45	85.55	85.65	85.65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pariwisata	Nilai	N/A	85	90	90	95	95	Dinas Pariwisata

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Nilai	N/A	85	90	90	95	95	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Nilai	N/A	85	90	90	90	90	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
				Indeks Kepuasan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Nilai	N/A	93	93.5	94	94.5	94.5	Sekretariat Daerah
				Indeks Kepuasan Bagian Prokopim	Nilai	N/A	93	93.5	94	94.5	94.5	Sekretariat Daerah
				Indeks Kepuasan Bagian Umum	Nilai	N/A	93	93.5	94	94.5	94.5	Sekretariat Daerah
				Persentase PD dengan Nilai Komponen pelaporan SAKIP minimal 12	Nilai	N/A	50	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
				Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD	Nilai	N/A	80	82	84	86	86	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Nilai	N/A	80	82	84	86	86	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	N/A	85	90	95	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	N/A	86	87	88	89	89	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
				Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	Nilai	N/A	81	82	83	84	84	Badan Pendapatan Daerah
				Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai	N/A	85	86	88	90	90	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Indeks Kepuasan Sekretariat Inspektorat Kabupaten	Nilai	N/A	85	90	95	100	100	Inspektorat Kabupaten
				Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Bajuin	Nilai	N/A	83	83	84	84	84	Kecamatan Bajuin
				Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Bati-Bati	Nilai	N/A	100	100	100	100	100	Kecamatan Bati-Bati
				Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Batu Ampar	Nilai	N/A	85	86	87	88	88	Kecamatan Batu Ampar
				Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Bumi Makmur	Nilai	N/A	100	100	100	100	100	Kecamatan Bumi Makmur
				Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Jorong	Nilai	N/A	83	85	86	87	87	Kecamatan Jorong
				Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Kintap	Nilai	N/A	89	90	91	92	92	Kecamatan Kintap
				Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Kurau	Nilai	N/A	83	83	84	84	84	Kecamatan Kurau



NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
				Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Pelaihari	Nilai	N/A	80.1	82	83	83	83	Kecamatan Pelaihari
				Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Panyipatan	Nilai	N/A	80	82	83	83	83	Kecamatan Panyipatan
				Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Takisung	Nilai	N/A	80	81	82	83	83	Kecamatan Takisung
				Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Tambang Ulang	Nilai	N/A	80.01	82	83	83	83	Kecamatan Tambang Ulang
				Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	N/A	86	87	88	90	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.1.6	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah Inovasi Daerah Yang Nilai Kematangannya Minimal 100	Inovasi	2	3	3	3	3	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		3.1.7	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah SKPD yg mendapatkan nilai pengawasan kearsipan internal dengan nilai B	SKPD	2	4	8	12	16	16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Persentase Hak akses Arsip	Persen	13	37	65	85	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		3.1.8	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persen	0	0	33	67	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	nilai	49,8 (SPP)	61 (PB)	66 (PB)	71 (PB)	76 (Baik)	76 (Baik)	



NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
	3.2.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Penyampaian Dokumen Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Penyampaian Dokumen Penganggaran Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	3.2.2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Penyampaian Neraca Aset Tetap, Aset Lancar berupa Persediaan dan Aset Lainnya yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	3.2.3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	Persen	3,94	8,41	2,60	4,52	4,43	4,43	Badan Pendapatan Daerah

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
			Pesentase peningkatan hasil kekayaan yang dipisahkan	Persen	11,94	21,06	82,90	4,10	7,88	7,88	Badan Pendapatan Daerah
			Pesentase peningkatan lain-lain pendapatan yang sah	Persen	-15,98	20,48	4,22	5,64	12,12	12,12	Badan Pendapatan Daerah
			Pesentase peningkatan retribusi daerah	Persen	21,16	26,46	0,26	2,01	10,87	10,87	Badan Pendapatan Daerah
	3.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Indeks Pelayanan Publik		4,53 / A	4,53 / A	4,54 / A	4,55 / A	4,57 / A	4,57 / A	
		3.3.1 Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,40	99,40	99,60	99,80	99,90	99,90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun yang Memiliki KIA	Persen	53,49	54	55	60	65	65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3.3.2 Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	98,58	98,90	99	99,07	99,10	99,10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3.3.3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase PD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Persen	5	5	5	7,5	10	10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3.3.5 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/ Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
	3.3.6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	3.3.7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	3.3.8	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemberian Bantuan Hibah Kepada Lembaga/Organisasi keagamaan	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
			Persentase Pemenuhan IKK LPPD	Persen	95	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
			Persentase Penyelesaian Produk Hukum Daerah	Persen	85,17	98	90	95	96	96	Sekretariat Daerah
	3.3.9	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Persen	77,9	78	79	79.5	80	80	Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
				Persentase BUMD yang bekinerja Positif dan menghasilkan PAD	Persen	75	75	75	75	75	75	Sekretariat Daerah
				Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang/Jasa	Persen	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	Sekretariat Daerah
		3.3.10	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Disiplin Pegawai ASN Daerah	Nilai	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Nilai Kinerja Pegawai ASN Daerah	Nilai	15,16	26,7	27,2	28,7	29	29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Nilai Kompetensi ASN Daerah	Nilai	15,07	15,5	16,5	18,8	23	23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Nilai Kualifikasi ASN Daerah	Nilai	12,7	12,81	12,81	13,01	13,01	13,01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3.3.11	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Kompetensi ASN Daerah	Nilai	15,07	15,5	16,5	18,8	23	23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
	3.3.12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM Kecamatan Bajuin	Nilai	76,8	83	89	89	90	90	Kecamatan Bajuin
			IKM Kecamatan Bati-Bati	Nilai	88,5	90	90,2	90,5	91	91	Kecamatan Bati-Bati
			IKM Kecamatan Batu Ampar	Nilai	87,25	85	86	87	88	88	Kecamatan Batu Ampar
			IKM Kecamatan Bumi Makmur	Nilai	89,86	92,40	92,50	92,60	92,70	92,70	Kecamatan Bumi Makmur
			IKM Kecamatan Jorong	Nilai	81,3	82	84	85	86	86	Kecamatan Jorong
			IKM Kecamatan Kintap	Nilai	86,28	89	90	91	92	92	Kecamatan Kintap
			IKM Kecamatan Kurau	Nilai	87	90	90,3	90,5	90,7	90,7	Kecamatan Kurau
			IKM Kecamatan Pelaihari	Nilai	87,01	87,05	87,5	88	88,5	88,5	Kecamatan Pelaihari
			IKM Kecamatan Panyipatan	Nilai	84,32	85	86	87	89	89	Kecamatan Panyipatan
			IKM Kecamatan Takisung	Nilai	84,10	90	90,05	90,1	90,15	90,15	Kecamatan Takisung
			IKM Kecamatan Tambang Ulang	Nilai	80,15	80,2	80,25	80,3	80,35	80,35	Kecamatan Tambang Ulang
	3.3.13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	IKM Kecamatan Bajuin	Nilai	76,8	83	89	89	90	90	Kecamatan Bajuin
			IKM Kecamatan Bati-Bati	Nilai	88,5	90	90,2	90,5	91	91	Kecamatan Bati-Bati
			IKM Kecamatan Batu Ampar	Nilai	87,25	85	86	87	88	88	Kecamatan Batu Ampar
			IKM Kecamatan Bumi Makmur	Nilai	89,86	92,40	92,50	92,60	92,70	92,70	Kecamatan Bumi Makmur
			IKM Kecamatan Jorong	Nilai	81,3	82	84	85	86	86	Kecamatan Jorong
			IKM Kecamatan Kintap	Nilai	86,28	89	90	91	92	92	Kecamatan Kintap

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
				IKM Kecamatan Kurau	Nilai	87	90	90,3	90,5	90,7	90,7	Kecamatan Kurau
				IKM Kecamatan Pelaihari	Nilai	87,01	87,05	87,5	88	88,5	88,5	Kecamatan Pelaihari
				IKM Kecamatan Panyipatan	Nilai	84,32	85	86	87	89	89	Kecamatan Panyipatan
				IKM Kecamatan Takisung	Nilai	84,10	90	90,05	90,1	90,15	90,15	Kecamatan Takisung
				IKM Kecamatan Tambang Ulang	Nilai	80,15	80,2	80,25	80,3	80,35	80,35	Kecamatan Tambang Ulang
		3.3.14	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IKM Kecamatan Bajuin	Nilai	76,8	83	89	89	90	90	Kecamatan Bajuin
				IKM Kecamatan Bati-Bati	Nilai	88,5	90	90,2	90,5	91	91	Kecamatan Bati-Bati
				IKM Kecamatan Batu Ampar	Nilai	87,25	85	86	87	88	88	Kecamatan Batu Ampar
				IKM Kecamatan Bumi Makmur	Nilai	89,86	92,40	92,50	92,60	92,70	92,70	Kecamatan Bumi Makmur
				IKM Kecamatan Jorong	Nilai	81,3	82	84	85	86	86	Kecamatan Jorong
				IKM Kecamatan Kintap	Nilai	86,28	89	90	91	92	92	Kecamatan Kintap
				IKM Kecamatan Kurau	Nilai	87	90	90,3	90,5	90,7	90,7	Kecamatan Kurau
				IKM Kecamatan Pelaihari	Nilai	87,01	87,05	87,5	88	88,5	88,5	Kecamatan Pelaihari
				IKM Kecamatan Panyipatan	Nilai	84,32	85	86	87	89	89	Kecamatan Panyipatan
				IKM Kecamatan Takisung	Nilai	84,10	90	90,05	90,1	90,15	90,15	Kecamatan Takisung
				IKM Kecamatan Tambang Ulang	Nilai	80,15	80,2	80,25	80,3	80,35	80,35	Kecamatan Tambang Ulang
		3.3.15	Program Penyelenggaraan Urusan Umum	IKM Kecamatan Bajuin	Nilai	76,8	83	89	89	90	90	Kecamatan Bajuin

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
				IKM Kecamatan Bati-Bati	Nilai	88,5	90	90,2	90,5	91	91	Kecamatan Bati-Bati
				IKM Kecamatan Batu Ampar	Nilai	87,25	85	86	87	88	88	Kecamatan Batu Ampar
				IKM Kecamatan Bumi Makmur	Nilai	89,86	92,40	92,50	92,60	92,70	92,70	Kecamatan Bumi Makmur
				IKM Kecamatan Jorong	Nilai	81,3	82	84	85	86	86	Kecamatan Jorong
				IKM Kecamatan Kintap	Nilai	86,28	89	90	91	92	92	Kecamatan Kintap
				IKM Kecamatan Kurau	Nilai	87	90	90,3	90,5	90,7	90,7	Kecamatan Kurau
				IKM Kecamatan Pelaihari	Nilai	87,01	87,05	87,5	88	88,5	88,5	Kecamatan Pelaihari
				IKM Kecamatan Panyipatan	Nilai	84,32	85	86	87	89	89	Kecamatan Panyipatan
				IKM Kecamatan Takisung	Nilai	84,10	90	90,05	90,1	90,15	90,15	Kecamatan Takisung
				IKM Kecamatan Tambang Ulang	Nilai	80,15	80,2	80,25	80,3	80,35	80,35	Kecamatan Tambang Ulang
		3.3.16	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	IKM Kecamatan Bajuin	Nilai	76,8	83	89	89	90	90	Kecamatan Bajuin
				IKM Kecamatan Bati-Bati	Nilai	88,5	90	90,2	90,5	91	91	Kecamatan Bati-Bati
				IKM Kecamatan Batu Ampar	Nilai	87,25	85	86	87	88	88	Kecamatan Batu Ampar
				IKM Kecamatan Bumi Makmur	Nilai	89,86	92,40	92,50	92,60	92,70	92,70	Kecamatan Bumi Makmur
				IKM Kecamatan Jorong	Nilai	81,3	82	84	85	86	86	Kecamatan Jorong
				IKM Kecamatan Kintap	Nilai	86,28	89	90	91	92	92	Kecamatan Kintap
				IKM Kecamatan Kurau	Nilai	87	90	90,3	90,5	90,7	90,7	Kecamatan Kurau
				IKM Kecamatan Pelaihari	Nilai	87,01	87,05	87,5	88	88,5	88,5	Kecamatan Pelaihari

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
						2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
				IKM Kecamatan Panyipatan	Nilai	84,32	85	86	87	89	89	Kecamatan Panyipatan
				IKM Kecamatan Takisung	Nilai	84,10	90	90,05	90,1	90,15	90,15	Kecamatan Takisung
				IKM Kecamatan Tambang Ulang	Nilai	80,15	80,2	80,25	80,3	80,35	80,35	Kecamatan Tambang Ulang
		3.3.17	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	Persen	75,97	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.3.18	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan pendidikan politik masyarakat	Persen	99,24	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.3.19	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.3.20	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	87,39	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.3.21	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	Persen	95,15	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	3.4	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	Nilai	3.11	3.15	3.2	3.4	3.6	3.6	

NO	TUJUAN DAERAH/SASARAN DAERAH/SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET			HASIL AKHIR RPD	SKPD
					2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2024	2025	2026		
	3.4.1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tersebarnya informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persen	90	90	90	90	90	90	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3.4.2	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3.4.3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terselenggaranya statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3.4.4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase SKPD yang menyelenggarakan Pengamanan Informasi	Persen	20	50	50	80	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah tahun 2024-2026. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat. Selanjutnya kapasitas kemampuan riil keuangan daerah tersebut digunakan untuk membiayai program per urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Indikasi rencana program pembangunan Kabupaten Tanah Laut berisi program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah. Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Oleh karena itu maka pada bab ini disajikan pula target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan, serta alokasi pagu indikatif program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang dialokasikan tersebut merupakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis, sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Setiap perangkat daerah mempunyai 1 (satu) program yang sama yang melekat pada salah satu urusan yang diampu, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyusunan pagu indikatif tidak bisa secara ideal dilakukan, sehingga konsep *“money follow program”* belum mampu diaplikasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Banyaknya kewajiban dari Pemerintah Pusat yang harus dipenuhi oleh daerah dalam bentuk belanja wajib dan diarahkan, seperti: pemenuhan kewajiban alokasi dana untuk bidang pendidikan minimal 20%, bidang kesehatan 10%, Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Total dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Transfer Umum wajib digunakan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik minimum

40%, belanja pengawasan sebesar 0,75% dan dana bagi hasil yang peruntukannya sebagian besar sudah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan sangat terbatasnya potensi dana yang bisa diarahkan secara ideal untuk mendanai program-program prioritas daerah.

2. Potensi dana yang bisa cukup leluasa diarahkan untuk pendanaan program prioritas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun jumlahnya tidak terlalu signifikan untuk mendesain pagu indikatif secara ideal. PAD Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2023- 2026 hanya berkontribusi rata-rata sebesar 10% dari total pendapatan daerah.

Dengan berbagai pertimbangan yang ada, pagu indikatif tersebut tetap diupayakan mengacu ketentuan yang ada, namun karena berbagai keterbatasan tersebut ada beberapa kebijakan daerah yang harus dilakukan untuk mensikapinya sehingga diperoleh solusi yang lebih realistis dan rasional. Secara umum beberapa pertimbangan yang dipergunakan sebagai penghitung pagu indikatif antara lain: pemenuhan kewajiban belanja wajib mengikat, prioritas-prioritas daerah terkait pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2024-2026, belanja untuk membiayai urusan wajib bersifat pelayanan dasar, dan belanja-belanja prioritas yang sifatnya mendukung pencapaian kinerja daerah. Pencapaian target kinerja program di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut saja, tetapi juga bersumber dari APBN, APBD Kalimantan Selatan, Dana Desa, pihak swasta dan masyarakat serta sumber-sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat. Namun demikian, pencantuman pendanaan yang disajikan hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut. Berikut disajikan Tabel Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan Tabel Program Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut beserta target dan pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2024 – 2026.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

No	Uraian	2024	2025	2026
5	BELANJA DAERAH	2,109,960,165,785.00	2,062,413,017,642.42	2,069,612,824,883.94
5.01	BELANJA OPERASI	1,305,357,382,882.00	1,273,405,586,547.82	1,274,457,606,219.96
5.02	BELANJA MODAL	526,381,306,976.00	515,603,254,410.61	517,403,206,220.99
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
5.04	BELANJA TRANSFER	253,221,475,927.00	248,404,176,684.00	252,752,012,443.00
	Belanja Bagi Hasil	5,927,142,309.00	6,313,004,029.00	6,504,304,554.00
	Belanja Bantuan Keuangan	138,036,232,618.00	132,833,071,655.00	136,989,606,889.00
	Dana Desa	109,258,101,000.00	109,258,101,000.00	109,258,101,000.00
	Total Surplus/(Defisit)	- 240,092,022,317.00	- 189,570,810,520.61	- 94,349,823,247.00

Tabel 7.2 Program Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	44,32 Persen	44,34 Persen	68.101.728.000,00	44,36 Persen	62.001.728.000,00	44,38 Persen	69.954.128.759,40	44,38 Persen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100 Persen	100 Persen	37.200.000.000,00	100 Persen	35.200.000.000,00	100 Persen	37.200.000.000,00	100 Persen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	90,31 Persen	90,32 Persen	644.075,442.00	90,33 Persen	444.075,442.00	90,34 Persen	644.075,442.00	90,34 Persen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99,51 Persen	99,52 Persen	8,686,126,102.00	99,53 Persen	8,686,126,102.00	99,54 Persen	8,686,126,102.00	99,54 Persen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	91,81 Persen	91,82 Persen	10.800.000.000,00	91,83 Persen	10.800.000.000,00	91,84 Persen	10.800.000.000,00	91,84 Persen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD	0,56 Persen	0,55 Persen	1,105,272,000.00	0,54 Persen	1,105,272,000.00	0,53 Persen	1,105,272,000.00	0,53 Persen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMP	0,14 Persen	0,13 Persen	4,313,873,898.00	0,12 Persen	4,313,873,898.00	0,11 Persen	5,313,873,898.00	0,11 Persen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PAUD minimal terakreditasi B	63 Persen	64 Persen	200,000,000.00	65 Persen	300,000,000.00	66 Persen	300,000,000.00	66 Persen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Penyelenggaraan PAUD HI	36 Persen	38 Persen	218,869,961.00	40 Persen	687,630,231.00	42 Persen	305,229,472.00	42 Persen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Terakreditasi A SD	2 Persen	2,1 Persen	3,785,818,535.00	2,2 Persen	378,581,853.00	2,3 Persen	3,785,818,535.00	2,3 Persen	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Terakreditasi A SMP	10 Persen	10,1 Persen	100,000,000.00	10,2 Persen	100,000,000.00	10,3 Persen	100,000,000.00	10,3 Persen	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PKBM yang terakreditasi minimal B	51 Persen	52 Persen		53 Persen		54 Persen		54 Persen		
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	50 Persen	60 Persen	1,294,770,528.00	70 Persen	1,294,770,528.00	80 Persen	1,294,770,528.00	80 Persen	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Siswa Per Guru	20 Angka	20 Angka	70,000,000.00	20 Angka	80,000,000.00	20 Angka	90,000,000.00	20 Angka	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	100 Persen	71.688.707.705,00	100 Persen	60.492.967.803,00	100 Persen	71.451.475.023,00	100 Persen	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	Persentase FKTP yang Terakreditasi Minimal Madya	63 Persen	87 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi Minimal Madya	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai	83 Persen	86 Persen	26.089.613.786,00	90 Persen	26.098.888.441,00	95 Persen	28.146.090.562,00	95 Persen	0.00	Dinas Kesehatan

			KESEHATAN	Standar										
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotik, Toko Obat dan Optical yang Memiliki Izin	91 Persen	100 Persen	24,375,000.00	100 Persen	23,375,000.00	100 Persen	42,375,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPP (Tempat Pengolahan Pangan) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar	56 Persen	62 Persen	0.00	68 Persen	0.00	74 Persen	0.00	74 Persen	0.00	
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	55 Persen	60 Persen	226,000,000.00	65 Persen	246,000,000.00	70 Persen	268,000,000.00	70 Persen	0.00	Dinas Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Area yang Dilayani Irigasi	77,38 Persen	78,73 Persen	0.00	87,09 Persen	0.00	87,09 Persen	0.00	87,09 Persen	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	69,17 Persen	71,11 Persen	0.00	73,11 Persen	0.00	74,65 Persen	0.00	74,65 Persen	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kawasan Daerah Aliran Sungai yang Terlindungan Daya Rusak Air	13,35 Persen	15,80 Persen	0.00	17,80 Persen	0.00	19,50 Persen	0.00	19,50 Persen	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kawasan Pesisir yang Terlindungi Daya Rusak Air	46,21 Persen	49,67 Persen	0.00	53,72 Persen	0.00	54,76 Persen	0.00	54,76 Persen	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Layak	75 Persen	78 Persen	12.900.000.000,00	82 Persen	12.900.000.000,00	86 Persen	12.900.000.000,00	86 Persen	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sanitasi Layak	75 Persen	78 Persen	2.000.000.000,00	82 Persen	2.000.000.000,00	86 Persen	2.000.000.000,00	86 Persen	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	5,51 Persen	5,70 Persen	15.200.000.000,00	6,10 Persen	15.200.000.000,00	6,40 Persen	15.200.000.000,00	6,40 Persen	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Bangunan Gedung Terbangun di Wilayah Daerah Kab/Kot	0,200 Persen	0,286 Persen	57.800.000.000,00	0,372 Persen	55.800.000.000,00	0,456 Persen	66.619.255.591,56	0,456 Persen	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	85 Persen	85 Persen	169.391.632.183,00	85 Persen	177.701.213.792,00	85 Persen	186.426.274.482,00	85 Persen	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Jasa Konstruksi	1,61 Persen	1,61 Persen	500.000.000,00	1,61 Persen	500.000.000,00	1,61 Persen	500.000.000,00	1,61 Persen	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten dengan Pemanfaatan Ruang	63,43 Persen	85,47 Persen	2.720.000.000,00	100 Persen	2.720.000.000,00	24,03 Persen	2.720.000.000,00	24,03 Persen	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase capaian pemenuhan pelayanan dasar perumahan	100 Persen	100 Persen	3.065.000.000,00	100 Persen	3.850.000.000,00	100 Persen	0.00	100 Persen	0.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase capaian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100 Persen	100 Persen	4,865,000,000.00	100 Persen	5,980,000,000.00	100 Persen	4,865,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase capaian Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	12.500.000.000,00	100 Persen	12.750.000.000,00	100 Persen	13.500.000.000,00	100 Persen	0.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase capaian Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	100 Persen	100 Persen	60.500.000.000,00	100 Persen	70.600.000.000,00	100 Persen	70.600.000.000,00	100 Persen	0.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten	100 Persen	100 Persen	1,996,218,140.00	100 Persen	1,690,804,377.00	100 Persen	1,686,312,977.00	100 Persen	0.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/ Kota	100 Persen	100 Persen	7,594,990,000.00	100 Persen	7,594,990,000.00	100 Persen	7,594,990,000.00	100 Persen	0.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kab/Kota	100 Persen	100 Persen	775,000,000.00	100 Persen	775,000,000.00	100 Persen	775,000,000.00	100 Persen	0.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan kesejahteraan sosial	85 %	100 %	560,000,000.00	100 %	641,500,000.00	100 %	723,500,000.00	100 %	0.00	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial	60 %	75 %	3,930,000,000.00	85 %	5,748,000,000.00	100 %	6,270,000,000.00	100 %	0.00	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	N/A %	45 %	75,000,000.00	65 %	115,000,000.00	85 %	155,000,000.00	85 %	0.00	Dinas Sosial

1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	60 %	70 %	0.00	80 %	0.00	90 %	0.00	90 %	0.00	
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial selama tanggap darurat bencana	100 %	100 %	1,635,000,000.00	100 %	2,150,000,000.00	100 %	2,160,000,000.00	100 %	0.00	Dinas Sosial
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	350,000,000.00	100 %	160,000,000.00	100 %	170,000,000.00	100 %	0.00	Dinas Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	6,5 Persen	90 Persen	311,000,000.00	90 Persen	161,000,000.00	90 Persen	205,000,000.00	90 Persen	0.00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta Latih yang Terserap Dunia Usaha Dunia Industri	73,05 Persen	74 Persen	1,596,135,770.00	74,05 Persen	1,926,128,746.00	75 Persen	2,166,128,746.00	75 Persen	0.00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat/Berkompeten	0,14 Persen	0,15 Persen	0.00	0,16 Persen	0.00	0,17 Persen	0.00	0,17 Persen	0.00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	6,50 Persen	90 Persen	981,642,266.00	90 Persen	12.197.811.200,00	90 Persen	1,478,755,443.00	90 Persen	0.00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	32 Persen	34 Persen	727,335,121.00	36 Persen	179,023,718.00	38 Persen	240,134,940.00	38 Persen	0.00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Meningkatnya Pembinaan Perempuan	100 Persen	100 Persen	849,988,869.00	100 Persen	1,024,987,756.00	100 Persen	1,024,987,756.00	100 Persen	0.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,007 Nilai	0,006 Nilai	410,057,960.00	0,005 Nilai	186,063,756.00	0,004 Nilai	186,063,756.00	0,004 Nilai	0.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di FAD Kabupaten dan Kecamatan	25 Persen	50 Persen	300,000,000.00	75 Persen	300,000,000.00	100 Persen	300,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

														Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Anak dari Tindakan kekerasan yang ditinjau lanjuti	100 Persen	100 Persen	500,000,000.00	100 Persen	250,000,000.00	100 Persen	250,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Desa mandiri pangan	1 Desa	1 Desa	597,925,000.00	1 Desa	547,925,000.00	1 Desa	547,925,000.00	4 Desa	0.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	728,000,000.00	100 Persen	650,000,000.00	100 Persen	650,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan	16 Desa	15 Desa	200,000,000.00	14 Desa	175,000,000.00	13 Desa	175,000,000.00	13 Desa	0.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	100 Persen	100 Persen	265,000,000.00	100 Persen	182,500,000.00	100 Persen	182,500,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											



2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah Kelompok Masyarakat, Organisasi, Lembaga dan Perusahaan di Lingkup Kabupaten Tanah Laut	100 Persen	100 Persen	2,350,000,000.00	100 Persen	2,350,000,000.00	100 Persen	255,500,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	775,000,000.00	100 Persen	810,000,000.00	100 Persen	890,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100 Persen	100 Persen	750,000,000.00	100 Persen	150,000,000.00	100 Persen	0.00	100 Persen	0.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 Persen	100 Persen	3,000,000,000.00	100 Persen	5,083,560,000.00	100 Persen	3,000,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan taman yang dapat dinikmati masyarakat	100 Persen	100 Persen	3,000,000,000.00	100 Persen	1,500,000,000.00	100 Persen	1,900,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100 Persen	100 Persen	660,000,000.00	100 Persen	756,000,000.00	100 Persen	660,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan untuk masyarakat	2 Penghargaan	2 Penghargaan	122,318,279.00	2 Penghargaan	172,319,375.00	2 Penghargaan	122,318,279.00	2 Penghargaan	0.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100 Persen	100 Persen	176,419,199.00	100 Persen	180,000,000.00	100 Persen	170,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan yang ditangani	100 Persen	100 Persen	11.337.253.578,00	100 Persen	15.305.292.330,00	100 Persen	11.337.253.578,00	100 Persen	0.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	99,40 Persen	99,60 Persen	300,000,000.00	99,80 Persen	325,000,000.00	99,90 Persen	350,000,000.00	99,90 Persen	0.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun yang Memiliki KIA	54 Persen	55 Persen	0.00	60 Persen	0.00	65 Persen	0.00	65 Persen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	100 Persen	100 Persen	125,000,000.00	100 Persen	150,000,000.00	100 Persen	175,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Persen	100 Persen	925,000,000.00	100 Persen	950,000,000.00	100 Persen	1,000,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penyelenggaraan penataan desa	N/A	73 Persen	1,100,000,000.00	75 Persen	200,000,000.00	80 Persen	200,000,000.00	80 Persen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama antar desa	N/A	80 Persen	770,000,000.00	83 Persen	770,000,000.00	85 Persen	770,000,000.00	85 Persen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina administrasinya	N/A	70 Persen	7,071,484,685.00	75 Persen	7,621,484,685.00	80 Persen	7,621,484,685.00	80 Persen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LAD yang dibina	N/A	80 Persen	1,050,000,000.00	85 Persen	1,050,000,000.00	90 Persen	1,050,000,000.00	90 Persen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKD yang dibina	N/A	80 Persen	1,050,000,000.00	85 Persen	1,050,000,000.00	90 Persen	1,050,000,000.00	90 Persen	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate	2,10 Anak	2,08 Anak	235,114,666.00	2,07 Anak	278,221,651.00	2,05 Anak	278,221,651.00	2,05 Anak	0.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	76,60 Persen	77,00 Persen	3,059,316,557.00	77,20 Persen	2,931,022,554.00	77,50 Persen	2,931,022,554.00	77,50 Persen	0.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	34,53 Persen	54,37 Persen	900,819,011.00	73,96 Persen	716,372,912.00	79,01 Persen	716,372,912.00	79,01 Persen	0.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalulintas	0.20 Nilai	0.25 Nilai	1,917,374,880.00	0.35 Nilai	2,717,374,880.00	0.35 Nilai	3,832,259,628.00	0.35 Nilai	0.00	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase prasarana perhubungan	0.68 Persen	33.6 Persen	1,777,838,905.00	66.7 Persen	1,610,000,000.00	100 Persen	1,610,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Perhubungan

2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Lintas Penyebrangan dan Kapal Angkatan Penyebrangan Dalam Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	280,000,000.00	100 Persen	1,154,036,088.00	100 Persen	30,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Perhubungan
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tersebarnya informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	90 Persen	90 Persen	3,198,515,400.00	90 Persen	3,227,143,400.00	90 Persen	3,239,699,520.00	90 Persen	0.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika	100 Persen	100 Persen	4,259,600,000.00	100 Persen	4,259,600,000.00	100 Persen	4,443,186,400.00	100 Persen	0.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Memiliki Derajat Kepatuhan Berkoperasi	4,44 Persen	6,38 Persen	150,000,000.00	8,00 Persen	150,000,000.00	9,26 Persen	150,000,000.00	9,26 Persen	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam KSP/USP yang dinilai sehat.	2,27 Persen	2,27 Persen	100,000,000.00	4,44 Persen	100,000,000.00	8,51 Persen	100,000,000.00	8,51 Persen	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan perkoperasian dan UMK	7,25 Persen	81,62 Persen	300,000,000.00	85 Persen	300,000,000.00	85,56 Persen	300,000,000.00	85,56 Persen	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Kecil (UMK) yang Terfasilitasi Perizinan dan Kemitraan	4 Persen	4,13 Persen	550,000,000.00	4,14 Persen	550,000,000.00	4,33 Persen	550,000,000.00	4,33 Persen	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi berdasarkan lokasi sektor	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	50,000,000.00	25 pelaku usaha	50,000,000.00	25 pelaku usaha	50,000,000.00	75 pelaku usaha	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor yang menanamkan modal	100 Investor	100 Investor	450,000,000.00	100 Investor	450,000,000.00	100 Investor	450,000,000.00	100 Investor	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dibina	20 Persen	20 Persen	431,000,000.00	20 Persen	431,000,000.00	20 Persen	431,000,000.00	20 Persen	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	2600 Jumlah izin	2650 Jumlah izin	175,852,000.00	2700 Jumlah izin	208,222,400.00	2750 Jumlah izin	245,866,880.00	10518 Jumlah izin	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	persentase izin usaha yang terfasilitasi	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan informasi penanaman modal	100 persen	100 persen	210,000,000.00	100 persen	252,000,000.00	100 persen	302,400,000.00	100 persen	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	7 Orang	7 Orang	5,690,000,000.00	7 Orang	4,240,000,000.00	7 Orang	4,240,000,000.00	7 Orang	0.00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	220 Orang	300 orang	93.018.000.000,00	300 orang	87.899.000.000,00	300 orang	13.625.000.000,00	300 orang	0.00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100 Persen	100 Persen	3,816,750,000.00	100 Persen	4,266,750,000.00	100 Persen	4,818,425,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase terselenggaranya statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	100 Persen	100 Persen	171,150,000.00	100 Persen	184,237,500.00	100 Persen	193,449,375.00	100 Persen	0.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase SKPD yang menyelenggarakan Pengamanan Informasi	50 Persen	50 Persen	150,000,000.00	80 Persen	165,000,000.00	100 Persen	177,100,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Adat Tradisi dan Budaya yang dilestarikan	55 Persen	60 Persen	2,300,000,000.00	65 Persen	2,550,000,000.00	70 Persen	2,550,000,000.00	70 Persen	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku Seni yang Dibina	N/A Persen	65 Persen	150,000,000.00	70 Persen	200,000,000.00	75 Persen	250,000,000.00	75 Persen	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peninggalan Sejarah yang Dilindungi	60 Persen	70 Persen	450,000,000.00	80 Persen	450,000,000.00	90 Persen	450,000,000.00	90 Persen	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Obyek Cagar Budaya yang Dilestarikan	N/A Persen	50 Persen	1,200,000,000.00	60 Persen	1,200,000,000.00	70 Persen	1,200,000,000.00	70 Persen	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yg memiliki Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	40 Persen	57 Persen	768,539,347.00	77 Persen	768,539,347.00	100 Persen	768,539,347.00	100 Persen	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno yang di lestarikan	0 Persen	33 Persen	20,000,000.00	67 Persen	20,000,000.00	100 Persen	20,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah SKPD yg mendapatkan nilai pengawasan kearsipan internal dengan nilai B	4 SKPD	8 SKPD	330,000,000.00	12 SKPD	90,000,000.00	16 SKPD	110,000,000.00	16 SKPD	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Hak akses Arsip	37 Persen	65 Persen		85 Persen		100 Persen		100 Persen		
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase penyelamatan arsip sesuai NSPK	0 Persen	33 Persen	110,000,000.00	67 Persen	100,000,000.00	100 Persen	140,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	66.006 Ton	66.997 Ton	636,000,000.00	68.002 Ton	536,000,000.00	69.022 Ton	536,000,000.00	69.022 Ton	0.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.360 Ton	1.436 Ton	400,000,000.00	1.457 Ton	350,000,000.00	1.479 Ton	275,000,000.00	1.479 Ton	0.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	66.006 Ton	66.997 Ton	100,000,000.00	68.002 Ton	75,000,000.00	69.022 Ton	75,000,000.00	69.022 Ton	0.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Hasil Olahan Perikanan	2,5 Persen	1,5 Persen	225,000,000.00	1,5 Persen	175,000,000.00	1,5 Persen	175,000,000.00	1,5 Persen	0.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Potensi Wisata Alam yang Dikembangkan	N/A Obyek Wisata	1 Obyek Wisata	1,044,663,932.00	2 Obyek Wisata	1,150,000,000.00	1 Obyek Wisata	1,150,000,000.00	4 Obyek Wisata	0.00	Dinas Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	490000 Orang	500000 Orang	1,125,000,000.00	510000 Orang	546,615,671.00	520000 Orang	546,615,671.00	1530000 Orang	0.00	Dinas Pariwisata
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Terbentuk	N/A Ekosistem	2 Ekosistem	50,000,000.00	2 Ekosistem	25,000,000.00	2 Ekosistem	25,000,000.00	6 Ekosistem	0.00	Dinas Pariwisata
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	45 Orang	180 Orang	250,000,000.00	180 Orang	250,000,000.00	180 Orang	250,000,000.00	180 Orang	0.00	Dinas Pariwisata
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	10 Persen	15 Persen	0.00	20 Persen	0.00	25 Persen	0.00	25 Persen	0.00	



3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman hortikultura	10 Persen	15 Persen	696,000,000.00	20 Persen	765,600,000.00	25 Persen	842,160,000.00	25 Persen	0.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	10 Persen	15 Persen	750,000,000.00	20 Persen	825,000,000.00	25 Persen	907,500,000.00	25 Persen	0.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Fungsional	100 Persen	100 Persen	800,000,000.00	100 Persen	850,000,000.00	100 Persen	900,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	n/a Persen	30 Persen	5,600,000,000.00	40 Persen	6,160,000,000.00	60 Persen	6,776,000,000.00	60 Persen	0.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Perkebunan	n/a Persen	5 Persen	0.00	10 Persen	0.00	15 Persen	0.00	15 Persen	0.00	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan dan Hortikultura	n/a Persen	25 Persen	666,453,338.00	35 Persen	733,104,172.00	45 Persen	806,414,588.00	45 Persen	0.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Fungsional	50 Persen	60 Persen	1,038,712,691.00	70 Persen	1,200,000,000.00	75 Persen	1,500,000,000.00	75 Persen	0.00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan



3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Angka Kematian Hewan Ternak	100 Persen	100 Persen	162,000,000.00	100 Persen	352,000,000.00	100 Persen	207,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Area Terdampak OPT dan DPI Yang Tertangani Pada Tanaman Pertanian	100 Persen	100 Persen	900,000,000.00	100 Persen	990,000,000.00	100 Persen	1,089,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang diRekomendasikan	100 Persen	100 Persen	600,000,000.00	100 Persen	660,000,000.00	100 Persen	726,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Desa Kawasan Ternak (Sapi Potong dan Itik)	11 Desa	2 Desa	490,000,000.00	4 Desa	530,000,000.00	6 Desa	550,000,000.00	12 Desa	0.00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Pertanian Yang Terlatih	12,5 Persen	15,6 Persen	400,000,000.00	16,2 Persen	440,000,000.00	16,2 Persen	484,000,000.00	16,2 Persen	0.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Distribusi Pasar	0,77 Persen	1,08 Persen	3,369,335,011.00	1,77 Persen	3,369,335,011.00	2,04 Persen	3,369,335,011.00	2,04 Persen	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	96,61 Persen	96,61 Persen	348,760,474.00	98,31 Persen	348,760,474.00	100 Persen	348,760,474.00	100 Persen	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase promosi pelaku usaha untuk orientasi ekspor	6,67 Pelaku Usaha	6,67 Pelaku Usaha	100,000,000.00	8,57 Pelaku Usaha	100,000,000.00	10 Pelaku Usaha	100,000,000.00	10 Pelaku Usaha	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan



3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku usaha yang tertip U TPP	67,38 Persen	67,94 Persen	450,000,000.00	68,57 Persen	197,144,098.00	69,51 Persen	197,144,098.00	69,51 Persen	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku UMK yang menggunakan prodak dalam Negeri	68,18 Persen	68,18 Persen	340,345,634.00	75.76 Persen	340,345,634.00	90.91 Persen	340,345,634.00	90.91 Persen	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri	100 Persen	100 Persen	1,963,223,044.00	100 Persen	1,958,997,481.00	100 Persen	940,505,330.00	100 Persen	0.00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Industri Terdaftar SiiNas	85 Persen	90 Persen	20,000,000.00	95 Persen	20,000,000.00	100 Persen	20,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Industri yang Masuk ke dalam SiiNas dan Sistem Informasi Data Industri	100 Persen	100 Persen	30,000,000.00	100 Persen	80,000,000.00	100 Persen	80,000,000.00	100 Persen	0.00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	01	SEKRETARIAT DAERAH												
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemberian Bantuan Hibah Kepada Lembaga/Organisasi keagamaan	100 Persen	100 Persen	34.458.215.964,00	100 Persen	34.415.733.812,00	100 Persen	34.458.215.964,00	100 Persen	0.00	Sekretariat Daerah



4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemenuhan IKK LPPD	100 Persen	100 Persen	1,000,000,000.00	100 Persen	1,025,000,000.00	100 Persen	1,200,000,000.00	100 Persen	0.00	Sekretariat Daerah
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyelesaian Produk Hukum Daerah	98 Persen	90 Persen	1,550,000,000.00	95 Persen	1,550,000,000.00	96 Persen	1,550,000,000.00	96 Persen	0.00	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	78 Persen	79 Persen	0.00	79.5 Persen	0.00	80 Persen	0.00	80 Persen	0.00	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD yang bekinerja Positif dan menghasilkan PAD	75 Persen	75 Persen	680,000,000.00	75 Persen	690,250,160.00	75 Persen	833,590,401.00	75 Persen	0.00	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang/Jasa	7.89 Persen	7.89 Persen	2,040,000,000.00	7.89 Persen	2,040,000,000.00	7.89 Persen	2,040,000,000.00	7.89 Persen	0.00	Sekretariat Daerah
4	02		SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	100 Nilai	100 Nilai	6,720,878,503.00	100 Nilai	6,720,878,503.00	100 Nilai	6,877,843,832.00	100 Nilai	0.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	100 Persen	100 Persen	18.104.597.387,00	100 Persen	19.094.940.939,00	100 Persen	17.572.097.387,00	100 Persen	0.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	01		PERENCANAAN											
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program yang Memenuhi Target	76 Persen	77 Persen	150,000,000.00	78 Persen	150,000,000.00	79 Persen	150,000,000.00	79 Persen	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RPD dengan RKPD	100 Persen	100 Persen	1,150,000,000.00	100 Persen	1,300,000,000.00	100 Persen	1,200,000,000.00	100 Persen	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	76 Persen	77 Persen	45,850,000.00	78 Persen	50,900,000.00	79 Persen	67,350,000.00	79 Persen	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	76 Persen	77 Persen	26,900,000.00	78 Persen	26,900,000.00	79 Persen	29,000,000.00	79 Persen	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	76 Persen	77 Persen	20,400,000.00	78 Persen	20,500,000.00	79 Persen	20,900,000.00	79 Persen	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	100 Persen	287,250,000.00	100 Persen	47,000,000.00	100 Persen	49,000,000.00	100 Persen	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	100 Persen	16,000,000.00	100 Persen	16,000,000.00	100 Persen	18,500,000.00	100 Persen	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	100 Persen	34,800,000.00	100 Persen	35,100,000.00	100 Persen	36,200,000.00	100 Persen	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	02		KEUANGAN											
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	949,908,118.00	100 Persen	1,020,424,453.00	100 Persen	1,087,080,795.00	100 Persen	0.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Dokumen Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	279.160.824.291,00	100 Persen	272.087.060.250,00	100 Persen	275.543.104.562,00	100 Persen	0.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Dokumen Penganggaran Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	634,672,100.00	100 Persen	738,272,624.00	100 Persen	776,911,256.00	100 Persen	0.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	100 Persen	100 Persen	1,241,936,733.00	100 Persen	1,355,858,134.00	100 Persen	1,447,800,000.00	100 Persen	0.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyampaian Neraca Aset Tetap, Aset Lancar berupa Persediaan dan Aset Lainnya yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	3,118,491,892.00	100 Persen	3,770,318,350.00	100 Persen	3,792,688,739.00	100 Persen	0.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak daerah	8,41 Persen	2,60 Persen	2,283,889,265.00	4,52 Persen	2,626,472,654.00	4,43 Persen	3,020,443,552.00	4,43 Persen	0.00	Badan Pendapatan Daerah



5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pesentase peningkatan hasil kekayaan yang dipisahkan	21,06 Persen	82,90 Persen	102,999,188.00	4,10 Persen	127,374,000.00	7,88 Persen	146,480,100.00	7,88 Persen	0.00	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pesentase peningkatan lain-lain pendapatan yang sah	20,48 Persen	4,22 Persen	28,002,000.00	5,64 Persen	32,475,500.00	12,12 Persen	37,346,825.00	12,12 Persen	0.00	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pesentase peningkatan retribusi daerah	26,46 Persen	0,26 Persen	89,900,800.00	2,01 Persen	92,357,500.00	10,87 Persen	106,211,125.00	10,87 Persen	0.00	Badan Pendapatan Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN											
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Disiplin Pegawai ASN Daerah	4,99 Nilai	4,99 Nilai	470,528,088.00	4,99 Nilai	434,210,046.00	4,99 Nilai	436,399,494.00	4,9 Nilai	0.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kinerja Pegawai ASN Daerah	26,70 Nilai	27,20 Nilai	569,812,598.00	28,70 Nilai	51,016,964.00	29,00 Nilai	510,161,964.00	29,00 Nilai	0.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kompetensi ASN Daerah	15,50 Nilai	16,50 Nilai	236,112,418.00	18,80 Nilai	236,112,418.00	23 Nilai	236,112,418.00	23 Nilai	0.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kualifikasi ASN Daerah	12,81 Nilai	12,81 Nilai	2,821,007,120.00	13,01 Nilai	1,353,760,837.00	13,01 Nilai	2,260,571,389.00	13,01 Nilai	0.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											

5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Kompetensi ASN Daerah	15,50 Nilai	16,50 Nilai	2,601,756,740.00	18,80 Nilai	1,982,425,940.00	23 Nilai	1,982,425,940.00	23 Nilai	0.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Inovasi Daerah Yang Nilai Kematangannya Minimal 100	3 Inovasi	3 Inovasi	205,000,000.00	3 Inovasi	259,000,000.00	3 Inovasi	235,000,000.00	3 Inovasi	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	01		INSPEKTORAT DAERAH											
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Budaya dan Hubungan Organisasi	3 Level	3 Level	100,000,000.00	3 Level	110,000,000.00	3 Level	110,000,000.00	3 Level	0.00	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Peran dan Layanan APIP	3 Level	3 Level	1,895,939,000.00	3 Level	1,980,735,950.00	3 Level	1,980,735,950.00	3 Level	0.00	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Praktik Profesional	3 Level	3 Level	255,474,500.00	3 Level	268,248,225.00	3 Level	268,248,225.00	3 Level	0.00	Inspektorat Kabupaten
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2,408 Nilai	2,409 Nilai	275,000,000.00	2,410 Nilai	850,000,000.00	2,411 Nilai	850,000,000.00	2,411 Nilai	0.00	Inspektorat Kabupaten
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MR)	2,797 Nilai	2,798 Nilai	75,000,000.00	2,799 Nilai	85,000,000.00	2,800 Nilai	85,000,000.00	2,800 Nilai	0.00	Inspektorat Kabupaten
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal 80,1	15 Persen	30 Persen	75,466,255.00	40 Persen	87,339,567.00	50 Persen	87,339,567.00	50 Persen	0.00	Inspektorat Kabupaten
7			UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01		KECAMATAN											

7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Batu Ampar	85 Nilai	86 Nilai	35,000,000.00	87 Nilai	38,500,000.00	88 Nilai	30,000,000.00	88 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Batu Ampar
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Takisung	90 Nilai	90,05 Nilai	51,000,000.00	90,10 Nilai	55,000,000.00	90,15 Nilai	55,000,000.00	90,15 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Takisung
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tambang Ulang	80,2 Nilai	80,25 Nilai	10,000,000.00	80,3 Nilai	10,000,000.00	80,35 Nilai	10,000,000.00	80,35 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Tambang Ulang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bajuin	83 Nilai	89 Nilai	7,863,470.00	89 Nilai	8,374,596.00	90 Nilai	8,918,944.00	90 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bajuin
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bati-bati	90 Nilai	90,2 Nilai	22,500,000.00	90,5 Nilai	17,000,000.00	91 Nilai	17,850,000.00	91 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bati-Bati
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bumi Makmur	92,40 Nilai	92,50 Nilai	35,000,000.00	92,50 Nilai	36,000,000.00	92,60 Nilai	35,000,000.00	92,60 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bumi Makmur
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Jorong	82 Nilai	84 Nilai	40,000,000.00	85 Nilai	5,000,000.00	86 Nilai	5,000,000.00	86 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Jorong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kintap	89 Nilai	90 Nilai	6,483,500.00	91 Nilai	6,483,500.00	92 Nilai	6,483,500.00	92 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Kintap
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kurau	90 Nilai	90,3 Nilai	35,000,000.00	90,5 Nilai	35,000,000.00	90,7 Nilai	35,000,000.00	90,7 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Kurau
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Panyipatan	85 Nilai	86 Nilai	49,500,000.00	87 Nilai	56,500,000.00	89 Nilai	74,000,000.00	89 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Panyipatan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pelaihari	87,05 Nilai	87,05 Nilai	14,500,000.00	88 Nilai	15,225,000.00	88,5 Nilai	15,986,250.00	88,5 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Pelaihari

7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM Kecamatan Bajuin	83 Nilai	89 Nilai	100,000,000.00	89 Nilai	106,500,000.00	90 Nilai	113,422,500.00	90 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bajuin
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM Kecamatan Batu Ampar	85 Nilai	86 Nilai	69,100,211.00	87 Nilai	76,010,232.00	88 Nilai	76,010,232.00	88 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Batu Ampar
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM Kecamatan Bumi Makmur	92,40 Nilai	92,50 Nilai	60,000,000.00	92,60 Nilai	65,000,000.00	92,70 Nilai	50,000,000.00	92,70 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bumi Makmur
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM Kecamatan Tambang Ulang	80,2 Nilai	80,25 Nilai	65,000,000.00	80,3 Nilai	65,000,000.00	80,35 Nilai	65,000,000.00	80,35 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Tambang Ulang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Bati-bati	90 Nilai	90,2 Nilai	130,165,180.00	90,5 Nilai	92,093,069.00	91 Nilai	93,500,000.00	91 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bati-Bati
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Jorong	82 Nilai	84 Nilai	70,000,000.00	85 Nilai	50,500,000.00	86 Nilai	72,500,000.00	86 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Jorong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Kintap	89 Nilai	90 Nilai	31,843,500.00	91 Nilai	37,185,675.00	92 Nilai	42,527,850.00	92 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Kintap
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Kurau	90 Nilai	90,3 Nilai	40,000,000.00	90,5 Nilai	40,000,000.00	90,7 Nilai	40,000,000.00	90,7 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Kurau
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Panyipatan	85 Nilai	86 Nilai	80,000,000.00	87 Nilai	60,000,000.00	89 Nilai	60,000,000.00	89 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Panyipatan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Pelaihari	87,05 Nilai	87,50 Nilai	4,770,641,823.00	88 Nilai	4,567,090,762.00	88,5 Nilai	4,567,090,762.00	88,5 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Pelaihari
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Takisung	90 Nilai	90,05 Nilai	124,000,000.00	90,10 Nilai	162,000,000.00	90,15 Nilai	162,000,000.00	90,15 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Takisung

7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM Kecamatan Bajuin	83 Nilai	89 Nilai	10,231,958.00	89 Nilai	10,897,035.00	90 Nilai	11,605,342.00	90 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bajuin
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM Kecamatan Batu Ampar	85 Nilai	86 Nilai	40,000,000.00	87 Nilai	110,200,000.00	88 Nilai	105,200,000.00	88 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Batu Ampar
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM Kecamatan Bumi Makmur	92,40 Nilai	92,50 Nilai	40,000,000.00	92,60 Nilai	40,000,000.00	92,40 Nilai	40,000,000.00	92,70 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bumi Makmur
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM Kecamatan Tambang Ulang	80,2 Nilai	80,25 Nilai	30,000,000.00	80,3 Nilai	30,000,000.00	80,35 Nilai	30,000,000.00	80,35 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Tambang Ulang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Bati-bati	90 Nilai	90,2 Nilai	40,000,000.00	90,5 Nilai	39,384,863.00	91 Nilai	40,000,000.00	91 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bati-Bati
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Jorong	82 Nilai	84 Nilai	47,814,648.00	85 Nilai	8,000,000.00	86 Nilai	8,000,000.00	86 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Jorong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Kintap	89 Nilai	90 Nilai	4,216,000.00	91 Nilai	4,216,000.00	92 Nilai	4,216,000.00	92 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Kintap
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Kurau	90 Nilai	90,3 Nilai	15,000,000.00	90,5 Nilai	15,000,000.00	90,7 Nilai	15,000,000.00	90,7 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Kurau
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Panyipatan	85 Nilai	86 Nilai	40,000,000.00	87 Nilai	50,000,000.00	89 Nilai	50,000,000.00	89 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Panyipatan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Pelaihari	87,5 Nilai	87,5 Nilai	40,000,000.00	88 Nilai	52,000,000.00	88,5 Nilai	52,000,000.00	88,5 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Pelaihari
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Takisung	90 Nilai	90,05 Nilai	11,000,000.00	90,10 Nilai	13,500,000.00	90,15 Nilai	13,500,000.00	90,15 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Takisung

7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM Kecamatan Batu Ampar	85 Nilai	86 Nilai	1,515,332,835.00	87 Nilai	719,203,408.00	88 Nilai	484,796,723.00	88 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Batu Ampar
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM Kecamatan Bumi Makmur	92,40 Nilai	92,50 Nilai	1,300,000,000.00	92,60 Nilai	1,300,000,000.00	92,70 Nilai	1,300,000,000.00	92,70 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bumi Makmur
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM Kecamatan Kurau	90 Nilai	90,3 Nilai	1,588,107,284.00	90,5 Nilai	1,717,415,014.00	90,7 Nilai	1,585,415,014.00	90,7 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Kurau
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM Kecamatan Tambang Ulang	80,2 Nilai	80,25 Nilai	1,115,000,000.00	80,3 Nilai	1,379,006,000.00	80,35 Nilai	1,379,006,000.00	80,35 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Tambang Ulang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Bajuin	83 Nilai	89 Nilai	1,276,456,998.00	89 Nilai	946,344,373.00	90 Nilai	808,870,455.00	90 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bajuin
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Bati-bati	90 Nilai	90,2 Nilai	1,447,858,760.00	90,5 Nilai	1,220,141,968.00	91 Nilai	1,121,115,112.00	91 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bati-Bati
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Jorong	82 Nilai	84 Nilai	2,219,177,638.00	85 Nilai	1,316,117,639.00	86 Nilai	1,216,972,272.00	86 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Jorong
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Kintap	89 Nilai	90 Nilai	1,216,972,272.00	91 Nilai	1,517,023,369.00	92 Nilai	1,588,107,284.00	92 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Kintap
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Panyipatan	85 Nilai	86 Nilai	1,400,296,756.00	87 Nilai	1,310,000,000.00	89 Nilai	1,310,000,000.00	89 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Panyipatan

7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Pelaihari	87,05 Nilai	87,5 Nilai	1,359,776,973.00	88 Nilai	1,364,026,973.00	88,5 Nilai	1,364,026,973.00	88,5 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Pelaihari
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Takisung	90 Nilai	90,05 Nilai	994,987,508.45	90,10 Nilai	1,115,000,000.00	90,15 Nilai	1,115,000,000.00	90,15 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Takisung
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM Kecamatan Bajuin	83 Nilai	89 Nilai	244,485,868.00	89 Nilai	249,832,787.00	90 Nilai	266,071,918.00	90 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bajuin
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM Kecamatan Batu Ampar	85 Nilai	86 Nilai	49,800,000.00	87 Nilai	159,799,933.00	88 Nilai	150,761,896.00	88 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Batu Ampar
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM Kecamatan Bumi Makmur	92,40 Nilai	92,50 Nilai	35,000,000.00	92,60 Nilai	35,000,000.00	92,70 Nilai	35,000,000.00	92,70 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bumi Makmur
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM Kecamatan Tambang Ulang	80,2 Nilai	80,25 Nilai	45,000,000.00	80,30 Nilai	45,000,000.00	80,35 Nilai	45,000,000.00	80,35 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Tambang Ulang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Bati-bati	90 Nilai	90,2 Nilai	54,189,906.00	90,5 Nilai	49,000,000.00	91 Nilai	49,800,000.00	91 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bati-Bati
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Jorong	83 Nilai	85 Nilai	0.00	86 Nilai	0.00	87 Nilai	0.00	91 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Jorong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Kintap	89 Nilai	90 Nilai	22,797,368.00	91 Nilai	25,077,105.00	92 Nilai	27,584,815.00	92 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Kintap

7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Kurau	90 Nilai	90,3 Nilai	66,009,760.00	90,5 Nilai	67,000,000.00	90,7 Nilai	107,000,000.00	90,7 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Kurau
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Panyipatan	85 Nilai	86 Nilai	100,000,000.00	87 Nilai	55,000,000.00	89 Nilai	55,000,000.00	89 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Panyipatan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Pelaihari	87.05 Nilai	87.5 Nilai	60,534,306.00	88 Nilai	94,811,021.00	88.5 Nilai	94,811,021.00	88.5 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Pelaihari
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Takisung	90 Nilai	90,05 Nilai	35,700,000.00	90,10 Nilai	45,500,000.00	90,15 Nilai	45,500,000.00	90,15 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Takisung
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pembinaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	100 Persen	100 Persen	2,184,495,811.00	100 Persen	1,384,825,811.00	100 Persen	1,384,825,811.00	100 Persen	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan pendidikan politik masyarakat	100 Persen	100 Persen	2,359,398,010.00	100 Persen	2,262,367,971.00	100 Persen	2,262,367,971.00	100 Persen	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	100 Persen	100 Persen	324,482,000.00	100 Persen	334,590,960.00	100 Persen	334,590,960.00	100 Persen	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 Persen	100 Persen	452,965,363.00	100 Persen	462,616,170.00	100 Persen	462,616,170.00	100 Persen	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100 Persen	100 Persen	1,043,633,321.00	100 Persen	872,996,653.00	100 Persen	872,996,653.00	100 Persen	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X														
X	XX													
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	85 Nilai	90 Nilai	6,934,353,964.00	90 Nilai	6,934,353,964.00	95 Nilai	6,934,353,964.00	95 Nilai	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Bagian Perencanaan dan Keuangan	93 Nilai	93.5 Nilai	24.637.592.612,0 0	94 Nilai	25.745.032.190,0 0	94.5 Nilai	26.450.215.964,0 0	94.5 Nilai	0.00	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD	80 Nilai	82 Nilai	28.828.000.000,0 0	84 Nilai	28.820.000.000,0 0	86 Nilai	28.853.000.000,0 0	86 Nilai	0.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Bagian Prokopim	93 Nilai	93.5 Nilai	850,000,000.00	94 Nilai	850,000,000.00	94.5 Nilai	850,000,000.00	94.5 Nilai	0.00	Sekretariat Daerah

			DAERAH KABUPATEN/KOTA											
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Bagian Umum	93 Nilai	93,5 Nilai	22.951.493.200,00	94 Nilai	19.071.939.578,00	94,5 Nilai	20.855.933.411,00	94,5 Nilai	0.00	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	80 Nilai	82 Nilai	8.523.707.650.00	84 Nilai	5.297.820.427.00	86 Nilai	9.130.707.650.00	86 Nilai	0.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	81 Nilai	82 Nilai	11.909.207.155,00	83 Nilai	13.318.039.282,00	84 Nilai	14.348.661.197,00	84 Nilai	0.00	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	85 Nilai	90 Nilai	8.523.707.650.00	95 Nilai	11.598.140.893,00	100 Nilai	11.728.963.044,00	100 Nilai	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85 Nilai	86 Nilai	56.978.070.995,00	88 Nilai	56.978.070.995,00	90 Nilai	56.978.070.995,00	90 Nilai	0.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87,70 Nilai	87,75 Nilai	4.991.970.000.00	87,80 Nilai	5.157.620.000.00	87,80 Nilai	5.162.111.400.00	87,80 Nilai	0.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	86 Nilai	87 Nilai	10.706.281.359,00	88 Nilai	10.973.938.392,00	89 Nilai	11.248.286.851,00	89 Nilai	0.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olah raga	85 Nilai	86 Nilai	5,496,100,413.00	87 Nilai	5,516,773,453.00	88 Nilai	7,317,562,150.00	88 Nilai	0.00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92 Nilai	92,15 Nilai	8,000,606,793.05	92,53 Nilai	8,000,606,793.05	92,90 Nilai	8,000,606,793.05	92,90 Nilai	0.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Kesehatan	81,62 Nilai	82 Nilai	263.292.453.945,00	83 Nilai	267.233.496.182,00	85 Nilai	272.704.491.696,00	85 Nilai	0.00	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	82 Nilai	84 Nilai	6,358,683,484.00	86 Nilai	5,854,784,179.00	88 Nilai	5,801,754,611.00	88 Nilai	0.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pariwisata	85 Nilai	90 Nilai	5,773,324,755.00	90 Nilai	6,106,513,241.00	95 Nilai	6,106,713,241.00	95 Nilai	0.00	Dinas Pariwisata
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88.31 Nilai	88.32 Nilai	275.506.286.234,50	88.33 Nilai	275.506.286.234,50	88.34 Nilai	275.506.286.234,50	88.34 Nilai	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Perhubungan	80 Nilai	82 Nilai	10.451.447.052,00	83 Nilai	8,656,716,652.00	85 Nilai	8,665,867,992.00	85 Nilai	0.00	Dinas Perhubungan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85 Nilai	85,45 Nilai	5,214,449,340.00	85,55 Nilai	8,725,511,109.00	85,65 Nilai	10.647.866.219,00	85,65 Nilai	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	85 Nilai	90 Nilai	13.009.665.059,00	90 Nilai	16.000.000.000,00	90 Nilai	16.500.000.000,00	90 Nilai	0.00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	88,9 Nilai	89 Nilai	40.736.893.740,00	89,1 Nilai	35.610.928.700,00	90 Nilai	35.610.928.700,00	90 Nilai	0.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	78 Nilai	80 Nilai	13.390.918.109,00	81 Nilai	13.390.918.109,00	82 Nilai	13.390.918.109,00	82 Nilai	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Sosial	75 Nilai	78 Nilai	8.150.857.311.00	80 Nilai	9.162.000.000.00	82 Nilai	9.162.000.000.00	82 Nilai	0.00	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	80 Nilai	85 Nilai	10.165.785.515,00	86 Nilai	10.198.023.293,00	90 Nilai	10.458.995.350,00	90 Nilai	0.00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	85 Nilai	90 Nilai	29.444.054.733,00	90 Nilai	32.388.460.206,00	95 Nilai	35.627.306.226,00	95 Nilai	0.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	80,1 Nilai	82 Nilai	7.591.613.397.00	83 Nilai	7.726.962.629.00	85 Nilai	7.801.962.629.00	85 Nilai	0.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83 Nilai	84 Nilai	6.522.105.983.00	85 Nilai	6.835.151.485.00	86 Nilai	6.835.151.485.00	86 Nilai	0.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

														Anak
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	90 Nilai	90 Nilai	6,458,515,315.00	90 Nilai	6,458,515,315.00	90 Nilai	6,458,515,315.00	90 Nilai	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85 Nilai	90 Nilai	14.146.429.683,00	90 Nilai	10.823.773.649,00	95 Nilai	10.735.729.169,00	95 Nilai	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Inspektorat Kabupaten	85 Nilai	90 Nilai	16.940.915.978,00	95 Nilai	21.033.857.830,00	100 Nilai	21.033.857.830,00	100 Nilai	0.00	Inspektorat Kabupaten
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Bajuin	83 Nilai	83 Nilai	4,184,808,685.00	83 Nilai	4,316,821,249.00	84 Nilai	4,429,880,881.00	84 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bajuin
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Bati-Bati	100 Nilai	100 Nilai	3,591,401,449.00	100 Nilai	3,762,773,096.00	100 Nilai	3,858,127,882.00	100 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bati-Bati
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Batu Ampar	85 Nilai	86 Nilai	3,337,243,735.00	87 Nilai	3,850,760,522.00	88 Nilai	4,107,705,244.00	88 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Batu Ampar
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Bumi Makmur	100 Nilai	100 Nilai	3.578.392.515.225,00	100 Nilai	3.578.392.515.225,00	100 Nilai	3.578.392.515.225,00	100 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Bumi Makmur
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Jorong	83 Nilai	85 Nilai	3,066,429,607.00	86 Nilai	3,964,348,757.00	87 Nilai	4,036,849,417.00	87 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Jorong

X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Kintap	89 Nilai	90 Nilai	4,435,337,476.00	91 Nilai	3,555,931,939.00	92 Nilai	4,009,971,857.00	92 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Kintap
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Kurau	83 Nilai	83 Nilai	3,981,149,516.00	84 Nilai	3,196,038,169.00	84 Nilai	3,288,038,169.00	84 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Kurau
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Panyipatan	80 Nilai	82 Nilai	3,656,384,881.18	83 Nilai	3,731,398,604.00	83 Nilai	3,705,398,604.00	83 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Panyipatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Pelaihari	80,1 Nilai	82 Nilai	12.210.764.166,00	83 Nilai	11.993.939.166,00	83 Nilai	11.993.939.166,00	83 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Pelaihari
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Takisung	80 Nilai	81 Nilai	3,951,881,245.55	82 Nilai	3,674,197,378.92	83 Nilai	3,674,197,378.90	83 Nilai	0.00	Kantor Kecamatan Takisung
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Tambang Ulang	80,1 Persen	82 Persen	3,490,001,405.00	83 Persen	3,490,001,405.00	83 Persen	3,490,001,405.00	83 Persen	0.00	Kantor Kecamatan Tambang Ulang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	86 Nilai	87 Nilai	6,401,863,704.00	88 Nilai	7,194,103,879.00	90 Nilai	7,194,103,879.00	90 Nilai	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80,1 Nilai	82 Nilai	8,242,835,914.00	83 Nilai	8,242,835,914.00	85 Nilai	8,242,835,914.00	85 Nilai	0.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PD dengan Nilai Komponen pelaporan SAKIP minimal 12	50 Persen	100 Persen	800,000,000.00	100 Persen	800,000,000.00	100 Persen	800,000,000.00	100 Persen	0.00	Sekretariat Daerah
---	----	----	---	--	-----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	------	-----------------------

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan sasaran kinerja daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah dalam RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2024-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi

dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

8.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama menggambarkan indikator tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2024-2026. Indikator Kinerja Utama beserta target dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator	Satuan	Target			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
1	IPM	Nilai	70,80	71	71,30	71,30
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,6 - 5,0	4,7 - 5,0	4,8 - 5,0	4,8 - 5,0
3	Gini Ratio	Nilai	0,229	0,228	0,227	0,227
4	Angka Kemiskinan	Nilai	3,45	3,35	3,30	3,30
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	62	63	65	65

8.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah menggambarkan indikator kinerja makro yang berasal dari sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2024-2026. Indikator Kinerja Daerah beserta target dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator	Satuan	Target			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,37	12,39	12,4	12,4
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,05	8,15	8,25	8,25
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,96	69,98	70,00	70,00
4	Persentase pemuda berprestasi	Persen	40	45	50	50
5	Persentase atlet berprestasi	Persen	85	90	95	95
6	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,32	87,34	87,36	87,36
7	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Pertanian dan Perikanan	Persen	2,85	2,9	2,95	2,95
8	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Industri Pengolahan	Persen	3,52	3,55	3,58	3,58

No	Indikator	Satuan	Target			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Persen	4,9	4,95	5,0	5,0
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (akomodasi dan Makan Minum)	Persen	11,75	11,70	11,70	11,70
11	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	5	5	5	5
12	Indeks Infrastruktur	Nilai	47,91	54,21	60,49	60,49
13	IKLH	Nilai	68,57	68,67	68,77	68,77
14	Indeks Resiko Bencana	Nilai	150,1	147	144	144
15	Persentase PPKS yang Mandiri	Persen	17,5	20	22,5	22,5
16	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	82,6	82,8	83	83
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,45	3,35	3,30	3,30
18	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai	0,74	0,75	0,76	0,76
19	Nilai SAKIP KABUPATEN	Nilai	70.01 (BB)	75.00 (B)	80.01 (A)	80.01 (A)
20	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	66 (PB)	71 (PB)	76 (Baik)	76 (Baik)
21	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,54 / A	4,55 / A	4,57 / A	4,57 / A
22	Indeks SPBE	Nilai	3.2	3.4	3.6	3.6

Selain Indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, pada bab ini juga ditampilkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja kunci urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan selama kurun waktu 2024-2026. Berikut indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja kunci urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dilihat pada tabel 8.3 dan 8.4.

Tabel 8.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator	Satuan	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
1	Angka Partisipasi Murni SD	Persen	89,54	89,55	89,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Angka Partisipasi Murni SMP	Persen	57,31	57,32	57,33	
3	Angka Partisipasi PAUD	Persen	77,28	77,29	77,30	
4	Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	Persen	60,55	60,60	60,65	
5	Persentase Seni Budaya local dan cagar budaya local yang dilestarikan	Persen				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	57,73	58	60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Indeks Pembudayaan Kegemaran Membaca	Angka	72,54	75	77	
8	Angka Kematian Ibu	Angka	46	44	42	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
9	Angka Kematian Bayi	Angka	8	7	6	
10	Prevelensi Stunting	Persen	14	13	12	
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,05	1,03	1	DP2KBP3A
13	Jumlah Pemuda Berprestasi	Pemuda	32	32	32	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
14	Jumlah Medali Olahraga	Medali	50	380	55	
15	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	73,05	73,10	73,15	DP2KBP3A
16	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di tangani	Persen	100	100	100	
17	Produksi Hasil Perikanan	Ton	67.463	68.476	69.502	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
18	Produksi Hasil Pertanian					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Padi	Ton	143.962	144.100	144.300	
	Jagung	Ton	122.835	122.982	123.136	
	Cabe	Ton	2.350,90	2.360,10	2.370,10	
	Bawang Merah	Ton	11	11,11	11,23	
	Karet	Ton	14.601,70	14.887,30	15.182,30	
	Kelapa Sawit	Ton	50.865,70	51.730,42	52.920,21	
19	Produksi Hasil Peternakan	Ton				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Daging :					
	Sapi Potong		565	599	635	
	Kerbau		6	6	6	
	Kambing		121	129	136	
	Ayam Buras		1,399	1,483	1,572	
	Ayam Ras Pedaging		27,773	29,440	31,206	
	Itik		297	314	333	
	Telur :					
	Ayam Buras		2,956	3,134	3,322	
	Ayam Ras Petelur		49,663	52,643	55,801	
	Itik		1,088	1,153	1,222	

No	Indikator	Satuan	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
20	Pertumbuhan Nilai Usaha IKM	Persen	3,6	3,8	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
21	Persentase Koperasi berkualitas	Persen	27	28	29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
22	Persentase Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil	Persen	1,80	1,83	1,86	
23	Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Usaha	Persen	100	100	100	
24	Persentase Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	Persen	6,25	5,88	5,55	Dinas Pariwisata
25	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Milyar	1.568,66	1.647,09	1.729,45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	43,19	54,38	65,66	DPRKPLH
27	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Nilai	26,9	33,49	40,11	Dinas Perhubungan
28	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	73,65	74,77	75,69	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
29	Indeks Kualitas Air	Nilai	58,72	58,82	58,92	DPRKPLH
30	Indeks Kualitas Udara	Nilai	92,15	92,25	92,35	
31	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	41,88	41,98	42,08	
32	Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	65	85	100	Dinas Sosial
34	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Sosial	Persen	90	95	100	
35	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	72	72,5	73	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
36	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	91	91,5	92	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
37	Jumlah Tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Orang	270	285	300	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
38	Jumlah Pencari Kerja (terdaftar dan tidak terdaftar)	Orang	7350	7290	7030	
39	Jumlah lowongan Kerja		320	345	360	
40	Serapan Tenaga Kerja (terdaftar dan tidak terdaftar)	Orang	1180	1210	1250	

No	Indikator	Satuan	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
41	Persentase Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	Persen	40	45	50	
42	Persentase Desa Mandiri	Persen	13,1	16,2	19,2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
43	Nilai SAKIP Kabupaten (Perencanaan dan Pengukuran)	Nilai	43	45	48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
44	Nilai SAKIP Kabupaten (Pelaporan)	Nilai	11,5	12	12,5	Sekretariat Daerah
45	Nilai SAKIP Kabupaten (Pengawasan)	Nilai	20	22	24	Inspektorat Daerah
46	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,340	3,360	3,380	Inspektorat Daerah
47	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	
48	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	52,16	52,18	53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
49	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	Nilai	62	62,5	63	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
50	Tingkat Kemandirian Fiskal (Tingkat Pendapatan Asli Daerah)	Persen	10,81	11,75	12,13	Badan Pendapatan Daerah
51	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
52	IKM Kecamatan	Nilai				Kecamatan
	Pelaihari		87,5	88	88,5	
	Bajuin		83	83	84	
	Batu Ampar		86	87	88	
	Jorong		84	85	86	
	Kintap		90	91	92	
	Panyipatan		86	87	89	
	Takisung		90,05	90,1	90,15	
	Bumi Makmur		92,50	92,60	92,70	
	Kurau		90,3	90,5	90,7	
	Tambang Ulang		80,25	80,30	80,35	
	Bati-bati		90,2	90,5	91	
53	IKM DPMPSTP	Nilai	90,50	90,75	91,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Satu Pintu
54	IKM Sekretariat Daerah	Nilai	93,5	94	94,5	Sekretariat Daerah
55	IKM Disdukcapil	Nilai	92,15	92,53	92,9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
56	Capaian SPM Trantibum	Persen	100	100	100	Satpol PP dan Damkar

No	Indikator	Satuan	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
57	Indeks kepuasan Anggota DPRD	Nilai	82	84	86	Sekretariat DPRD
58	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	61,50	65,50	70	BKPSDM
59	Persentase Pencapaian Domain SPBE	Persen	64	68	72	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 8.4 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut

No.	Urusan	IKK Outcome	Target		
			2024	2025	2026
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	77,28	77,29	77,3
2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	89,54	89,55	89,56
3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	57,31	57,32	57,33
4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	60,55	60,60	60,65
5	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,14	0,15	0,15
6	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100
7	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100
8	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100
9	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100
10	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100
11	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
12	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100

No.	Urusan	IKK Outcome	Target		
			2024	2025	2026
13	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100
14	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
15	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
16	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100
17	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100
18	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100
19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	15,57	17,79	19,30
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	49,67	53,72	54,76
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76,73	87,09	87,09
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78	82	86
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	78	82	86
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100	100
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	85	85	85

No.	Urusan	IKK Outcome	Target		
			2024	2025	2026
26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1,61	1,61	1,61
27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100
28	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100
29	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100
30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	12,86	25,92	39,24
31	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	2,69	2,21	1,73
32	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	46,07	50,96	55,85
33	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100
34	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	92,308	95	100
35	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100

No.	Urusan	IKK Outcome	Target		
			2024	2025	2026
36	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100
37	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100
38	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	4,9	5	5
39	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	51,16 menit	51,16 menit	51,16 menit
40	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	32,37	20,60	17,66
41	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	48,76	60,96	60,96
42	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90	90	90
43	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,15	0,16	0,17
44	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
45	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	11	12,25	13,5
46	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	6,7	6,9	7
47	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	10	15	20

No.	Urusan	IKK Outcome	Target		
			2024	2025	2026
48	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100	100
49	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,006	0,005	0,004
50	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	114	114	114
51	Pertanahan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100
52	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	68,57	68,67	68,77
53	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	100	100	100
54	Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	70	80	90
55	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Perekaman KTP elektronik	99,6	99,8	99,9
56	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	55	60	65
57	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Kepemilikan akta kelahiran	99	99,07	99,10
58	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	5	7.5	10

No.	Urusan	IKK Outcome	Target		
			2024	2025	2026
59	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Tidak ada desa tertinggal	Tidak ada desa tertinggal	Tidak ada desa tertinggal
60	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	2	2	2
61	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,08	2,07	2,05
62	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,00	77,20	77,50
63	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,53	8,40	8,27
64	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	1	1,1	1,1
65	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,25	0,25	0,25
66	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	77,5	77,5	77,5
67	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100
68	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	1,5	1,75	2
69	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase Koperasi yang berkualitas	27	29	30

No.	Urusan	IKK Outcome	Target		
			2024	2025	2026
70	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	0.94	1.06	1.17
71	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5	5	5
72	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	30	30	30
73	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	50	50	50
74	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	2	2	2
75	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100
76	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100
77	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	68	70	72
78	Kebudayaan	tingkat pelestarian cagar budaya	60	65	70
79	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72,54	75	77
80	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,73	58	60
81	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	67.463	68.476	69.502
82	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	5	7	10
83	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	10	15	20
84	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	7	8	9
85	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	7	8	9

No.	Urusan	IKK Outcome	Target		
			2024	2025	2026
86	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,12	0,13	0,14
87	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	267.436	267.855	268.345
88	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	1	1	1
89	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	100	100
90	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	100	100	100
91	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	100	100
92	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	5	6	7
93	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	50	60	70
94	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	60	65	70
95	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	65	70	75
96	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	80	90	100

No.	Urusan	IKK Outcome	Target		
			2024	2025	2026
97	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	70	80	90
98	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	10,81	11,75	12,13
99	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,340	3,360	3,380
100	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3
101	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
102	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	38	40	42
103	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	59	60	61
104	Pengadaan	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	3	3	3
105	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar () (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	318,61	327,06	334,55
106	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional () (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18,67	18,51	18,1
107	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi () (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4,44	4,7	5

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 merupakan dokumen transisi yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dokumen perencanaan pembangunan daerah pasca berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2024 yang mengikuti berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut pada tahun 2024. Dokumen RPD Kabupaten Tanah Laut tersebut, menjabarkan perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah pembangunan Kabupaten Tanah Laut, hal-hal yang hendak dicapai dalam periode tersebut, dan langkah strategis yang akan dilakukan agar tujuan dan sasaran hingga program pembangunan daerah dapat tercapai serta mampu mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan program-program pembangunan yang terintegrasi dengan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut. Rencana Pembangunan Daerah ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, rujukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. Selanjutnya RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode satu tahun. RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya, Perkada ini akan disebarluaskan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2024 sampai dengan 2026. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan hingga akhir periode RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2027. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, akan dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2030 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2025 direncanakan akan menyusun RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2030 beserta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2030. Pada saat yang hampir bersamaan, pada tahun 2025 merupakan masa berakhirnya RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025, oleh karena itu pada satu tahun sebelum RPJPD berakhir direncanakan menyusun RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045 beserta KLHS RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045. Selama kurun waktu empat tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ini dilaksanakan dengan konsisten oleh perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program program pembangunan Kabupaten Tanah Laut periode berikutnya. Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung empat tahun ke depan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik (terutama di bidang pendidikan dan kesehatan), meningkatkan perekonomian rakyat agar semakin berdaya, menurunkan jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan menurunkan jumlah pengangguran, menurunkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju secara signifikan, dengan didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel. Program transisi tahun 2024 dirumuskan

dengan tetap berupaya menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang adil kepada masyarakat.

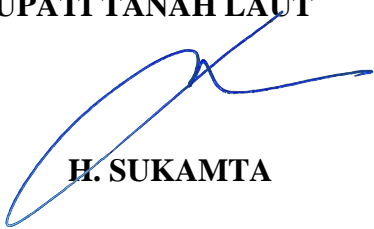
9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, pemangku kepentingan, dan masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ini dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
3. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, yang berpedoman pada RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
4. Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
5. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas;

6. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan;
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, Bappeda Kabupaten Tanah Laut berkewajiban melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD);

BUPATI TANAH LAUT



H. SUKAMTA